

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Setiap strategi bisa untuk satu atau beberapa sasaran atau sebaliknya satu sasaran menggunakan beberapa strategi. Strategi memiliki parameter keberhasilan dan kegagalan yang berupa capaian indikator kinerja, pengelolaan kapasitas birokrasi, sistem manajemen atau implementasi teknologi.

Berdasarkan Permasalahan serta Isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun 2018-2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

6.1 STRATEGI

6.1.1 Strategi pada RPJPD Provinsi Banten 2005 - 2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten tahun 2012-2017 tahap akselerasi I berakhir dan dilanjutkan dengan RPJMD Provinsi Banten 2018-2022 (Tahap akselerasi II). Dalam menyelaraskan perencanaan daerah tersebut merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten tahun 2005-2025 yang setiap tahapannya memiliki strategi dengan prioritas pembangunan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1

TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS RPJPD 2005-2025 PROVINSI BANTEN

	RPJMD Ke-1 (2005-2007)	RPJMD Ke-2 (2008-20012)	RPJMD Ke-3 (2013-2017)	RPJMD Ke-4 (2018-2022)	RPJMD Ke-5 (2023-2025)
	Tahap Revitalisasi-I	Tahap Revitalisasi-II	Tahap Akselerasi-I	Tahap Akselerasi-II	Tahap Modernisasi
1	Peningkatan Cakupan Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah;	1 .Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah;	1 Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial;	1 Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial;	1 Peningkatan Kesejahteraan Sosial ;
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;	2 Penanggulangan Kemiskinan,	2 Pemantapan Kualitas Sumber	2 Peningkatan Daya Saing Sumber Daya	2 Pemantapan Daya Saing Sumber Daya
3	PeningkatanPertumbu han Perekonomian;	3 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;	3 Pemantapan Kualitas dan Pemerataan Perekonomian;	3 Peningkatan Daya Saing Perekonomian;	3 Pemantapan Daya Saing Perekonomian;

	RPJMD Ke-1 (2005-2007)	RPJMD Ke-2 (2008-20012)	RPJMD Ke-3 (2013-2017)	RPJMD Ke-4 (2018-2022)	RPJMD Ke-5 (2023-2025)
	Tahap Revitalisasi-I	Tahap Revitalisasi-II	Tahap Akselerasi-I	Tahap Akselerasi-II	Tahap Modernisasi
4	Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial;	4 Pemulihan dan Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah;	4 Pemantapan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Wilayah;	4 Peningkatan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana wilayah;	4 Pemantapan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah;
5	Pengelolaan dan Revitalisasi Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan	5 Pengelolaan dan Revitalisasi Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan	5 Pengelolaan dan Revitalisasi Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan	5 Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;	5 Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
6	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;	6 Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;	6 Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;	6 Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;	6 Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih;
7	Perencanaan dan Penataan Pelabuhan- Pelabuhan Lokal, Nasional, dan	7 Percepatan Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis;	7 Pengembangan dan Pembangunan Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis.	7 Pengembangan dan Pembangunan serta Optimalisasi Fungsi dan Peran Pusat	7 Optimalisasi Fungsi dan Peran Pusat Pertumbuhan dan

6.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5 tahun, memiliki fokus berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan strukur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja *outcome*.

Sebagaimana tabel 6.2 Uraian Tujuan, Sasaran, dan Strategi dan sebagaimana tabel 6.3 Uraian Arah Kebijakan setiap tahun (terlampir)

Tabel 6.2
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Banten 2017 – 2022

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi : Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlakul Karimah			
Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)			
1.1 Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	1.1.1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	1.01 Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat	1.01 Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan
	1.1.2 Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik Badan Penghubung	1.02 Meningkatkan Koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan	1.02 Peningkatan Koordinasi, mediasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan
	1.1.3 Terwujudnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya	1.03 Meningkatkan Fasilitasi Tugas dan Fungsi Anggota DPRD	1.03 Perwujudan Pelayanan Prima Untuk Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
	1.1.4 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	1.04 Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan	1.04 Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan peraturan
	1.1.5 Meningkatnya Kualitas SPIP	1.05 Meningkatkan Fungsi Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan	1.05 Peningkatan Peran APIP dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah
	1.1.6 Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	1.06 Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	1.06 Peningkatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan teknologi informasi
	1.1.7 Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	1.07 Meningkatkan kualitas Penelitian	1.07 Peningkatan Kualitas Hasil Penelitian Untuk Menjawab Permasalahan Pembangunan
	1.1.8 Terwujudnya Kompetensi Aparatur	1.08 Meningkatkan kompetensi aparatur	1.08 Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana dan Sumber daya manusia serta standarisasi dan sertifikasi kompetensi Aparatur
	1.1.9 Terwujudnya Profesionalisme aparatur	1.09 Meningkatkan Profesionalisme Aparatur	1.09 Peningkatan Pengelolaan Sumber daya Aparatur
			1.10 Peningkatan Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	1.1.10 Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Optimal	1.10 Meningkatkan Pelayanan Pendapatan Daerah	1.11 Peningkatan Tata Kelola Pelayanan pendapatan Daerah dan melalui Pemanfaatan teknologi Informasi
	1.1.11 Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	1.11 Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah Serta ketentraman dan ketertiban umum daerah	1.12 Penegakan Peraturan daerah yang mendukung pelayanan publik dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum daerah untuk pemenuhan cakupan SPM
	1.1.12 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI	1.12 Meningkatkan Wawasan Kebangsaan	1.13 Peningkatan Wawasan Kebangsaan pada Peran Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan
		1.13 Meningkatkan keamanan dan stabiitas daerah	1.14 Peningkatan Peran Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan stabilitas daerah
	1.1.13 Meningkatnya Penanggulangan Kebencanaan yang efektif	1.14 Meningkatkan Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana	1.15 Peningkatan mitigasi, penanggulangan bencana dan menurunkan titik terdampak bencana melalui sistem informasi kebencanaan
	1.1.14 Meningkatnya Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel	1.15 Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan	1.16 Peningkatan Administrasi Kependudukan melalui Optimalisasi Sistem Informasi Kependudukan
	1.1.15 Meningkatnya Kerjasama dan penyelenggaraan adminstrasi pemerintahan	1.16 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	1.17 Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
	1.1.16 Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	1.17 Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah	1.18 Peningkatan kualitas dan kuantitas kebijakan peraturan perundangan daerah dan Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat
	1.1.17 Meningkatnya Tatalaksana Orgnisasi Daerah Yang Efektif	1.18 Meningkatkan Kualitas kelembagaan dan ketatalaksaaan perangkat daerah	1.19 Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah melalui Akuntabilitas dan Tata Kelola Organisasi
	1.1.18 Meningkatnya Pelayanan Umum yang Prima	1.19 Meningkatkan kualitas pelayanan sekretariat daerah	1.20 Optimalisasi Pelayanan Sekretariat Daerah melalui Perwujudan Pelayanan Prima
	1.1.19 Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1.20 Meningkatkan kualitas kebijakan kesejahteraan masyarakat	1.21 Peningkatan kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat
	1.1.20 Meningkatnya Pelayanan dan fasilitas Pimpinan	1.21 Meningkatkan kualitas pelayanan pimpinan	1.22 Peningkatan kualitas pelayanan pimpinan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	1.1.21 Meningkatkan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan	1.22 Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan, Ekonomi dan Pemerintahan Desa/Kelurahan	1.23 Penataan serta Pembinaan Kelembagaan dan kerjasama desa/Kelurahan
	1.1.22 Meningkatkan Pelayanan Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi dan keterbukan Informasi	1.23 Meningkatkan Aksesibilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika	1.24 Peningkatan Pelayanan dan keamanan informasi berbasis teknologi
	1.1.23 Meningkatkan Administrasi Pembangunan Daerah	1.24 Meningkatkan kinerja Administrasi Pembangunan	1.25 Peningkatan kualitas kebijakan bidang administrasi pembangunan
	1.1.24 Meningkatkan Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas	1.25 Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal	1.26 Peningkatan pengelolaan arsip pemerintah daerah secara profesional yang didukung dengan teknologi Informasi
	1.1.25 Meningkatkan Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan secara elektronik	1.26 Meningkatkan Akurasi data dan Informasi	1.27 peningkatkan data dan informasi perencanaan pembangunan
	1.1.26 Meningkatkan ketersediaan data dan Statistik Sektoral yang dikelola secara elektronik	1.27 Meningkatkan Akurasi Data dan Statistik Sektoral Secara Elektronik	1.28 Peningkatan Validitas Data dan Statistik Sektoral
Misi 2 : Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur			
2.1 Meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah	2.1.1 Meningkatkan Ketersedian Infrastruktur Daerah	2.01 Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Daerah	2.01 Peningkatan ketersediaan Infrastruktur untuk menunjang Perkonomian Daerah
	2.1.2 Meningkatkan Infrastruktur jalan dan jembatan yang handal	2.02 Meningkatkan Kualitas infrastruktur Jalan dan Jembatan	2.02 Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jalan dan Jembatan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis
		2.03 Meningkatkan Profesionalisma Badan Usaha Jasa Konstruksi	2.03 Peningkatan SumberDaya Badan Usaha Jasa Konstruksi
	2.1.3 Meningkatkan sarana dan prasarana jaringan sumberdaya air	2.04 Meningkatkan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir	2.04 Peningkatan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir
		2.05 Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan Penyediaan Air Baku	2.05 Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan Penyediaan Air Baku

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2.06 Meningkatkan Sarana dan Prasarana jaringan irigasi	2.06 Pembangunan Bendung, empang dan situ
			2.07 Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan Irigasi
	2.1.4 Meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	2.07 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Penataan Ruang dan Pemanfaatan Ruang	2.08 Peningkatan kualitas Penataan dan Pemanfaatan Ruang melalui Penguatan Regulasi
	2.1.5 Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	2.08 Meningkatkan penataan dan penatagunaan kawasan perumahan dan permukiman	2.09 penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh
		2.09 Meningkatkan Sistem Tata Air Terpadu	2.10 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional
		2.10 Meningkatkan pengeloan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat	2.11 Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat
		2.11 Meningkatkan pengeloan sarana dan prasarana persampahan	2.12 Pembangunan TPST Regional
	2.1.6 Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	2.12 Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana Kawasan strategis provinsi	2.13 Pembangunan dan Peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana Kawasan strategis Provinsi
	2.1.7 Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas	2.13 meningkatkan manajemen rekayasa lalu lintas	2.14 Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi
		2.14 Meningkatkan sarana dan prasarana kelengkapan jalan	2.15 Pembangunan sarana dan Prasarana kelengkapan Jalan
		2.15 Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi	2.16 Pembangunan Sarana dan prasarana transportasi
	2.1.8 Meningkatnya Kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik	2.16 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi	2.17 Peningkatan Kinerja Pelayanan melalui Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi
	2.1.9 Meningkatnya Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal	2.17 Meningkatkan sapras kelistrikan dan EBT	2.18 Penyediaan peraturan, dokumen teknis, pengawasan dan pengendalian jaringan bidang ketenagalistrikan
	2.1.10 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai	2.18 Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesibilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika	2.19 Peningkatan sarana prasarana teknologi informasi
	2.1.11 Meningkatnya Kebijakan Infrastruktur Daerah	2.19 Meningkatkan kualitas kebijakan Infrastruktur bagi masyarakat	2.20 Peningkatan kualitas kebijakan infrastruktur bagi masyarakat

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
Misi 3 : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas							
3.1	Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan dan Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing	3.1.1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	3.01	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Menengah dan Khusus	3.01	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Menengah dan Khusus
		3.1.2	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	3.02	Mengembangkan jiwa kewirausahaan	3.02	Menciptakan dan mengembangkan wirausaha
		3.1.3	Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja bagi Masyarakat	3.03	Meningkatkan Kualitas Angkatan Kerja	3.03	Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja
		3.1.4	Meningkatnya Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender)	3.04	Pengarusutamaan gender dalam Setiap Proses Pembangunan	3.04	Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan
		3.1.5	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus	3.05	Meningkatkan Akses dan Kualitas serta Inklusivitas Pendidikan Yang Merata dan Terjangkau	3.05	Peningkatan Kualitas dan Inklusivitas Pendidikan yang Berdaya Saing
						3.06	Penyediaan Biaya Operasional Sekolah
		3.1.6	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan	3.07	Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan	3.07	Revitalisasi museum, dan peningkatan budaya banten
		3.1.7	Terwujudnya pemuda wirausahawan baru dan Olah Raga yang berprestasi	3.08	Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas	3.08	Peningkatan kelembagaan karang taruna dan/atau organisasi lain yang berafiliasi dengan kepemudaan
				3.09	Meningkatkan prestasi olahraga di berbagai event	3.09	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
		3.1.8	Meningkatnya Pengarustamaan Gender	3.10	Meningkatkan pengarusutaaman gender pada semua sektor	3.10	Peningkatan peran perempuan yang dapat meningkatkan partisipasi pendidikan, kualitas kesehatan serta peningkatan perekonomian keluarga
		3.1.9	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	3.11	Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	3.11	Penurunan angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
	3.1.10	Meningkatnya Budaya Literasi	3.12	Peningkatan Minat Baca Masyarakat melalui Optimalisasi penerapan teknologi informasi dan Perpustakaan Daerah	3.12	Peningkatan Minat Baca Masyarakat melalui Optimalisasi penerapan teknologi informasi dan Perpustakaan Daerah	
	3.1.11	Menurunnya PMKS	3.13	meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan PMKS	3.13	Peningkatan pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan jaminan sosial,	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			serta Penanganan Kelembagaan perawatan dan pengasuhan
	3.1.12 Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas	3.14 Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Pelatihan dan Pemagangan
			3.15 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Balai Latihan Kerja
Misi 4 : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas			
4.1 Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan	4.1.1 Meningkatnya Pelayanan kesehatan	4.01 Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang berkualitas	4.01 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
	4.1.2 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses	4.02 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat	4.02 Peningkatan Akses dan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat
			4.03 Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan
			4.04 Peningkatan Pencegahan dan pengendalian penyakit
	4.1.3 Meningkatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Tenaga Kesehatan	4.03 Meningkatkan akses dan kualitas Upaya Kesehatan Masyarakat	4.05 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan kesehatan masyarakat, Pencegahan dan pengendalian penyakit
	4.1.4 Meningkatnya Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	4.04 Meningkatkan akses dan kualitas Upaya Kesehatan Perorangan	4.06 Peningkatan Kelas Pelayanan Rumah Sakit
	4.1.5 Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	4.05 Meningkatkan Pengendalian Penduduk	4.07 Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten Kota untuk pengendalian pertumbuhan penduduk
Misi 5 : Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi			
5.1 Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasis Potensi Ekonomi Lokal	5.1.1 Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	5.01 Mewujudkan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	5.01 Perwujudan Iklim Usaha yang Kondusif untuk Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan
	5.1.2 Meningkatnya Layanan Keuangan Pada Masyarakat	5.02 Meningkatkan Aksesibilitas dan Pemanfaatan Layanan Keuangan	5.02 Peningkatan Aksesibilitas dan pemanfaatan Layanan Keuangan kepada Masyarakat
	5.1.3 Meningkatnya Daya Saing Daerah	5.03 Mewujudkan Keunggulan Kompetitif berbasis Potensi Daerah	5.03 Peningkatan Keunggulan Kompetitif melalui Optimalisasi Potensi Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	5.1.4 Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon	5.04 Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan	5.04 Perwujudan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Ramah Lingkungan
	5.1.5 Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha	5.05 Meningkatkan iklim investasi, dan Meningkatkan promosi Potensi investasi	5.05 Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN), dan PMA dengan mendorong kemitraan PMA dan PMDN, serta kebijakan pemanfaatan bahan baku
		5.06 Meningkatkan pelayanan melalui kemudahan perizinan, serta meningkatkan kepuasan masyarakat	5.06 Peningkatan pelayanan perizinan melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan
	5.1.6 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrian yang optimal	5.07 Mengembangkan Sektor Industri	5.07 Pengembangan perwilayahan Industri dan Konektifitas antara industri kecil, menengah dan besar
			5.08 Pengembangan Sumber Daya Industri
			5.09 Pengembangan kualitas produk industri
	5.1.7 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali	5.08 Meningkatkan Stabilitas Harga Komoditas penting dan strategis	5.10 Peningkatan Efisiensi Sistem dan Distribusi Logistik melalui Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi dan sistem informasi komoditas penting dan strategis
			5.11 Peningkatan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan pengawasan barang/jasa yang beredar
		5.09 Memperluas pangsa pasar Ekspor dan luar Daerah	5.12 Pemanfaatan peran Perwakilan perdagangan di luar negeri dan luar daerah dalam meningkatkan akses pasar komoditas unggulan Provinsi Banten
		5.10 Meningkatkan daya saing Produk berbasis keunggulan lokal	5.13 Peningkatan Standarisasi, Mutu Produk, kelembagaan dan Regulasi Pro Konsumen
	5.1.8 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian yang optimal	5.11 Meningkatkan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, mekanisasi, dan rehabilitasi bidang pertanian	5.14 Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri (agroindustri)
	5.1.9 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan yang optimal	5.12 Meningkatkan produksi, Nilai Tambah daya saing Produk Kelautan dan perikanan	5.15 Peningkatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui pengelolaan Sumber Daya Kelautan Perikanan (SDKP) yang bertanggung jawab, berdaya saing dan berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	5.1.10 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah yang terjaga	5.13 Meningkatkan Ketersediaan, Optimalisasi Sumber Daya Lokal, dan Perlindungan Pangan Daerah	5.16 Peningkatan Ketahanan Pangan untuk Menjamin Ketersediaan dan Keamanan Pangan Daerah
	5.1.11 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata yang optimal	5.14 Meningkatkan Industri dan Jasa Bidang Pariwisata serta Ekonomi Kreatif	5.17 Peningkatan Penataan dan Pengembangan destinasi wisata
			5.18 Peningkatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
			5.19 Peningkatan Pengembangan pangsa pasar, kelembagaan dan kemitraan pariwisata
			5.20 Peningkatan pengembangan bidang usaha dan industri kreatif pariwisata
	5.1.12 Meningkatnya Kualitas Koperasi	5.15 meningkatkan pengawasan, pemberdayaan, kelembagaan dan kemitraan koperasi serta optimalisasi teknologi informasi	5.21 Peningkatan kelembagaan koperasi melalui pembinaan dan kemudahan perizinan
			5.22 Peningkatan Kemudahan Akses Pasar dan Modal Bagi Koperasi
	5.1.13 Meningkatnya Usaha Kecil menjadi usaha menengah	5.16 Meningkatkan Akses permodalan dan layanan kredit, pendampingan dan pengembangan usaha serta mendorong terwujudnya kemudahan kepastian dan perlindungan usaha	5.23 Peningkatan Kemudahan Akses Pasar dan Modal Bagi UMKM
	5.1.14 Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	5.17 Meningkatkan pengendalian pengawasan lingkungan hidup	5.24 Peningkatan kualitas air dan udara melalui pengelolaan sampah dan limbah
	5.1.15 Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	5.18 Meningkatkan Konservasi Daerah Aliran Sungai	5.25 Peningkatan Konservasi Hutan dan Daerah Aliran Sungai
		5.19 Meningkatkan Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung	5.26 Peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung serta kesadaran masyarakat peduli hutan
	5.1.16 Meningkatnya Kebijakan Perekonomian Daerah dan Pembinaan Pengendalian Bidang Perekonomian	5.20 Meningkatkan akses perekonomian masyarakat	5.27 Peningkatan kualitas kebijakan yang berpihak kepada peningkatan perekonomian masyarakat
	5.1.17 Meningkatnya Pengendalian, Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara yang efektif	5.21 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara	5.28 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	5.1.18 Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	5.22 meningkatkan Perlindungan dan pengawasan tenaga kerja	5.29 Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, termasuk norma kerja, serta norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, dan menciptakan hubungan industrial yang kondusif
		5.23 meningkatkan jaminan ketenagakerjaan	5.30 memperluas Cakupan BPJS ketenagakerjaan pada Pekerja sektor formal dan informal

Tabel 6.3
Arah Kebijakan Tahunan Pembangunan Provinsi Banten 2017 - 2020

Arah Kebijakan				
2018	2019	2020	2021	2022
Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Pelaksanaan Program Kegiatan	Peningkatan kualitas kebijakan akses infrastruktur bagi masyarakat	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Pelaksanaan Program Kegiatan	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Pelaksanaan Program Kegiatan	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Pelaksanaan Program Kegiatan
Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Peningkatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan teknologi informasi	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan , serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima	Peningkatan kesejahteraan masyarakat masyarakat melalui kemudahan akses ke lembaga keuangan
Peningkatan kualitas kebijakan akses infrastruktur bagi masyarakat	Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jalan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis	Peningkatan kesejahteraan masyarakat masyarakat melalui kemudahan akses ke lembaga keuangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Peningkatan kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat
Peningkatan aksesibilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika	Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jembatan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis	Peningkatan kualitas kebijakan yang berpihak kepada peningkatan perekonomian masyarakat	Peningkatan kesejahteraan masyarakat masyarakat melalui kemudahan akses ke lembaga keuangan	Peningkatan Koordinasi, mediasi dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan

Arah Kebijakan				
2018	2019	2020	2021	2022
Peningkatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan teknologi informasi	Peningkatan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir	Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana dan Sumber daya manusia serta standarisasi dan sertifikasi kompetensi	Peningkatan kualitas kebijakan yang berpihak kepada peningkatan perekonomian masyarakat	Peningkatan Pelayanan Tugas dan Fungsi Anggota DPRD
Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jalan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis	Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan Penyediaan Air Baku	Peningkatan Pengelolaan Sumber daya Aparatur	Peningkatan kualitas dan kuantitas kebijakan peraturan perundangan daerah	Peningkatan Peran Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan stabilitas daerah
Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jembatan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis	Pembangunan Bendung, empang dan situ	Peningkatan Peran Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	Peningkatan kualitas kebijakan akses infrastruktur bagi masyarakat	Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jalan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis
Peningkatan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir	Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan Irigasi	Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jalan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis	Peningkatan kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jembatan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis
Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan Penyediaan Air Baku	Peningkatan kualitas Regulasi Penataan dan Pemanfaatan Ruang	Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jembatan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis	Peningkatan kualitas kebijakan bidang administrasi pembangunan	Peningkatan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir

Arah Kebijakan				
2018	2019	2020	2021	2022
Pembangunan Bendung, empang dan situ	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional	Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan Penyediaan Air Baku	Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan dan aset daerah	Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan Penyediaan Air Baku
Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan Irigasi	Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat	Pembangunan Bendung, empang dan situ	Peningkatan Capaian Leveling APIP	Pembangunan Bendung, empang dan situ
Peningkatan kualitas Regulasi Penataan dan Pemanfaatan Ruang	Pembangunan TPST Regional	Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan Irigasi	Peningkatan sarana prasarana teknologi informasi dan Sumber daya manusia	Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan Irigasi
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional	Peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana strategis provinsi	Peningkatan Sumber Daya Badan Usaha Jasa Konstruksi	Peningkatan aksesibilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika	Peningkatan kualitas Regulasi Penataan dan Pemanfaatan Ruang
Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi	Peningkatan kualitas Regulasi Penataan dan Pemanfaatan Ruang	Peningkatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan teknologi informasi	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional
Pembangunan TPST Regional	Pembangunan sarana dan Prasarana kelengkapan Jalan	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional	Peningkatan Kualitas Analisis kebutuhan Penelitian	Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat
Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat	Peningkatan Kualitas Pelayanan data dan Informasi berbasis Teknologi Informasi	Peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana strategis provinsi
penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh	Pembangunan Sarana dan prasarana transportasi	Pembangunan TPST Regional	Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana dan Sumber daya manusia serta standarisasi dan sertifikasi kompetensi	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi
Peningkatan Akses layanan pendidikan menengah serta relevansi pendidikan	penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh	Peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana strategis provinsi	Peningkatan Pengelolaan Sumber daya Aparatur	Pembangunan sarana dan Prasarana kelengkapan Jalan

Arah Kebijakan				
2018	2019	2020	2021	2022
Peningkatan kualitas layanan pendidikan khusus serta relevansi pendidikan	Peningkatan Akses layanan pendidikan menengah serta relevansi pendidikan	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi	Peningkatan Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan pelayanan kesehatan, Sumber daya kesehatan dan kefarmasian	Peningkatan kualitas layanan pendidikan khusus serta relevansi pendidikan	Pembangunan sarana dan Prasarana kelengkapan Jalan	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan pendapatan Daerah dan Pemanfaatan teknologi Informasi	Pembangunan Sarana dan prasarana transportasi
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan pelayanan kesehatan, Sumber daya kesehatan dan kefarmasian	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	Penegakan Peraturan daerah yang mendukung pelayanan publik dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum daerah	penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan kesehatan masyarakat, Pencegahan dan pengendalian penyakit	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia	Pembangunan Sarana dan prasarana transportasi	Peningkatan Peran Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	Peningkatan Akses layanan pendidikan menengah serta relevansi pendidikan
	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan kesehatan masyarakat, Pencegahan dan pengendalian penyakit	penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh	Peningkatan koordinasi penanggulangan kebencanaan	Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN), dan PMA dengan mendorong kemitraan PMA dan PMDN, serta kebijakan pemanfaatan bahan baku
	Peningkatan jumlah destinasi wisata yang berkualitas dan didukung oleh akses infrastruktur	Peningkatan Akses layanan pendidikan menengah serta relevansi pendidikan	Peningkatan Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Prabencana dan Tanggap Darurat Bencana	Peningkatan pelayanan perizinan melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan

Arah Kebijakan				
2018	2019	2020	2021	2022
	Peningkatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Peningkatan kelembagaan karang taruna dan/atau organisasi lain yang berafiliasi dengan kepemudaan	Peningkatan Pemulihan Kondisi sosial ekonomi, sarana dan prasarana pasca bencana	Pengembangan perwilayahan Industri melalui pembentukan sentra industri Kecil pada kawasan dan luar kawasan industri
	memperluas Cakupan BPJS ketenagakerjaan pada Pekerja sektor formal dan informal	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten Kota untuk tertib administrasi Kependudukan	Pengembangan kualitas produk industri kecil
		Peningkatan peran perempuan yang dapat meningkatkan partisipasi pendidikan, kualitas kesehatan serta peningkatan perekonomian keluarga	Peningkatan Capaian Nilai SAKIP	Peningkatkan Efisiensi Sistem dan Distribusi Logistik melalui Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi dan sistem informasi komoditas penting dan strategis
		Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan dan penerapan teknologi informasi	Peningkatan Capaian Maturasi SPIP	Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri (agroindustri)
		Peningkatan kualitas layanan pendidikan khusus serta relevansi pendidikan	Peningkatan Peran APIP dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah	Peningkatan jumlah destinasi wisata yang berkualitas dan didukung oleh akses infrastruktur
		Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan pelayanan kesehatan, Sumber daya kesehatan dan kefarmasian	Peningkatan Capaian Opini Laporan Keuangan	Peningkatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia	Peningkatan Pelayanan Tugas dan Fungsi Anggota DPRD	Peningkatan Pengembangan pangsa pasar, kelembagaan dan kemitraan pariwisata

Arah Kebijakan				
2018	2019	2020	2021	2022
		Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan kesehatan masyarakat, Pencegahan dan pengendalian penyakit	Peningkatan Peran Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan stabilitas daerah	Peningkatan pengembangan bidang usaha dan industri kreatif pariwisata
		Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN), dan PMA dengan mendorong kemitraan PMA dan PMDN, serta kebijakan pemanfaatan bahan baku	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	Kemudahan perizinan kelembagaan pembinaan dan pengawasan koperasi, untuk mencapai jumlah Pertumbuhan koperasi aktif dan sehat
		Peningkatan pelayanan perizinan melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan	Pembangunan Sarana dan prasarana transportasi	Kemudahan akses inovasi produk, informasi teknologi dan pembiayaan bagi koperasi aktif
		Pengembangan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Revitalisasi museum, pengembangan taman budaya	Peningkatan tumbuhnya wirausaha kelas menengah baru yang bergerak di sektor Usaha Kecil melalui pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha, serta akses permodalan
		Peningkatan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan pengawasan barang/jasa yang beredar	Peningkatan kelembagaan karang taruna dan/atau organisasi lain yang berafiliasi dengan kepemudaan	Penyediaan peraturan, dokumen teknis, pengawasan dan pengendalian jaringan bidang ketenagalistrikan
		Pengembangan kualitas produk industri kecil	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Penyediaan peraturan, dokumen teknis, pengawasan dan pengendalian jaringan bidang geologi dan minerba

Arah Kebijakan				
2018	2019	2020	2021	2022
		Peningkatkan Efisiensi Sistem dan Distribusi Logistik melalui Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi dan sistem informasi komoditas penting dan strategis	Penurunan angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Penurunan tingkat pengangguran terbuka dengan meningkatkan layanan pencari kerja melalui pelatihan, pemagangan, kelembagaan dan akreditasi serta pembinaan produktifitas
		Peningkatan Standarisasi, Mutu Produk, kelembagaan dan Regulasi Pro Konsumen	Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan dan penerapan teknologi informasi	Peningkatan kualitas air dan udara melalui pengelolaan sampah dan limbah
		Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri (agroindustri)	Peningkatan pengelolaan arsip pemerintah daerah secara profesional yang didukung dengan teknologi Informasi	Peningkatan Konservasi Daerah Aliran Sungai
		Peningkatan Ketersediaan Pangan yang di dukung oleh Infrastruktur yang berkualitas untuk menjamin kestabilan stok pangan daerah	Peningkatan kualitas layanan pendidikan khusus serta relevansi pendidikan	Peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung serta kesadaran masyarakat peduli hutan
		Peningkatan jumlah destinasi wisata yang berkualitas dan didukung oleh akses infrastruktur	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan pelayanan kesehatan, Sumber daya kesehatan dan kefarmasian	
		Peningkatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia	
		Peningkatan Pengembangan pangsa pasar, kelembagaan dan kemitraan pariwisata	Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten Kota untuk pengendalian pertumbuhan penduduk	

Arah Kebijakan				
2018	2019	2020	2021	2022
		Peningkatan pengembangan bidang usaha dan industri kreatif pariwisata	Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN), dan PMA dengan mendorong kemitraan PMA dan PMDN, serta kebijakan pemanfaatan bahan baku	
		Kemudahan perizinan kelembagaan pembinaan dan pengawasan koperasi, untuk mencapai jumlah Pertumbuhan koperasi aktif dan sehat	Peningkatan pelayanan perizinan melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan	
		Peningkatan tumbuhnya wirausaha kelas menengah baru yang bergerak di sektor Usaha Kecil melalui pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha, serta akses permodalan	Pengembangan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	
		memperluas Cakupan BPJS ketenagakerjaan pada Pekerja sektor formal dan informal	Peningkatan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan pengawasan barang/jasa yang beredar	
			Pengembangan kualitas produk industri kecil	
			Peningkatan Standarisasi, Mutu Produk, kelembagaan dan Regulasi Pro Konsumen	
			Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi	

Arah Kebijakan				
2018	2019	2020	2021	2022
			dan bahan baku industri (agroindustri)	
			Peningkatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui pengelolaan Sumber Daya Kelautan Perikanan (SDKP) yang bertanggung jawab, berdaya saing dan berkelanjutan	
			Peningkatan Ketersediaan Pangan yang di dukung oleh Infrastruktur yang berkualitas untuk menjamin kestabilan stok pangan daerah	
			Peningkatan jumlah destinisasi wisata yang berkualitas dan didukung oleh akses infrastruktur	
			Peningkatan pengembangan bidang usaha dan industri kreatif pariwisata	
			Kemudahan perizinan kelembagaan pembinaan dan pengawasan koperasi, untuk mencapai jumlah Pertumbuhan koperasi aktif dan sehat	
			Kemudahan akses inovasi produk, informasi teknologi dan pembiayaan bagi koperasi aktif	
			Peningkatan tumbuhnya wirausaha kelas menengah baru yang bergerak di sektor Usaha Kecil melalui	

Arah Kebijakan				
2018	2019	2020	2021	2022
			pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha, serta akses permodalan	
			Peningkatan pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan jaminan sosial, serta Penanganan Kelembagaan perawatan dan pengasuhan	
			Penyediaan peraturan, dokumen teknis, pengawasan dan pengendalian jaringan bidang ketenagalistrikan	
			Penyediaan peraturan, dokumen teknis, pengawasan dan pengendalian jaringan bidang geologi dan minerba	
			Peningkatkan Penataan, pembinaan dan pengembangan Desa melalui Penataan dan Pembinaan Desa Adat serta Pembinaan Kelembagaan dan kerjasama desa	
			Penurunan tingkat pengangguran terbuka dengan meningkatkan layanan pencari kerja melalui pelatihan, pemagangan,	

Arah Kebijakan				
2018	2019	2020	2021	2022
			kelembagaan dan akreditasi serta pembinaan produktifitas	
			Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, termasuk norma kerja, serta norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, dan menciptakan hubungan industrial yang kondusif	
			memperluas Cakupan BPJS ketenagakerjaan pada Pekerja sektor formal dan informal	
			Peningkatan kualitas air dan udara melalui pengelolaan sampah dan limbah	
			Peningkatan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan pengawasan barang/jasa yang beredar	

6.2.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BUMD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsinya dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD sebagai institusi mempunyai keunikan tersendiri yang berbeda dengan badan usaha lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Karakteristik BUMD meliputi:

- a. Badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah
- b. Badan usaha dimiliki oleh :
 - 1) 1 (satu) Pemerintah Daerah
 - 2) Lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah
 - 3) 1 (satu) Pemerintah daerah dengan bukan daerah; atau
 - 4) Lebih dari 1 (satu) Pemerintah daerah dengan bukan daerah.
- c. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan
- e. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Selain itu, BUMD memiliki aktivitas operasi yang berbeda dengan badan usaha lainnya. Perbedaan aktivitas tersebut antara lain adalah:

- a. Aktivitasnya diprioritaskan dalam rangka kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
- b. Kegiatan usahanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- c. BUMD terdiri atas perusahaan umum daerah dengan kepala daerah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan perseroan daerah dengan kepala daerah sebagai pemegang saham.
- d. Pengelolaan BUMD memedomani pada dua regulasi yaitu regulasi yang terkait dengan badan usaha sebagai sektor publik dan badan usaha yang berkaitan dengan sektor privat.

Pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dan didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha yang akan dibentuk. Pada saat penyelenggaraan Business Summit Meeting pada tahun 2014 disampaikan bahwa sampai dengan tahun 2014 total BUMD di seluruh Indonesia mencapai 1700 dengan 20% (340) diantaranya dalam kondisi sehat dan memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian Amdanata dan Mansor (2016) menyebutkan bahwa rendahnya kinerja BUMD disebabkan karena banyak BUMD belum menerapkan prinsip Good Corporate Governance.

Salah satu Provinsi yang memiliki Potret keberhasilan dalam pengelolaan BUMD baik dalam pelayanan publik atau pun peningkatan PAD adalah provinsi DKI Jakarta. Jika Dibandingkan dengan provinsi tetangga tersebut, jumlah maupun kualitas BUMD yang dimiliki Provinsi Banten masih tertinggal. Klaster usaha BUMD yang dimiliki provinsi DKI Jakarta meliputi sembilan klaster usaha yakni Transportasi, Properti, Keuangan, Pariwisata, Infrastruktur, Kawasan Industri, Utilitas, Pangan, Perpasaran dan industri lainnya.

Keunggulan komparatif berupa ketersediaan potensi sumber daya alam maupun wilayah yang sangat strategis yang dimiliki Provinsi Banten, diversifikasi BUMD merupakan suatu peluang untuk bisa direalisasikan. Lahirnya regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah memberikan acuan yang lebih jelas agar pengelolaan BUMD menjadi lebih profesional dan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCC) sehingga keberadaannya dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD atau pun pelayanan publik sehingga dapat selaras dengan perwujudan visi misi Gubernur.

6.2.2 ARAH KEBIJAKAN TATA RUANG WILAYAH

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Banten adalah Mewujudkan Ruang Wilayah Banten Sebagai Simpul Penyebaran Primer Nasional-Internasional Yang Strategis, Aman, Nyaman, Produktif Dan Berkelanjutan Melalui Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Yang Mendukung Ketahanan Sumber Daya Alam, Industri, Dan Pariwisata.

Lingkup Wilayah Provinsi Banten merupakan wilayah Daerah seluas 966.292 (sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua) hektar yang terdiri atas :

- a. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) I meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;
- b. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) II meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon; dan
- c. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) III meliputi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Adapun arahan fungsi dan peranan Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) meliputi:

- a. WKP I diarahkan untuk pengembangan kegiatan industri, jasa, perdagangan, pertanian, permukiman atau perumahan, dan pendidikan;
- b. WKP II diarahkan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan, pendidikan, kehutanan, pertanian, industri, pariwisata, jasa, perdagangan, dan pertambangan; dan
- c. WKP III diarahkan untuk pengembangan kegiatan kehutanan, pertanian, pertambangan, pariwisata, kelautan, perikanan, industri, perkebunan dan pendidikan.

Kebijakan Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten meliputi kebijakan pengembangan struktur ruang, kebijakan pengembangan pola ruang, serta kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Banten.

6.2.3 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN STRUKTUR RUANG

1. Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah Provinsi Banten
Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah Provinsi Banten meliputi:
 - a. Peningkatan kualitas fungsi-fungsi pelayanan pada pusat-pusat pelayanan dalam wilayah Provinsi Banten dan lintas kabupaten/kota;
 - b. Peningkatan akses pelayanan pusat-pusat dalam wilayah Provinsi Banten yang merata dan berhierarki, dan peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Provinsi Banten;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air yang merata di seluruh wilayah Provinsi Banten.

2. Strategi Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Banten

Strategi pengembangan struktur ruang wilayah Provinsi Banten meliputi:

- a. Strategi peningkatan kualitas fungsi-fungsi pelayanan pada pusat-pusat pelayanan dalam wilayah Provinsi Banten, meliputi:
 - 1) Mengembangkan dan meningkatkan fasilitas dan sarana yang sesuai dengan fungsi dan hierarki pusat-pusat pelayanan;
 - 2) Mengembangkan fungsi atau kegiatan baru pada pusat-pusat pelayanan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanannya;
 - 3) Mensinergikan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Provinsi Banten dengan sistem pusat pelayanan nasional (PKN dan PKW);
 - 4) Mewujudkan pusat kegiatan wilayah baru yang dipromosikan (PKWp) pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah sebagai upaya sinergitas sistem pelayanan perkotaan nasional dan pengembangan wilayah provinsi dan pengembangan wilayah kabupaten/kota.
- b. Strategi peningkatan akses pelayanan pusat-pusat dalam wilayah Provinsi Banten yang merata dan berhierarki, dan peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Provinsi Banten, meliputi:
 - 1) Meningkatkan keterkaitan antar pusat atau antar kawasan perkotaan, keterkaitan antara pusat atau kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dengan kawasan sekitarnya;
 - 2) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
 - 3) Mengendalikan perkembangan kota atau perkotaan yang terletak di pesisir pantai utara;
 - 4) Mewujudkan kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
 - 5) Mengembangkan pusat penyebaran primer pelabuhan internasional bojonegara yang didukung dengan berfungsinya kawasan-kawasan strategis provinsi dan jaringan jalan cincin Provinsi Banten;

- 6) Mewujudkan jembatan selat sunda sebagai jalur transportasi nasional penghubung jawa – sumatera yang terhubung dengan sistem jaringan jalan nasional lintas utara, tengah, dan selatan pulau jawa di wilayah Provinsi Banten.
- c. Strategi peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air yang merata di seluruh wilayah Provinsi Banten, meliputi:
 - 1) Meningkatkan jaringan prasarana transportasi dan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
 - 2) Meningkatkan jaringan energi listrik dengan pengembangan pembangkit tenaga listrik melalui memanfaatkan sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan secara optimal;
 - 3) Mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan jaringan energi/kelistrikan termasuk jaringan pipa dan kabel dasar laut;
 - 4) Mengembangkan prasarana telekomunikasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah;
 - 5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
 - 6) Mewujudkan sistem jaringan transportasi yang aman melalui perbaikan dan peningkatan infrastruktur, penanganan kawasan banjir di permukiman wilayah Tangerang (Jabodetabekpunjur), pengendalian ruang kawasan Bandara Soekarno Hatta, tertatanya sistem jaringan energi, minyak dan gas alam, pengelolaan panas bumi, dan pemanfaatannya secara aman;
 - 7) Mewujudkan interaksi infrastruktur jaringan transportasi (jalan dan kereta api) di Provinsi Banten yang nyaman sesuai ketentuan teknis, dan terhubung dengan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi/kabupaten/kota dan simpul transportasi antar moda di Kota Cilegon, Tangerang, dan Bandara Panimbang melalui pembangunan jaringan jalan tol;
 - 8) Mewujudkan pemanfaatan kawasan Selat Sunda secara produktif dengan memperhatikan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan.

3. Rencana Struktur Ruang Provinsi Banten

Rencana Struktur Ruang Provinsi Banten meliputi sistem perkotaan, sistem prasarana utama dan sistem prasarana lainnya.

a. Rencana Sistem Perkotaan

Rencana sistem perkotaan di Provinsi Banten didasarkan atas cakupan wilayah pelayanan.

Rencana sistem perkotaan meliputi:

- 1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang terdiri dari :
 - Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur meliputi Kawasan Perkotaan Kabupaten Tangerang, Kawasan Perkotaan Kota Tangerang, dan Kawasan Perkotaan Kota Tangerang Selatan;
 - Kawasan Perkotaan Serang dan Kawasan Perkotaan Kabupaten Serang; dan
 - Kawasan Perkotaan Cilegon.
- 2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang meliputi Kawasan Perkotaan Pandeglang dan Kawasan Perkotaan Rangkasbitung;
- 3) Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) meliputi Kawasan Panimbang, Kawasan Bayah, dan Kawasan Maja; dan
- 4) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Kawasan Labuan, Kawasan Cibaliung, Kawasan Malingping, Kawasan Anyar, Kawasan Baros, Kawasan Ciruas, Kawasan Kronjo, Kawasan Tigaraksa, Kawasan Pagedangan, Kawasan Pontang, Kawasan Cipanas dan Kawasan Cikeuruh Wetan.

b. Rencana sistem prasarana utama

Rencana sistem prasarana utama Provinsi Banten terdiri atas sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi dan sistem jaringan sumber daya air

1) Sistem jaringan transportasi

Sistem jaringan transportasi terdiri dari pengembangan sistem jaringan transportasi darat, pengembangan sistem jaringan transportasi laut dan pengembangan sistem jaringan transportasi udara.

Adapun rencana pengembangan sistem transportasi darat di provinsi Banten adalah

a) Pengembangan jaringan jalan nasional meliputi jaringan jalan arteri primer, kolektor primer dan jalan tol melalui :

(1) Pembangunan dan Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan arteri primer di Daerah meliputi : Jln. Raya Merak (Cilegon), Jln. Raya Cilegon (Cilegon), Jln. Raya Serang (Cilegon), Jln. Raya Cilegon (Serang), Jln. Letnan Jidun (Serang), Jln. Tb. Suwandi (Serang), Jln. Abdul Hadi (Serang), Jln Kh. Abdul Fatah Hasan (Serang), Jln. Sudirman (Serang), Jln. Raya Serang (Tangerang), Jln. Otista (Tangerang), Jln. Ks. Tubun (Tangerang), Jln. Daan Mogot (Tangerang - Bts. DKI)

(2) Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan kolektor primer di Daerah meliputi Jln. Raya Anyer (Cilegon), Pasauran – Labuhan, Jl. A. Yani (Labuhan), Labuhan - Sp. Labuhan, Simp. Labuhan – Saketi, Cigadung – Cipacung Jln. By Pass Rangkasbitung (Jln. Soekarno Hatta Rangkasbitung), Jln. Raya Cipanas (Rangkasbitung), Sp. Labuan – Cibaliung, Cibaliung - Cikeusik - Muara Binuangen, Muara Binuangeun – Simpang, Simpang – Bayah, Bayah - Cibarenok - Bts. Prov. Jabar, Jln. Raya Pandeglang (Serang) Jln. Raya Serang (Pandeglang) Bts.DKI Banten - Gandaria/Bts.Depok/ Tangerang (Ciputat - Bogor), Jln. Rambutan (Ciputat), Jln. Otista (Ciputat) Jln. Akses Tol Merak, Cikande – Rangkasbitung, Jln. Raya Cikande (Jln. Otto Iskandardinata Rangkasbitung), Cibaliung - Sumur, Citereup - Tanjung Lesung, Serdang - Bojonegara – Merak.

(3) Pembangunan dan Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan dalam kota di Daerah meliputi:

- Jakarta – Tangerang dan Jakarta – Tangerang II Elevated;

- Prof. Dr. Sedyatmo dan Prof. Dr. Sedyatmo Elevated;
 - Pondok Aren – Serpong;
 - Pondok Aren – Ulujami;
 - Serpong – Balaraja;
 - Semanan – Sunter;
 - Sunter – Rawa Buaya – Batu Ceper;
 - Jakarta Outer Ring Road II yang meliputi Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran, Kunciran – Serpong, Serpong - Cinere
 - Bojong Gede – Balaraja.
- (4) Pembangunan dan Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan antar kota di daerah meliputi:
- Tangerang – Merak;
 - Cilegon – Bojonegara;
 - Serang – Panimbang;
 - Semanan – Rajeg – Balaraja; dan
 - Kamal – Teluk Naga – Rajeg.
- (5) Rencana Pengembangan jalan nasional Bayah – Cibarenok – Batas Provinsi Jawa Barat, Teluknaga – Bandara Soekarno Hatta, Serang – Pandeglang, Pangarangan – Bayah – batas Provinsi Jawa Barat, Simpang 3 (tiga) Cilegon, Simpang 3 (tiga) Labuan, Simpang 3 (tiga) Tarogong;; Merak – Suralaya – Pulo Ampel Bojonegara – Cilegon, Tangerang – Bandara Soekarno Hatta, Labuan – Saketi – Pandeglang – Rangkasbitung – Cipanas – batas Provinsi Jawa Barat.
- (6) Rencana Pembangunan jalan nasional Cikande - Rangkasbitung, Jalan Cikande – Serang – Cilegon, Cipanas - Warung banten- Bayah, Jalan Tanjung Lesung - Sumur dan jalan lintas selatan Banten
- (7) Pengawasan dan pengendalian jalan nasional berupa jembatan timbang berlokasi di:
- Cikande Kabupaten Serang; dan
 - Cimanuk Kabupaten Pandeglang.

- (8) Rencana Pengembangan sistem jaringan transportasi angkutan massal cepat terpadu berbasis jalan di seluruh Wilayah Provinsi Banten;
 - (9) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi angkutan massal berbasis jalan dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta, dan
 - (10) Rencana pembangunan jalan prospektif di wilayah Provinsi Banten
- b) Pengembangan jaringan jalan provinsi meliputi:
- (1) Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan provinsi meliputi : Pakupatan – Palima, Palima - Pasar Teneng, Ciruas - Petir - Wr.Gunung, Lopang - Banten Lama, Jl. Akses Pelabuhan Karang Hantu, Jl. Trip Jamaksari, Jl. Ayip Usman, Jl. A. Yani (Serang), Jl. Veteran, Jl. KH. Syam'un, Jl. Mayor Safei (Serang), Jl. Raya Cilegon (Serang), Jl. TB. A Katib (Serang), Jl. Yusuf Martadilaga (Serang), Sempu - Dukuh Kawung, Simpang Taktakan - Gn. Sari, Gn. Sari - Mancak – Anyer, Kramatwatu – Tonjong, Ciruas – Pontang, Parigi – Sukamanah, Ciomas – Mandalawangi, Jalan Yasin Beji, Jalan Raya Industri, Terate - Banten Lama, Banten Lama – Pontang, Pontang – Kronjo, Kronjo – Mauk, Mauk - Teluk Naga, Teluk Naga – Dadap, Citeras – Tigaraksa, Tigaraksa – Malangnengah, Sp.Bitung – Curug, Curug - Legok - Parung Panjang, Cisauk – Jaha, Jl.Beringin Raya, Jl. Raya By Pass Tangerang (Jl. Sudirman), Jl. M.H. Thamrin Kota Tangerang, Jl. Raden Fatah (Ciledug), Jl.Raya Cipondoh (Jl. Hasyim Ashari), Jl.Raya Ciledug (Jl. Hos Cokroaminoto), Jl. Serpong Raya, Jl. Pahlawan Seribu, Jl. Serpong Parung, Jl. Aria Putra (Ciputat), Jl. Raya Jombang., Jl. Otto Iskandardinata (Ciputat), Jl. H. Usman (Ciputat), Jl. Pajajaran (Ciputat), Jl. Siliwangi, Jl. Puspitek Raya, Jl. Surya Kencana - Simpang Dr. Setiabudi, Jl. Cabe Raya - Cireundeu Raya, Jl.

Serang - Pandeglang (Pandeglang), Jl. A. Yani (Pandeglang), Jl. Tb. Asnawi (Pandeglang), Jl. Abdul Rahim (Pandeglang), Jl. Raya Labuan (Pandeglang), Jl. Widagdo (Pandeglang), Jl. Pandeglang - Rangkasbitung (Pandeglang), Tanjung Lesung - Sumur, Mengger-Mandalawangi-Caringin, Saketi - Ciandur, Picung - Munjul, Munjul - Panimbang, Cisekeut - Sobang - Tela, Munjul-Cikaludan-Cikeusik, Jl. Sudirman (Labuan), Jl. Desa Teluk (Akses PPP Labuan), Maja - Koleang, Saketi - Malingping - Simpang, Cipanas - Warung Banten, Bayah - Cikotok, Cikotok - Bts Jabar, Gunung Madur - Pulau Manuk, Jl. A. Yani (Rangkasbitung), Jl. Sunan Kalijaga (Rangkasbitung), Sp. Gading Serpong - Serenade - Kebon Nanas.

- (2) Rencana pembangunan jalan dari Gerbang Tol Serang Timur - Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten;
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi angkutan massal berbasis jalan dari dan menuju Bandara Udara Soekarno Hatta;
- (4) Rencana pembangunan sistem jaringan transportasi angkutan massal cepat terpadu berbasis jalan di seluruh wilayah Provinsi Banten;
- (5) Jaringan jalan provinsi merupakan jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan antara PKN dengan PKW dan antar PKW;
- (6) Rencana pembangunan akses tol/interchange, jalan lingkar, simpang sebidang, underpass, flyover, frontage yang berada di jalan kewenangan provinsi diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.; dan
- (7) Pembangunan, peningkatan dan penetapan status untuk menjadi jalan provinsi diatur sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

c) Pengembangan terminal

(1) Dukungan untuk Pengembangan terminal penumpang tipe A dalam wilayah provinsi meliputi: Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan terminal penumpang tipe A meliputi:

- Terminal Merak yaitu Kawasan Terminal Terpadu Merak - Kota Cilegon;
- Terminal Pakupatan di Kota Serang;
- Terminal Poris Plawad di Kota Tangerang;
- Terminal Kadubanen di Kabupaten Pandeglang;
- Terminal Kadu Agung Mandala/Mandala di Kabupaten Lebak;
- Terminal Balaraja di Kabupaten Tangerang;
- Terminal Pondok Cabe di Kota Tangerang Selatan;
- Terminal Labuan di Kabupaten Pandeglang; dan
- Terminal Malingping di Kabupaten Lebak.

(2) Rencana pembangunan terminal penumpang tipe A, meliputi:

- Terminal Cikande di Kabupaten Serang; dan
- Terminal Cikupa di Kabupaten Tangerang.

Pengembangan terminal penumpang tipe B untuk melayani angkutan antar kota dalam provinsi meliputi:

- Terminal Pasar Badak Pandeglang di Kabupaten Pandeglang;
- Terminal Bayah di Kabupaten Lebak;
- Terminal Ciputat di Kota Tangerang Selatan;
- Terminal Cadas, Jatiuwung di Kota Tangerang;
- Terminal Ciledug di Kota Tangerang;
- Terminal Cibeber/Seruni di Kota Cilegon; dan
- Terminal Tanara di Kabupaten Serang.

(3) Rencana pembangunan terminal tipe B di Palima Kota Serang;

d) Pengembangan jaringan kereta api

Dukungan Pengembangan jaringan kereta api terdiri dari jaringan jalur kereta api umum, jaringan jalur kereta api khusus, serta stasiun kereta api. Pengembangan jaringan kereta api di Provinsi Banten meliputi:

- (1) Pengembangan jaringan prasarana kereta api yang menghubungkan kawasan-kawasan industri, simpul-simpul transportasi utama yaitu pembangunan jaringan prasarana baru pada lintas:
 - Tonjong Baru – Pelabuhan Bojonegara;
 - Serpong – Tangerang – Bandara Soekarno Hatta;
 - Serang – Cikande – Cikupa – Serpong;
 - Manggarai – Bandara Soekarno Hatta;
 - Bandara Soekarno Hatta – Pluit – Kota; dan
 - Rencana pembangunan jalur kereta api Bojonegara – Pantura – Tanjung Priuk;
- (2) Pembangunan jaringan prasarana kereta api baru pada Lintas Parung Panjang – Serpong – Citayam – Nambo – Cikarang; Lintas Serang – sepadan tol – Balaraja, Lintas Balaraja – Jakarta – Cikarang;
- (3) Pengembangan angkutan perkotaan terutama pada Lintas Tangerang – Duri, dan Lintas Merak – Cilegon – Serang – Rangkasbitung – Serpong – Tanah Abang;
- (4) Pengembangan jalur ganda kereta api Jakarta – Kota Tangerang;
- (5) Pengembangan trayek kereta api khusus lintas Tanah Abang – Cilegon, Tanah Abang – Cigading dan jaringan jalur kereta api khusus pada kawasan industri;
- (6) Pengembangan stasiun kereta api terpadu pada kawasan Terminal Merak, kawasan Bojonegara, kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Kawasan

Bandar Udara Banten Selatan, dan Kawasan Bumi Serpong Damai;

- (7) Pembangunan jalur ganda dan elektrifikasi antara Maja – Rangkasbitung – Merak;
- (8) Pembangunan lintas baru Cilegon – Anyer Kidul – Labuan – Panimbang;
- (9) Pembangunan infrastruktur kereta api dalam kota yaitu Kereta Api Exprss SHIA jalur Soekarno Hatta-Sudirman;
- (10) Peningkatan akses jaringan prasarana dan pelayanan di kawasan perkotaan jalur kereta api lintas Cilegon – Serang – Pandeglang – Rangkasbitung;
- (11) Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan prasarana kereta api pada lintas Merak – Cilegon – Serang – Tangerang – Jakarta;
- (12) Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan prasarana kereta api yang padat melayani transportasi perkotaan antara lain pada lintas Rangkasbitung – Serpong – Tanah Abang, dan Lintas Tangerang – Duri;
- (13) Peningkatan aspek keselamatan transportasi kereta api dengan pengembangan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan terutama perlintasan sebidang pada ruas jalan provinsi yang kepadatan lalu lintas kendaraannya tinggi;
- (14) Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana untuk Stasiun Merak di Kota Cilegon, Stasiun Krenceng, di Kota Cilegon, Stasiun Serang di Kota Serang, Stasiun Rangkasbitung di Kabupaten Lebak, Stasiun Pasar Anyar di Kota Tangerang, Stasiun Serpong di Kota Tangerang Selatan dan Stasiun Maja di Kabupaten Lebak;
- (15) Rencana pengembangan dan pembangunan stasiun kereta api diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- (16) Pengaktifan kembali jalur kereta api lintas Ciwandan – Anyer Kidul, Rangkasbitung – Saketi – Labuan, Saketi – Malingping – Bayah;
 - (17) Perbaikan jaringan kereta api Rangkasbitung – Saketi – Malingping – Bayah dan jaringan kereta api Saketi – Labuan;
 - (18) Rencana Pengembangan Jalur KA lintasan Panimbang – Cibaliung – Malingping;
 - (19) Rencana pembangunan jalur KA Merak – Bandara Soekarno Hatta;
 - (20) Rencana pembangunan Dryport di Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang;
 - (21) Pengembangan angkutan massal terpadu berbasis rel Cilegon – Serang – Pandeglang – Rangkasbitung dan Jalur MRT lintas Batuceper-Serpong;
 - (22) Pembangunan angkutan massal cepat terpadu berbasis rel dari wilayah timur ke wilayah barat yaitu Cikarang – Jakarta – Balaraja – Serang;
 - (23) Pengembangan transportasi cepat terpadu berbasis rel di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan;
 - (24) Rencana pembangunan Transit Oriented Development /TOD di seluruh Provinsi Banten;
 - (25) Rencana pengembangan angkutan massal berbasis rel dari dan menuju Bandara Udara Soekarno Hatta; dan
 - (26) Rencana pembangunan sistem transportasi massal berbasis rel di seluruh Provinsi Banten.
- e) Pengembangan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
- Pengembangan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan di Provinsi Banten meliputi :
- (1) Rencana pengembangan pelayanan angkutan penyeberangan yang melayani pulau-pulau berpenghuni, yaitu:

- Cituis – Kepulauan Seribu, Tanjungkait – Kepulauan Seribu, Tanjungpasir – Kepulauan Seribu, Dadap – Kepulauan Seribu;
 - Karangantu – Pulau Tunda, Grenjang – Pulau Panjang;
 - Sumur – Pulau Panaitan, Muarabinuangeun – Pulau Deli;
 - Labuan – Pulau Sangiang; dan
 - Merak – Kepulauan Anak Gunung Krakatau.
- (2) Rencana Pembangunan/Pengembangan Dermaga Penyeberangan Merak;
 - (3) Rencana Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Merak sebagai Pelabuhan Kelas I;
 - (4) Rencana pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Margagiri sebagai Pelabuhan Kelas I;
 - (5) Rencana Pengembangan angkutan sungai pada sungai-sungai yang berpotensi dan memenuhi persyaratan;
 - (6) Rencana Pengembangan angkutan danau/waduk pada danau/waduk yang berpotensi dan memenuhi persyaratan;
 - (7) Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - (8) Rencana pengembangan angkutan perintis pada daerah terpencil dan atau terisolir
 - (9) Rencana Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau sebagai Pelabuhan Pengumpan yang meliputi : Pelabuhan Panimbang, Bojongmanik, Pontang, Tirtayasa, Carenang, Kragilan, Cikande, Kasemen, Cihara, Pakuhaji dan Sepatan.
- f) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut
- Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut di Provinsi Banten meliputi:

- (1) Rencana Pengembangan Pelabuhan Utama Banten/Ciwandan di Kota Cilegon;
- (2) Rencana Pengembangan dan pembangunan Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul dan Pelabuhan Peti Kemas Bojonegara di Kabupaten Serang;
- (3) Rencana Pengembangan Pelabuhan Merak Mas untuk dikembangkan menjadi pelabuhan utama;
- (4) Rencana Pengembangan Pelabuhan Pengumpul yaitu Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Warnasari di Kota Cilegon;
- (5) Rencana Pengembangan Pelabuhan Karangantu sebagai Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pelabuhan Pengumpul;
- (6) Rencana Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional yaitu Pelabuhan Anyer Lor dan Pelabuhan Labuan.
- (7) Rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Lokal antara lain Pelabuhan Bayah, Muarabinuangeun, Panimbang, Genyang-Puloampel, Pasauran, Pulopanjang-Puloampel, Tanjung Leneng, Terate, Pulotunda-Tirtayasa, Lontar-Pontang, Muara Dadap;
- (8) Rencana Pengembangan Lokasi Wilayah Kerja Pelabuhan Pengumpan Lokal di Cituis dan Kresek/Kronjo;
- (9) Rencana pengembangan Pelabuhan Cigading sebagai Terminal Umum Multipurpose KBS Cigading dan sebagai pelabuhan pengumpul di Kota Cilegon;
- (10) Rencana Pengembangan terminal khusus di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang untuk mendukung potensi industri, pariwisata, pertanian, dan pertambangan;

- (11) Rencana Pengembangan pelayanan sarana dan prasarana pelabuhan laut dan penyeberangan perintis yang melayani pulau-pulau kecil dan terisolir;
 - (12) Rencana pembangunan pelabuhan regional multifungsi di Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak dan Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang.
- 2) Rencana pengembangan sistem jaringan energi
- Rencana pengembangan sistem jaringan energi di Provinsi Banten meliputi :
- a) Rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik;
- (1) Rencana Pengembangan dan Pembangunan PLTU meliputi :
 - PLTU Labuan 1-2 di Kabupaten Pandeglang
 - PLTU Suralaya 1-8 di Kota Cilegon
 - PLTU Lontar 1-3 di Kabupaten Tangerang
 - PLTU Banten di Kabupaten Serang
 - PLTU Jawa-7 di Kramatwatu Kabupaten Serang
 - PLTU Lontar 4 di Kabupaten Tangerang
 - PLTU Jawa 9 di Kabupaten Serang
 - PLTU Jawa 6 atau indikasi lokasi di PLTU Suralaya 9,10
 - PLTU Jawa-5 di Kabupaten Tangerang.
 - (2) Rencana Pengembangan PLTM meliputi:
 - PLTM Cikotok di Kabupaten Lebak
 - PLTM Bojong Cisono di Kabupaten Lebak
 - PLTM Bulakan di Kabupaten Serang
 - PLTM Cisimeut di Kabupaten Lebak
 - PLTM Cidanau di Kabupaten Serang
 - PLTM Cikidang di Kabupaten Lebak
 - PLTM Cisungsang II di Kabupaten Lebak
 - PLTM Karang Ropong (Cibareno 1) di Kabupaten Lebak
 - PLTM Cibareno di Kabupaten Lebak
 - PLTM Pasundan di Kabupaten Lebak

- PLTM Cisihih Mandiri di Kabupaten Lebak
 - PLTM Cisihih Leutik di Kabupaten Lebak
 - PLTM Nagajaya di Kabupaten Lebak
- (3) Rencana Pengembangan PLTB meliputi :
- PLTB Pandeglang di Kabupaten Pandeglang
 - PLTB Lebak di kabupaten Lebak
- (4) Rencana Pengembangan PLTGU meliputi :
- PLTGU/MG Jawa-Bali 3 di Kabupaten Serang
 - PLTGU Jawa-4 Bojonegara di Kabupaten Serang
 - PLTGU Cilegon di Kota Cilegon
- (5) Rencana Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dalam melayani kebutuhan listrik bagi masyarakat di daerah terpencil di PLTD Pulau Panjang dan PLTD Pulau Tunda;
- (6) Rencana Pengembangan PLTP Rawa Danau di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang dan PLTP di G. Endut Kabupaten Lebak;
- (7) Rencana pengembangan Energi Baru Terbarukan/EBT berupa Energi Hidro dan Biomassa di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak.
- (8) Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di wilayah Provinsi Banten
- (9) Rencana pembangunan tenaga listrik tenaga matahari di seluruh wilayah Provinsi Banten; dan
- (10) Rencana pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik lainnya diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b) Rencana pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi meliputi rencana pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Provinsi Banten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c) Rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik
- d) Rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik di Provinsi Banten meliputi :
 - (1) Rencana pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - (2) Rencana pengembangan sistem distribusi jaringan tegangan rendah;
 - (3) Rencana pengembangan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi; dan
 - (4) Rencana pengembangan Transmisi Interkoneksi Sumatera-Jawa.
- 3) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi

Arahan rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi di Provinsi Banten, yaitu pengembangan sistem jaringan telekomunikasi hingga mencapai pelosok wilayah, yang meliputi:

 - Rencana Pembangunan serat optik antar kabupaten/kota; dan
 - Rencana Pengembangan transmisi penyiaran
 - Selain rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi juga dilakukan pengendalian pembangunan menara *Base Transceiver Station* untuk keterpaduan penggunaan tower bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air

Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air di Provinsi Banten diarahkan untuk mendukung air baku dengan mengoptimalkan peruntukan sumber air permukaan dan sumber air tanah.

 - a) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air di Provinsi Banten, meliputi:
 - (1) Rencana pembangunan Bendungan Karian di Kabupaten Lebak;

- (2) Rencana pembangunan Bendungan Sindangheula di Kabupaten Serang dan Kota Serang;
- (3) Rencana pengembangan Bendungan Cidanau di Kabupaten Serang;
- (4) Rencana pengembangan Bendungan Pasir Kopo di Kabupaten Pandeglang;
- (5) Rencana pengembangan Bendung Ciliman di Kabupaten Pandeglang;
- (6) Rencana pengembangan Bendung Cibaliung di Kabupaten Pandeglang;
- (7) Rencana pengembangan Bendung Pamarayan di Kabupaten Serang;
- (8) Rencana pengembangan Bendung Ranca Sumur di Kabupaten Tangerang;
- (9) Rencana pengembangan di Kota Tangerang;
- (10) Rencana pengembangan Bendung Cisadane Pintu Sepuluh di Kota Tangerang;
- (11) Rencana pemeliharaan CAT Rawa Danau di Serang-Pandeglang;
- (12) Rencana pemeliharaan CAT Serang-Tangerang;
- (13) Rencana pemeliharaan CAT Labuan di Kabupaten Pandeglang ;
- (14) Rencana pemeliharaan CAT Malingping di Kabupaten Lebak;
- (15) Rencana pemeliharaan CAT Jakarta di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang selatan;
- (16) Rencana pengendalian pemanfaatan ruang situ, waduk, danau, dan rawa yang terdapat di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon dan Kota Serang sebagai kolam penyimpanan;
- (17) Rencana pengembangan Bendungan eks Teluk Lada di Kabupaten Pandeglang

- (18) Rencana pengembangan Bendungan Citeluk di Kabupaten Pandeglang
 - (19) Rencana pengembangan sumber air baku dari aliran sungai di Daerah dengan mempertimbangkan daya dukung sumberdaya air;
 - (20) Rencana pembangunan Saluran Pembawa Air Baku Waduk Karian
 - (21) Rencana pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di wilayah Provinsi Banten; dan
 - (22) Rencana pemanfaatan air laut sebagai sumber air bersih di seluruh wilayah Provinsi Banten.
- b) Rencana pengembangan sistem Irigasi di Provinsi, yaitu :
- (1) Pengelolaan daerah irigasi di Daerah diarahkan untuk kebutuhan pertanian di wilayah Provinsi Banten;
 - (2) Rencana Pembangunan atau peningkatan Jaringan Irigasi yang dilintasi Sungai Cisadane Ciliman dan Cibaliung.
 - (3) Rencana Peningkatan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi jaringan Irigasi Eks Teluk Lada di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.
 - (4) Rehabilitasi Daerah Irigasi yang dilintasi Sungai Ciujung, Cisadane dan Cidurian.
 - (5) Rencana Pembangunan Irigasi yang dilintasi Sungai Ciseuket, Cikaduan, Cipatujah dan Caringin.
- c) Pengelolaan sumberdaya air lintas batas administrasi Daerah dan pemerintah kabupaten, meliputi
- (1) Wilayah sungai lintas provinsi yang meliputi:
 - Cidanau – Ciujung – Cidurian; dan
 - Ciliwung – Cisadane;
 - (2) Wilayah sungai lintas kabupaten yang meliputi:
 - Ciliman – Cibungur; dan
 - Cibaliung – Cisawarna.

d) Rencana sistem prasarana lainnya

1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan ruang untuk, tempat pengolahan sisa hasil produksi yang ramah lingkungan, yang berada di:

- Kabupaten Tangerang untuk melayani WKP I;
- Kabupaten Serang untuk melayani WKP II; dan
- Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak untuk melayani WKP III

Selain penyediaan ruang untuk TPAS dan/atau TPST regional juga mendukung percepatan proyek strategis nasional yaitu pembangunan infrastruktur energi asal sampah di seluruh kabupaten/kota;

2) Rencana pembangunan Pusat Distribusi Regional di Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang dan Kecamatan Petir Kabupaten Serang.

Tabel 6.4
Hasil Telaahaan Struktur Ruang Provinsi Banten

NO	RENCANA STRUKUTUR RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)							
I.1	Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi	a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan b. Program Penataan Ruang c. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman	Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur meliputi : Perkotaan Kota Tangerang, Perkotaan Kota Tangerang Selatan, dan Perkotaan Kabupaten Tangerang	*	*	*	*	*
I.2	Revitalisasi dan Percepatan pengembangan Kota-Kota pusat Pertumbuhan melalui peningkatan fungsi	d. Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan	Kawasan Perkotaan Serang (Kota Serang dan Kabupaten Serang)	*	*	*	*	*
			Kawasan Perkotaan Cilegon	*	*	*	*	*
I.3	Mendorong Pengembangan Kota-Kota sentra produksi	a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan b. Program Penataan Ruang c. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman d. Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan e. Program Pengembangan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen f. Program Peningkatan Kualitas Usaha dan Kelembagaan Koperasi g. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	Kawasan Perkotaan Pandeglang	*	*	*	*	*

NO	RENCANA STRUKUTUR RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
II	Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)							
II.1	Mendorong Pengembangan Kota-Kota sentra produksi	a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan b. Program Penataan Ruang c. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman d. Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan e. Program Pengembangan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen f. Program Peningkatan Kualitas Usaha dan Kelembagaan Koperasi g. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	Kawasan Perkotaan Pandeglang	*	*	*	*	*
			Kawasan Perkotaan Rangkasbitung	*	*	*	*	*
III	Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp)							
III.1	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan b. Program Penataan Ruang c. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman d. Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan e. Program Peningkatan Kualitas Usaha dan Kelembagaan Koperasi	Kawasan Labuan, Kawasan Cibaliung, Kawasan Malingping, Kawasan Anyar, Kawasan Baros, Kawasan Ciruas, Kawasan Kronjo, Kawasan Tigaraksa, Kawasan Pagedangan, Kawasan Pontang, Kawasan Cipanas, dan Kawasan Cikeuruh Wetan	*	*	*	*	*

NO	RENCANA STRUKUTUR RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		f. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil						
IV	Pengembangan jaringan jalan provinsi							

NO	RENCANA STRUKUTUR RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
V.1	Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan provinsi	a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan b. Program Penataan Ruang	Pakupatan – Palima, Palima - Pasang Teneng, Ciruas - Petir - Wr.Gunung, Lopang - Banten Lama, Jl. Akses Pelabuhan Karang Hantu, Jl. Trip Jamaksari, Jl. Ayip Usman, Jl. A. Yani (Serang), Jl. Veteran, Jl. KH. Syam'un, Jl. Mayor Safei (Serang), Jl. Raya Cilegon (Serang), Jl. TB. A Katib (Serang), Jl. Yusuf Martadilaga (Serang), Sempu - Dukuh Kawung, Simpang Taktakan - Gn. Sari, Gn. Sari - Mancak – Anyer, Kramatwatu – Tonjong, Ciruas – Pontang, Parigi – Sukamanah, Ciomas – Mandalawangi, Jalan Yasin Beji, Jalan Raya Industri, Terate - Banten Lama, Banten Lama – Pontang, Pontang – Kronjo, Kronjo – Mauk, Mauk - Teluk Naga, Teluk Naga – Dadap, Citeras – Tigaraksa, Tigaraksa – Malangnengah, Sp.Bitung – Curug, Curug - Legok - Parung Panjang, Cisauk – Jaha, Jl.Beringin Raya, Jl. Raya By Pass Tangerang (Jl. Sudirman), Jl. M.H. Thamrin Kota Tangerang, Jl. Raden Fatah (Ciledug), Jl.Raya Cipondoh (Jl. Hasyim Ashari), Jl.Raya Ciledug (Jl. Hos Cokroaminoto), Jl. Serpong Raya, Jl. Pahlawan Seribu, Jl. Serpong Parung, Jl. Aria Putra (Ciputat), Jl. Raya Jombang., Jl. Otto Iskandardinata (Ciputat), Jl. H. Usman (Ciputat), Jl.	*	*	*	*	*

NO	RENCANA STRUKUTUR RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Pajajaran (Ciputat), Jl. Siliwangi, Jl. Puspitek Raya, Jl. Surya Kencana - Simpang Dr. Setiabudi, Jl. Cabe Raya - Cireunde Raya, Jl. Serang - Pandeglang (Pandeglang), Jl. A. Yani (Pandeglang), Jl. Tb. Asnawi (Pandeglang), Jl. Abdul Rahim (Pandeglang), Jl. Raya Labuan (Pandeglang), Jl. Widagdo (Pandeglang), Jl. Pandeglang - Rangkasbitung (Pandeglang), Tanjung Lesung – Sumur, Mengger-Mandalawangi-Caringin, Saketi – Ciandur, Picung – Munjul, Munjul - Panimbang, Cisekeut - Sobang – Tela, Munjul-Cikaludan-Cikeusik, Jl. Sudirman (Labuan), Jl. Desa Teluk (Akses PPP Labuan), Maja – Koleang, Saketi - Malingping - Simpang , Cipanas - Warung Banten, Bayah – Cikotok, Cikotok - Bts Jabar, Gunung Madur - Pulau Manuk, Jl. A. Yani (Rangkasbitung), Jl. Sunan Kalijaga (Rangkasbitung), Sp. Gading Serpong - Serenade - Kebon Nanas					

NO	RENCANA STRUKUTUR RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IV.2	Rencana pembangunan jalan dari Gerbang Tol Serang Timur – Kawasan Pusat Pemerintahan		Kota Serang	*	*	*	*	*
IV.3	Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi angkutan massal berbasis jalan dari dan menuju Bandara Udara Soekarno Hatta	Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan	Provinsi Banten			*	*	*
IV.4	Rencana pembangunan sistem jaringan transportasi angkutan massal cepat terpadu berbasis jalan di seluruh wilayah Provinsi Banten		Provinsi Banten			*	*	*
IV.5	Jaringan jalan provinsi merupakan jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan antara PKN dengan PKW dan antar PKW	a. Program Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur b. Program Penataan Ruang	Provinsi Banten	*	*	*	*	
IV.6	Rencana pembangunan akses tol/interchange, jalan lingkar, simpang sebidang, underpass, flyover, frontage yang berada di jalan kewenangan provinsi		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
IV.7	Pembangunan, peningkatan dan penetapan status untuk menjadi jalan provinsi		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
V	Pengembangan terminal							
V.1	Pengembangan terminal penumpang tipe B untuk melayani angkutan antar kota dalam provinsi dan angkutan kota/pedesaan		Terminal Pasar Badak Pandeglang di Kabupaten Pandeglang, Terminal Bayah di Kabupaten Lebak, Terminal Ciputat di Kota Tangerang Selatan, Terminal Cadas, Jatiuwung di Kota Tangerang, Terminal				*	*

NO	RENCANA STRUKUTUR RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Ciledug di Kota Tangerang, Terminal Cibeber/Seruni di Kota Cilegon, Terminal Tanara di Kabupaten Serang					
V.2	Rencana pembangunan terminal tipe B		Palima Kota Serang				*	*
V.3	Rencana pembangunan terminal Pusat Distribusi Provinsi/Regional	a. Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan b. Program Pengembangan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen	Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang dan Kecamatan Petir Kabupaten Serang	*	*	*	*	*
VI	Pengembangan jaringan kereta api							
VI.1	Pembangunan jalur ganda dan elektrifikasi		Maja – Rangkasbitung – Merak		*	*	*	*
VI.2	Pembangunan lintas baru		Cilegon – Anyer Kidul – Labuan – Panimbang		*	*	*	*
VI.3	Pembangunan infrastruktur kereta api dalam kota		Kereta Api Express SHIA jalur Soekarno Hatta – Sudirman		*	*	*	*
VI.4	Peningkatan akses jaringan prasarana dan pelayanan di kawasan perkotaan jalur kereta api		Cilegon – Serang – Pandeglang – Rangkasbitung		*	*	*	*
VI.5	Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan prasarana kereta api		Merak – Cilegon – Serang – Tangerang – Jakarta		*	*	*	*
VI.6	Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan prasarana kereta api yang padat melayani transportasi perkotaan		Rangkasbitung – Serpong – Tanah Abang, dan Lintas Tangerang – Duri		*	*	*	*

NO	RENCANA STRUKUTUR RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
VI.7	Rencana pengembangan dan pembangunan stasiun kereta api		Provinsi Banten		*	*	*	*
VI.8	Pengaktifan kembali jalur kereta api		Ciwandan – Anyer Kidul, Rangkasbitung – Saketi – Labuan, Saketi – Malingping – Bayah		*	*	*	*
VI.9	Perbaikan jaringan kereta api		Rangkasbitung – Saketi – Malingping – Bayah dan jaringan kereta api Saketi – Labuan		*	*	*	*
VI.10	Rencana Pengembangan Jalur KA		Panimbang – Cibaliung – Malingping		*	*	*	*
VI.11	Rencana pembangunan jalur KA		Merak – Bandara Soekarno Hatta		*	*	*	*
VI.12	Pengembangan angkutan massal cepat terpadu berbasis rel		Cilegon – Serang – Pandeglang – Rangkasbitung dan Jalur MRT lintas Batuceper-Serpong		*	*	*	*
VI.13	Pembangunan angkutan massal cepat terpadu berbasis rel dari wilayah timur ke wilayah barat		Cikarang – Jakarta – Balaraja – Serang		*	*	*	*
VI.14	Pengembangan transportasi cepat terpadu berbasis rel		Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan		*	*	*	*
VI.15	Rencana pembangunan Transit Oriented Development /TOD		Provinsi Banten		*	*	*	*
VI.16	Rencana pembangunan sistem transportasi massal berbasis rel		Provinsi Banten		*	*	*	*
VII	Pengembangan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan							

NO	RENCANA STRUKUTUR RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
VII.1	Rencana Pengembangan angkutan sungai pada sungai-sungai yang berpotensi dan memenuhi persyaratan		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
VII.2	Rencana Pengembangan angkutan danau/waduk pada danau/waduk yang berpotensi dan memenuhi persyaratan		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
VII.3	Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang angkutan sungai, danau dan penyeberangan		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
VII.4	Rencana pengembangan angkutan perintis pada daerah terpencil dan atau terisolir		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
VII.5	Rencana Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau sebagai Pelabuhan Pengumpan		Pelabuhan Panimbang, Bojongmanik, Pontang, Tirtayasa, Carenang, Kragilan, Cikande, Kasemen, Cihara, Pakuhaji dan Sepatan	*	*	*	*	*
VIII	Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut							
VIII.1	Rencana Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pelabuhan Pengumpul		Pelabuhan Karangantu	*	*	*	*	*
VIII.2	Rencana Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional		Pelabuhan Anyer Lor, dan Pelabuhan Labuan	*	*	*	*	*
VIII.3	Rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Lokal		Pelabuhan Bayah, Muarabinuangeun, Panimbang, Genyang-Puloampel, Pasauran, Pulopanjang-Puloampel, Tanjung Leneng, Terate, Pulotunda-Tirtayasa, Lontar-Pontang, Muara Dadap	*	*	*	*	*

NO	RENCANA STRUKUTUR RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
VIII.4	Rencana Pengembangan Lokasi Wilayah Kerja Pelabuhan Pengumpan Lokal		Cituis dan Kresek/Kronjo	*	*	*	*	*
VIII.5	Rencana Pengembangan terminal khusus untuk mendukung potensi industri, pariwisata, pertanian, dan pertambangan	a. Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan b. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pengelolaan Sumberdaya Laut	Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang	*	*	*	*	*
VIII.6	Rencana Pengembangan pelayanan sarana dan prasarana pelabuhan laut dan penyeberangan perintis yang melayani pulau-pulau kecil dan terisolir		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
VIII.7	Rencana pembangunan pelabuhan regional multifungsi	Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan	Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak dan Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang	*	*	*	*	*
IX	Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi udara							
IX.1	Peningkatan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
IX.2	Rencana pembangunan Bandara Udara		Panggarangan/Cihara dan Maja di Kabupaten Lebak	*	*	*	*	*
X	Rencana pengembangan sistem jaringan energi							
X.1	Rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik PLTU, PLTM, PLTGU, PLTD, PLTP, EBT, PLTSa dan PLTS	Program Pengembangan, Pengelolaan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
X.2	Rencana pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi							

NO	RENCANA STRUKUTUR RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
X.3	Rencana pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga	Program Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan geologi, air tanah, mineral dan batubara	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XI	Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi							
XI.1	Pembangunan serat optik antar kabupaten/kota	Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik	Provinsi Banten					
XI.2	Pengembangan transmisi penyiaran		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XI.3	Pengembangan , pengendalian dan pembangunan menara Base Transceiver Station untuk keterpaduan penggunaan tower bersama		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XII	Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air							
XII.1	Rencana pengembangan dan Pembangunan sistem jaringan sumber daya air Bendungan, CAT, Situ, Waduk, Danau, Rawa dan Kolam Penyimpanan	a. Program Keciaptakaryaan b. Program Penataan Ruang	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XII.2	Peningkatan Dan Pemeliharaan Pengelolaan Daerah Irigasi (DI)		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XII.3	Pembangunan atau peningkatan jaringan Irigasi		Provinsi Banten	*	*	*		
XII.4	Peningkatan dan Pemeliharaan Rehabilitasi jaringan Irigasi Eks Teluk Lada		Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	*	*	*	*	*
XII.5	Rehabilitasi Daerah Irigasi		Ciujung, Cisadane, Cidurian	*	*	*	*	*

NO	RENCANA STRUKUTUR RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
XII.6	Pembangunan Irigasi		Ciseukeut, Cikaduan, Cipatujah, Caringin	*	*	*	*	*
XII.7	Pengelolaan Wilayah Sungai		WS Cidanau – Ciujung – Cidurian, WS Ciliwung – Cisadane, WS Ciliman – Cibungur, WS Cibaliung – Cisawarna	*	*	*	*	*
XIII	Perencanaan Dan Pembangunan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya							
XIII.1	Pengembangan TPST Regional	a. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman b. Program Penataan Ruang	Kabupaten Tangerang untuk melayani WKP I, Kabupaten Serang untuk melayani WKP II, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak untuk melayani WKP III	*	*	*	*	*
XIII.2	Pembangunan infrastruktur energi asal sampah		di seluruh kabupaten/kota		*	*	*	*

6.2.4 Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Pola Ruang

Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah Provinsi Banten terdiri dari kebijakan pengembangan kawasan lindung dan kebijakan pengembangan kawasan budidaya.

1. Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah Provinsi Banten
 - a. Kebijakan pengembangan kawasan lindung meliputi:
 - 1) Peningkatan kualitas kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi perlindungannya;
 - 2) Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup;
 - 3) Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
 - 4) Perwujudan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang.
 - b. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya meliputi:
 - 1) Peningkatan produktivitas kawasan budidaya;
 - 2) Optimalisasi potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
 - 3) Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
 - 4) Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
2. Strategi pengembangan pola ruang wilayah Provinsi Banten
 - a. Strategi pengembangan kawasan lindung
 - 1) Strategi pengembangan kawasan lindung berupa *peningkatan kualitas kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi perlindungannya* meliputi:
 - a) Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - b) Meningkatkan kualitas kawasan hutan yang berfungsi sebagai kawasan lindung, yaitu kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi;

- c) Mengendalikan bentuk-bentuk kegiatan yang berada di dalam kawasan lindung yang tidak sesuai dengan fungsi perlindungan dan/atau dapat merusak fungsi perlindungan kawasan lindung.
 - d) Mewujudkan kawasan lahan pangan berkelanjutan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung;
 - e) Mewujudkan kawasan taman nasional dan kawasan lindung khususnya di wilayah banten selatan yang memberi manfaat kepada masyarakat sekitarnya dan mendukung pengembangan lingkungan hidup nasional dan internasional dalam rangka pengendalian perubahan iklim.
- 2) Strategi pengembangan kawasan lindung berupa *pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup* meliputi:
- a) Menetapkan kawasan lindung dan/atau fungsi perlindungan di ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
 - b) Menetapkan proporsi luas kawasan berfungsi lindung dalam wilayah Provinsi Banten paling sedikit 30% dari luas wilayah.
- 3) Strategi pengembangan kawasan lindung berupa *pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup*, meliputi:
- a) Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - b) Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c) Meningkatkan kemampuan daya tampung lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang dibuang ke dalamnya;
 - d) Mengendalikan terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;

- e) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - f) Mewujudkan sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
 - g) Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.
- 4) Strategi pengembangan kawasan lindung berupa *Perwujudan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang*, meliputi:
- a) Mengelola sempadan sungai untuk menjamin tidak terjadinya kerusakan pada pinggiran sungai dan tidak terganggunya aliran sungai dan beban di kawasan sekitarnya;
 - b) Mengamankan, memelihara, dan mengembangkan hutan mangrove sebagai pengamanan terhadap abrasi dan erosi pantai;
 - c) Mempertahankan kawasan cagar alam, kawasan hutan lindung, taman nasional, kawasan konservasi laut bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan keberlanjutan; dan
 - d) Meningkatkan fungsi perlindungan kawasan setempat dan kawasan perlindungan bawahnya.
- b. Strategi pengembangan kawasan budidaya
- 1) Strategi pengembangan kawasan budidaya berupa *peningkatan produktivitas kawasan budidaya*, meliputi:
- a) Memanfaatkan lahan yang tidak atau kurang produktif yang berada di luar kawasan lindung menjadi kawasan budidaya sesuai dengan sifat dan kondisi lahannya;
 - b) Meningkatkan produktivitas kawasan budidaya pertanian dengan usaha-usaha intensifikasi dan diversifikasi pertanian;

- c) Mewujudkan kawasan budidaya melalui pengembangan hutan produksi, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya secara produktif melalui pemberdayaan masyarakat di perkotaan dan perdesaan.
- 2) Strategi pengembangan kawasan budidaya berupa *Optimalisasi potensi sumberdaya alam dalam mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah dengan keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan*, meliputi:
- a) Meningkatkan aksesibilitas pengembangan ekonomi di kawasan budidaya wilayah tertinggal
 - b) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pusat kegiatan lokal perkotaan dan perdesaan
 - c) Meningkatkan produktivitas dan komoditas unggulan serta pengembangan keterkaitan hulu dan hilir.
- 3) Strategi pengembangan kawasan budidaya berupa *perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya*, meliputi:
- a) Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan budidaya beserta prasarana pendukungnya secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya dengan mengalokasikan ruang dan akses masyarakat;
 - b) Mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c) Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan dalam mendukung perwujudan ketahanan sumberdaya alam;
 - d) Mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi;

- e) Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di wilayah laut kewenangan Provinsi Banten.
- 4) Strategi pengembangan kawasan budidaya berupa *pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan*, meliputi:
 - a) Mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya terbangun pada kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - b) Mengembangkan kawasan perkotaan dengan bangunan bertingkat terutama untuk kegiatan-kegiatan dengan fungsi komersial atau bernilai ekonomi tinggi guna penghematan ruang dan memberikan ruang terbuka pada kawasan tersebut;
 - c) Mengembangkan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota;
 - d) Mengendalikan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya.

3. Rencana Pola Ruang Provinsi Banten

a. Pola ruang kawasan lindung

Pola ruang kawasan lindung di Provinsi terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan cagar budaya dan kawasan rawan bencana. Luas Pola ruang kawasan lindung lebih kurang 200.208,45 (dua ratus ribu dua ratus delapan koma empat lima) hektar.

- 1) Kawasan hutan lindung seluas lebih kurang 10.387,29 (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh koma dua sembilan) hektar berada di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Cilegon.

- 2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah berupa kawasan resapan air. Kawasan resapan air berada pada:
 - a) Kabupaten Serang;
 - b) Kabupaten Pandeglang; dan
 - c) Kabupaten Lebak.
- 3) Kawasan perlindungan setempat, meliputi: Sempadan pantai, Sempadan sungai, Kawasan sekitar danau atau waduk, Kawasan sekitar mata air, Kawasan lindung geologi dan RTH Perkotaan.
 - a) Sempadan pantai seluas lebih kurang 3.326,36 (tiga ribu tiga ratus dua puluh enam koma tiga enam) hektar berada di:
 - Kabupaten Serang;
 - Kota Serang;
 - Kabupaten Tangerang;
 - Kabupaten Pandeglang;
 - Kabupaten lebak; dan
 - Kota Cilegon.
 - b) Sempadan sungai seluas lebih kurang 27.504,48 (dua puluh tujuh ribu lima ratus empat koma empat delapan) hektar dan kawasan hutan untuk DAS paling sedikit ditetapkan 30 (tiga puluh) persen meliputi:
 - DAS Ciujung;
 - DAS Cidurian;
 - DAS Cilemer;
 - DAS Ciliman;
 - DAS Cibanten;
 - DAS Cidanau;
 - DAS Cimanceuri;
 - DAS Cisadane;
 - DAS Cibuangeun;
 - DAS Cihara;
 - DAS Cimadur; dan
 - DAS Cibareno.

- c) Kawasan sekitar danau atau waduk seluas lebih kurang 555,59 (lima ratus lima puluh lima koma lima sembilan) hektar berada di:
 - Kabupaten Serang;
 - Kabupaten Tangerang;
 - Kota Tangerang;
 - Kota Tangerang Selatan;
 - Kabupaten Pandeglang;
 - Kabupaten Lebak; dan
 - Kota Cilegon
 - d) Kawasan sekitar mata air yang berada di:
 - Kabupaten Lebak;
 - Kabupaten Pandeglang; dan
 - Kabupaten Serang.
 - e) Kawasan lindung geologi seluas lebih kurang 1.961,49 (seribu sembilan ratus enam puluh satu koma empat sembilan) hektar di Kabupaten Lebak.
 - f) RTH Perkotaan di Provinsi Banten tersebar di kabupaten atau kota
- 4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya meliputi kawasan: Cagar alam, taman nasional, taman hutan raya Banten, taman wisata alam; dan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
- a) Kawasan cagar alam meliputi :
 - Cagar Alam Rawa Danau seluas lebih kurang 3.542,43 (tiga ribu lima ratus empat puluh dua koma empat tiga) hektar yang terdapat di Kabupaten Serang;
 - Cagar Alam Gunung Tukung Gede seluas lebih kurang 1.521,01 (seribu lima ratus dua puluh satu koma nol satu) hektar yang terdapat di Kabupaten Serang; dan
 - Cagar Alam Pulau Dua seluas lebih kurang 34,52 (tiga puluh empat koma lima dua) hektar yang terdapat di Kota Serang.
 - b) Kawasan Taman Nasional meliputi:
 - Taman Nasional Ujung Kulon seluas lebih kurang 61.363,05 (enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh

- tiga koma nol lima) hektar yang termasuk daratan terdapat di Kabupaten Pandeglang; dan
- Taman Nasional Gunung Halimun-Salak seluas lebih kurang 31.978,63 (tiga puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan koma enam tiga) hektar yang terdapat di Kabupaten Lebak.
- c) Kawasan Taman Hutan Raya Banten meliputi Gunung Aseupan Kabupaten Pandeglang seluas lebih kurang 1.595,90 (seribu lima ratus sembilan puluh lima koma sembilan nol) hektar;
- d) Kawasan Taman Wisata Alam yaitu Taman Wisata Pulau Sangiang seluas lebih kurang 558,64 (lima ratus lima puluh delapan koma enam empat) hektar terdapat di Kabupaten Serang;
- e) Kawasan cagar budaya dan Ilmu Pengetahuan meliputi:
- Kawasan Hak Ulayat Masyarakat Baduy seluas lebih kurang 4.564, 12 (empat ribu lima ratus enam puluh empat koma satu dua) hektar yang terdapat di Kabupaten Lebak;
 - Pelestarian bangunan gedung dan / atau lingkungan cagar budaya di Provinsi Banten yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan
 - Kawasan Kasepuhan Cisitu yang terdapat di Kabupaten Lebak;
 - Kawasan masyarakat hukum adat kasepuhan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - Kawasan cagar budaya di Provinsi Banten yang ditetapkan oleh peraturan perundangan.
 - Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Carita seluas 1.505,65 (seribu lima ratus lima koma enam lima) hektar diarahkan pada Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang
- 5) Kawasan rawan bencana terdiri dari: Rawan banjir;, Rawan tsunami, Rawan gempa bumi, Rawan kebakaran hutan dan lahan, Rawan cuaca ekstrim, angin topan dan puting beliung ,

Rawan tanah longsor, Rawan kekeringan; dan Rawan gagal teknologi.

a) Kawasan rawan banjir meliputi:

- Kawasan sekitar DAS Cisadane, DAS Pasanggrahan, DAS Cirarab – Kali Sabi, DAS Cimanceuri dan DAS Cidurian di Kabupaten Tangerang;
- Kawasan sekitar DAS Cisadane di Kota Tangerang;
- Kawasan sekitar DAS Ciliman dan DAS Cilemer di Kabupaten Pandeglang;
- Kawasan sekitar DAS Ciujung dan DAS Cibinuangeun di Kabupaten Lebak; dan
- Kawasan sekitar DAS Ciujung di Kabupaten Serang.

b) Kawasan rawan tsunami, terdapat di pesisir pantai, yang meliputi:

- Pantai Utara, terletak di Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kabupaten Tangerang;
- Pantai Selatan, terletak di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak; dan
- Pantai Barat, terletak Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon.

c) Kawasan rawan gempa bumi meliputi :

- Kabupaten Pandeglang
- Kabupaten Lebak;
- Kabupaten Serang;
- Kabupaten Tangerang; dan
- Kota Serang.

d) Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan meliputi:

- Kabupaten Pandeglang;
- Kabupaten Lebak;
- Kabupaten Serang;
- Kabupaten Tangerang;
- Kota Serang; dan
- Kota Cilegon.

e) Kawasan rawan angin topan dan puting beliung meliputi:

- Kabupaten Pandeglang;
- Kabupaten Lebak;

- Kabupaten Serang;
 - Kabupaten Tangerang;
 - Kota Serang;
 - Kota Cilegon;
 - Kota Tangerang; dan
 - Kota Tangerang Selatan.
- f) Kawasan rawan tanah longsor, meliputi:
- Kabupaten Pandeglang
 - Kabupaten Lebak; dan
 - Kabupaten Serang.
- g) Kawasan rawan bencana diarahkan di seluruh wilayah Provinsi Banten;
- h) Kawasan rawan bencana gagal teknologi meliputi;
- Kabupaten Serang;
 - Kabupaten Tangerang;
 - Kota Serang;
 - Kota Cilegon;
 - Kota Tangerang; dan
 - Kota Tangerang Selatan
- i) Rehabilitasi Buffer Zone rawan bencana melalui RTH sebesar 30%; dan
- j) Penetapan lokasi jalur evakuasi, shelter, Sistem Peringatan Dini Bencana dan infrastruktur kebencanaan yang terintegrasi diarahkan tersebar di wilayah rawan bencana di Provinsi Banten.

b. Pola ruang kawasan budidaya

Pola ruang kawasan budidaya di Provinsi Banten dengan luas lebih kurang 779.800,93 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus koma sembilan tiga) hektar, meliputi Kawasan peruntukan hutan produksi, Kawasan peruntukan pertanian, Kawasan peruntukan perikanan, Kawasan peruntukan perkebunan, Kawasan peruntukan pertambangan, Kawasan peruntukan industri, Kawasan peruntukan pariwisata, Kawasan peruntukan permukiman; dan Kawasan peruntukan lainnya.

1) Pola ruang kawasan peruntukan hutan produksi

- a) Pola ruang kawasan peruntukan hutan produksi seluas lebih kurang 84.217,45 (delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh belas empat koma empat lima) hektar
 - b) Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas:
 - Hutan produksi terbatas seluas lebih kurang 39.008,40 (tiga puluh sembilan ribu delapan koma empat nol) hektar; dan
 - Hutan produksi tetap seluas lebih kurang 45.209,04 (empat puluh lima ribu dua ratus sembilan koma nol empat) hektar.
 - c) Kawasan peruntukan hutan produksi diarahkan di wilayah:
 - Kabupaten Serang;
 - Kabupaten Pandeglang;
 - Kabupaten Lebak; dan
 - Kota Cilegon.
- 2) Kawasan budidaya pertanian
- a) Kawasan budidaya pertanian lebih kurang 196.000,10 (seratus sembilan puluh enam ribu koma satu nol) hektar, meliputi :
 - Kawasan budidaya pertanian lahan basah seluas lebih kurang 124.263,54 (seratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh tiga koma lima empat) hektar
 - Kawasan budidaya pertanian lahan kering seluas lebih kurang 71.736,56 (tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam koma lima enam) hektar
 - Kawasan budidaya pertanian diarahkan di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, dan Kota Cilegon.
 - b) Kawasan budidaya hortikultura diarahkan di wilayah:
 - Kabupaten Serang;
 - Kabupaten Tangerang;
 - Kabupaten Pandeglang;
 - Kabupaten Lebak; dan
 - Kota Tangerang Selatan.
 - c) Kawasan budidaya peternakan diarahkan di wilayah:
 - Kabupaten Serang;
 - Kabupaten Tangerang;
 - Kabupaten Pandeglang;
 - Kabupaten Lebak; dan

- Kota Serang;
- d) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas lebih kurang 196.012,28 (seratus sembilan puluh enam ribu dua belas koma dua delapan) hektar terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan lahan cadangan di daerah yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan;
- e) Ketentuan lebih rinci mengenai Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.
- f) Kawasan agropolitan diarahkan di wilayah:
 - Kabupaten Serang;
 - Kabupaten Pandeglang;
 - Kabupaten Lebak;
 - Kabupaten Tangerang.
- g) Kawasan Sistem Pertanian Terpadu diarahkan di wilayah Kota Serang
- 3) Kawasan peruntukan perkebunan
 Kawasan peruntukan perkebunan seluas lebih kurang 191.065,09 (seratus sembilan puluh satu ribu enam puluh lima koma nol sembilan) hektar yang diarahkan di wilayah:
 - Kabupaten Serang;
 - Kota Serang;
 - Kabupaten Pandeglang;
 - Kabupaten Lebak
- 4) Pola ruang kawasan peruntukan perikanan
 - a) Pola ruang kawasan peruntukan perikanan diarahkan untuk pengembangan perikanan tangkap, kawasan budidaya perikanan, dan kawasan pengolahan ikan seluas lebih kurang 1.620,02 (seribu enam ratus dua puluh koma nol dua) hektar seluruh wilayah Provinsi Banten.
 - b) Mengembangkan kawasan minapolitan di wilayah:
 - Kabupaten Serang;
 - Kabupaten Tangerang;
 - Kabupaten Lebak;
 - Kabupaten Pandeglang; dan
 - Kota Serang.

c) Prasarana Pelabuhan Perikanan meliputi:

- Peningkatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu sebagai Pelabuhan Nusantara di Kota Serang.
- Pangkalan Pendaratan Ikan Cilegon di Kota Cilegon;
- Pangkalan Pendaratan Ikan Banyuasih, Carita, Cikeusik, Citerep, Panimbang, Sidamukti, Sukanegara, Sumur, Tamanjaya di Kabupaten Pandeglang;
- Pangkalan Pendaratan Ikan Anyer, Domas, Kepuh, Lontar, Pasauran, Pulau Panjang, Pulokali, Tengkurak, Terate, Wadas di Kabupaten Serang;
- Pangkalan Pendaratan Ikan Bayah, Binuangeun, Cibareno, Panyaungan, Pulomanuk, Sawarna, Situregen, Sukahujan, Tanjungpanto di Kabupaten Lebak;
- Pangkalan Pendaratan Ikan Cituis, Dadap, Ketapang, Kronjo, Mauk Barat, Tanjung Pasir di Kabupaten Tangerang;
- Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan di Kabupaten Pandeglang;
- Pelabuhan Perikanan Pantai Binuangeun di Kabupaten Lebak; dan
- Rencana Pembangunan pelabuhan perikanan Citarate Kecamatan Ciligrang Kabupaten Lebak

5) Pola ruang kawasan peruntukan pertambangan

Pola ruang kawasan peruntukan pertambangan meliputi: Kawasan peruntukan pertambangan mineral, Kawasan peruntukan pertambangan batubara, Kawasan peruntukan pemanfaatan panas bumi; dan Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.

a) Pola ruang kawasan peruntukan pertambangan mineral

Pola ruang kawasan peruntukan pertambangan mineral meliputi kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan.

- Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam diatur dalam peraturan dan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota

- Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan diatur dalam peraturan dan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - b) Pola ruang kawasan peruntukan pertambangan batu bara diatur dalam peraturan dan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c) Pola ruang kawasan peruntukan pemanfaatan panas bumi diatur dalam peraturan dan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d) Pola ruang kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi diatur dalam peraturan dan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 6) Pola ruang kawasan peruntukan industri
- a) Pola ruang kawasan peruntukan industri seluas lebih kurang 54.459,93 (lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh sembilan koma sembilan tiga) hektar meliputi:
 - Industri besar, diarahkan di wilayah: Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang; dan Kabupaten Lebak.
 - Industri menengah, diarahkan di seluruh wilayah Provinsi Banten.
 - Industri kecil, diarahkan di seluruh wilayah Provinsi Banten.
 - b) Rencana Pembangunan Kawasan Industri Prioritas di Kawasan Industri Wilmar Serang Kabupaten Serang.
- 7) Pola ruang kawasan peruntukan pariwisata
- Pola ruang kawasan peruntukan pariwisata seluas lebih kurang 2.598,05 (dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan koma nol lima) hektar diarahkan di wilayah:
- a) Kawasan pariwisata Pantai Barat dan KEK Tanjung Lesung;
 - b) Kawasan pariwisata Pantai Utara ;
 - c) Kawasan pariwisata Budaya Banten Lama;

- d) Kawasan pariwisata Pantai Selatan;
 - e) Kawasan pariwisata Budaya Permukiman Baduy;
 - f) Kawasan pariwisata Alam Taman Nasional Ujung Kulon;
 - g) Kawasan pariwisata Wisata Alam Taman Nasional Gunung Halimun – Gunung Salak;
 - h) Kawasan pariwisata Geopark, dan
 - i) Kawasan pariwisata Agro.
- 8) Pola ruang kawasan peruntukan permukiman
- a) Pola ruang kawasan peruntukan permukiman di Daerah seluas lebih kurang 249.840,27 (dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh koma dua tujuh) hektar;
 - b) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan tersebar di seluruh wilayah Provinsi Banten;
 - c) Rencana pengembangan Kota Baru Publik Maja; dan
 - d) Rencana peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh di Provinsi Banten.
- 9) Kawasan peruntukan lainnya
- Kawasan peruntukan lainnya meliputi kawasan andalan nasional, Pertahanan keamanan, kawasan untuk pelayanan umum dan kawasan lainnya;
- a) Kawasan andalan nasional di Provinsi Banten meliputi :
 - Kawasan Bojonegara – Merak – Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan pertambangan dan panas bumi;
 - Kawasan andalan Laut Krakatau dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata.
 - b) Kawasan Pertahanan Keamanan di wilayah Provinsi Banten dengan memperhatikan fungsi kawasan meliputi :
 - Daerah Latihan Pertahanan Pantai
 - Daerah Pertempuran
 - Daerah Latihan Hambat
 - Daerah Komunikasi
 - Daerah Belakang

- Daerah Pangkal Perlawanan
- c) Kawasan untuk pelayanan umum meliputi:
 - Pelayanan kesehatan, diarahkan di seluruh wilayah Provinsi Banten; dan
 - Pelayanan pendidikan, diarahkan di seluruh wilayah Provinsi Banten.
- d) Rencana Pengembangan Kawasan pada sepanjang jalan tol dan interchange jalan tol;
- e) Rencana pembangunan dan pengembangan budidaya peternakan di seluruh wilayah Provinsi Banten.
- f) Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Cibaliung di Kabupaten Pandeglang kawasan dengan potensi pertanian dan perkebunan; dan
- g) Rencana pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Banten.

Tabel 6.5
Hasil Telaahaan Pola Ruang Provinsi Banten

NO	RENCANA POLA RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN POLA RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Rehabilitasi dan Perlindungan Kawasan Hutan Lindung	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon	*	*	*	*	*
II	Pengendalian Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya							
II.1	Rehabilitasi dan Perlindungan Kawasan resapan air	a. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup b. Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan	Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak	*	*	*	*	*
III	Pengendalian Kawasan Perlindungan Setempat							
III.1	Rehabilitasi dan Perlindungan Sempadan pantai	a. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup b. Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan C. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pengelolaan Sumberdaya Laut	Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang , Kabupaten lebak, Kota Cilegon	*	*	*	*	*
III.2	Rehabilitasi dan Perlindungan Sempadan sungai	a. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup b. Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan C. Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	DAS Ciujung, DAS Cidurian , DAS Cilemer, DAS Ciliman, DAS Cibanten, DAS Cidanau, DAS Cimanceuri, DAS Cisadane, DAS Cibinuangeun, DAS Cihara, DAS Cimadur, DAS Cibareno, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak KotaCilegon	*	*	*	*	*

NO	RENCANA POLA RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN POLA RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
III.3	Rehabilitasi dan Perlindungan Kawasan sekitar mata air	d. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi dan Air Tanah	Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang	*	*	*	*	*
III.4	Rehabilitasi dan Perlindungan Kawasan Lindung Geologi Bentang Alam Karst		Kabupaten Lebak	*	*	*	*	*
IV	Pengendalian Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya							
IV.1	Rehabilitasi dan Perlindungan Cagar Alam	a. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup b. Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan C. Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	a. Cagar Alam Rawa Danau b. Cagar Alam Gunung Tukung Gede c. Cagar Alam Pulau Dua	*	*	*	*	*
IV.2	Rehabilitasi dan Perlindungan Taman Nasional		a. Taman Nasional Ujung Kulon b. Taman Nasional Gunung Halimun-Salak	*	*	*	*	*
IV.3	Rehabilitasi dan Perlindungan Taman Hutan Raya		Gunung Aseupan Kabupaten Pandeglang	*	*	*	*	*
IV.4	Rehabilitasi dan Perlindungan Taman Wisata Alam		Taman Wisata Alam Pulau Sangiang Kab. Serang	*	*	*	*	*
IV.5	Rehabilitasi Perlindungan Kawasan cagar budaya dan Ilmu Pengetahuan		a. Kawasan Hak Ulayat Masyarakat Baduy b. Pelestarian bangunan gedung dan / atau lingkungan cagar budaya c. Kawasan Kasepuhan Cisitu d. Kawasan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan e. Rehabilitasi dan Perlindungan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)	*	*	*	*	*

NO	RENCANA POLA RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN POLA RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
V	Pengendalian Kawasan Rawan Bencana Alam							
V.1	Adaptasi dan Mitigasi Kawasan Rawan Bencana Banjir	a. Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan b. Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutana. Program Penanggulangan Bencana c. Program Penataan Ruang	Kawasan sekitar DAS Cisadane, DAS Pasanggrahan, DAS Cirarab – Kali Sabi, DAS Cimanceuri dan DAS Cidurian di Kabupaten Tangerang, Kawasan sekitar DAS Cisadane di Kota Tangerang, Kawasan sekitar DAS Ciliman dan DAS Cilemer di Kabupaten Pandeglang, Kawasan sekitar DAS Ciujung dan DAS Cibuungeun di Kabupaten Lebak, Kawasan sekitar DAS Ciujung di Kabupaten Serang	*	*	*	*	*
V.2	Adaptasi dan Mitigasi Kawasan Rawan Bencana Tsunami		Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang,, Kabupaten Pandeglang , Kabupaten Lebak, Kota Cilegon	*	*	*	*	*
V.3	Adaptasi dan Mitigasi Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
V.4	Adaptasi dan Mitigasi Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	a. Program Penanggulangan Bencana b. Program Penataan Ruang c. Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan d. Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
V.5	Adaptasi dan Mitigasi Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan		Kabupaten Pandeglang , Kabupaten Lebak , Kabupaten Serang , Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon	*	*	*	*	*
V.6	Adaptasi dan Mitigasi Kawasan Rawan Bencana Cuaca Ekstrem, Angin Topan dan Puting Beliung	Program Penanggulangan Bencana	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
V.7	Adaptasi dan Mitigasi Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor		Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang	*	*	*	*	*

NO	RENCANA POLA RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN POLA RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
V.8	Adaptasi dan Mitigasi Kawasan Rawan Bencana Kekeringan		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
V.9	Adaptasi dan Mitigasi Kawasan Rawan Bencana Gagal Teknologi		Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan	*	*	*	*	*
V.10	Rehabilitasi Buffer Zone rawan bencana melalui RTH sebesar 30%		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
V.11	Penetapan lokasi jalur evakuasi, shelter, Sistem Peringatan Dini Bencana dan infrastruktur kebencanaan yang terintergrasi		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
VI	Pengembangan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi							
VI.1	Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi	a. Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan b. Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan	Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Cilegon	*	*	*	*	*
VII	Pengembangan dan Perlindungan Kawasan Peruntukan Pertanian							
VII.1	Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Pertanian dan peternakan	Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon	*	*	*	*	*
VII.2	Pengembangan Kawasan Budidaya Hortikultura		Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang Selatan	*	*	*	*	*
VII.3	Pengembangan Kawasan Budidaya Peternakan		Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Serang	*	*	*	*	*

NO	RENCANA POLA RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN POLA RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
VII.4	Pengembangan dan Perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (P2B)		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
VII.5	Pengembangan Kawasan Agropolitan		Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang	*	*	*	*	*
VII.6	Pengembangan dan Perlindungan Kawasan Lahan Pertanian Terpadu		Kota Serang	*	*	*	*	*
VIII	Pengembangan Kawasan Peruntukan Perkebunan	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Pertanian dan peternakan	Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak	*	*	*	*	*
IX	Pengembangan Kawasan Peruntukan Perikanan							
IX.1	Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap, Kawasan Budidaya Perikanan, dan Kawasan Pengolahan Ikan	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pengelolaan Sumberdaya Laut	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
IX.2	Pengembangan Kawasan Minapolitan		Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kota Serang	*	*	*	*	*
IX.3	Peningkatan dan Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
IX.4	Pelabuhan Perikanan Pantai		Labuan di Kabupaten Pandeglang, Binuangeun di Kabupaten Lebak	*	*	*	*	*
IX.5	Rencana Pembangunan pelabuhan perikanan Pantai		Citarate di Kabupaten Lebak	*	*	*	*	*

NO	RENCANA POLA RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN POLA RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
X	Pengendalian Kawasan Peruntukan Pertambangan							
X.1	Pengendalian Pertambangan Mineral	a. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi dan Air Tanah b. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
X.2	Pengendalian Pertambangan Batubara		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
X.3	Pengendalian Peruntukan Pemanfaatan Pertambangan Panas Bumi		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
X.4	Pengendalian Peruntukan Pemanfaatan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XI	Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Peruntukan Industri							
XI.1	Pengembangan dan Pengendalian Industri	Program Pengembangan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XI.2	Rencana Pembangunan Kawasan Industri Prioritas di Kawasan Industri Wilmar Serang		Kab. Serang	*	*	*	*	*
XII	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata							
XII.1	Pengembangan Kawasan Pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XIII	Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Peruntukan Permukiman							
XIII.1	Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman Pedesaan	Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman	Provinsi Banten	*	*	*	*	*

NO	RENCANA POLA RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN POLA RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
XIII.2	Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XIII.3	Rencana pengembangan Kota Baru Publik Maja		Kab. Lebak dan Kab. Tangerang	*	*	*	*	*
XIII.4	Rencana peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh		Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XIV	Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Peruntukan Lainnya							
XIV.1	Kawasan Andalan Nasional	a. Program Penataan Ruang b. Program Pengembangan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen c. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif d. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Pertanian dan peternakan e. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pengelolaan Sumberdaya Laut f. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi dan Air Tanah g. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara	kawasan Bojonegara – Merak – Cilegon, Kawasan Andalan Laut Krakatau dan sekitarnya	*	*	*	*	*
XIV.2	Kawasan Pertahanan keamanan	a. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum b. Program Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XIV.3	Kawasan untuk pelayanan umum	Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman	Provinsi Banten	*	*	*	*	*

NO	RENCANA POLA RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN POLA RUANG SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
XIV.4	Rencana pengembangan kawasan pada sepanjang ruas tol dan interchange Tol	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XIV.5	Rencana pembangunan dan pengembangan budidaya peternakan	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Pertanian dan peternakan	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
XIV.6	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Cibaliung dengan potensi pertanian dan perkebunan		Kabupaten Pandeglang	*	*	*	*	*
XIV.7	Rencana pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pengelolaan Sumberdaya Laut	Provinsi Banten	*	*	*	*	*

6.2.5 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

1. Kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Banten

Kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Banten meliputi:

- a. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional dan daerah;
- b. Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer, dan Ramsar;
- c. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional;
- d. Pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan;
- e. Pelestarian dan peningkatan sosial budaya bangsa;
- f. Pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

2. Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

3. Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Banten meliputi :

- a. Strategi pengembangan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan *pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional dan daerah*, meliputi :
 - 1) Menetapkan kawasan strategis Provinsi Banten yang berfungsi lindung;

- 2) Mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan strategis Provinsi Banten yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan dan/atau menurunkan kualitas kawasan lindung;
 - 3) Mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis Provinsi Banten yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan dan/atau menurunkan kualitas kawasan lindung;
 - 4) Mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis Provinsi Banten yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya;
 - 5) Mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis Provinsi Banten yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - 6) Mewujudkan rehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis Provinsi Banten;
 - 7) Menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang secara produktif dan berkelanjutan melalui pengendalian pembangunan kawasan-kawasan strategis dan pengendalian ruang terbuka hijau di wilayah kabupaten/kota.
- b. Strategi pengembangan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan *pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer, dan Ramsar*, meliputi:
- 1) Melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistemnya;
 - 2) Meningkatkan kepariwisataan;
 - 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - 4) Melestarikan keberlanjutan lingkungan hidup.
- c. Strategi pengembangan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan *pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional*, meliputi:

- 1) Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam, kegiatan budidaya unggulan, dan posisi atau letak strategisnya sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - 2) Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - 3) Mengintensifkan promosi peluang investasi;
 - 4) Memanfaatkan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - 5) Mengendalikan kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan dan efisiensi pemanfaatan kawasan;
 - 6) Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi;
 - 7) Mewujudkan penataan kawasan andalan melalui pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan industri dan pariwisata secara produktif;
 - 8) Mewujudkan terbentuknya sinergisitas interaksi ekonomi wilayah hulu dan hilir pada pusat-pusat pertumbuhan dengan pemasaran regional dan nasional melalui sistem jaringan transportasi wilayah dan nasional.
- d. Strategi pengembangan kawasan strategis Provinsi Banten dari sudut kepentingan *pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan*, meliputi:
- 1) Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan;
 - 2) Meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah;
 - 3) Mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat;
 - 4) Meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan;
 - 5) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kegiatan ekonomi;
 - 6) Mewujudkan terselenggaranya interaksi kawasan-kawasan strategis nasional di Provinsi Banten dengan penataan struktur ruang dan pola ruang di wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota

- e. Strategi pengembangan kawasan strategis Provinsi Banten dari sudut kepentingan *pelestarian dan peningkatan sosial budaya bangsa*, meliputi:
 - 1) Meningkatkan kecintaan masyarakat akan nilai budaya bangsa yang mencerminkan jati diri yang berbudi luhur;
 - 2) Mengembangkan penerapan nilai budaya bangsa dalam kehidupan masyarakat;
 - 3) Melestarikan situs warisan budaya bangsa.
- f. Strategi pengembangan kawasan strategis Provinsi Banten dari sudut kepentingan *pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat*, meliputi:
 - 1) Mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
 - 2) Meningkatkan keterkaitan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya;
 - 3) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup, dan keselamatan masyarakat.
- g. Strategi pengembangan kawasan strategis Provinsi Banten dari sudut kepentingan *peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara*, meliputi:
 - 1) Mendelineasikan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara yang terletak di wilayah Provinsi Banten;
 - 2) Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - 3) Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis dengan kawasan budidaya terbangun; dan turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

h. Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Banten

Kawasan strategis di wilayah provinsi ditetapkan berdasarkan kepentingan: pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Selain penetapan kawasan strategis Pemerintah Daerah juga melakukan pengembangan kawasan strategis di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pengaturan ruang kawasan strategis provinsi diatur lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

a. Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan pemerintah pusat dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan perbatasan Negara di laut lepas .

b. Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi diarahkan di wilayah:

1) Kawasan strategis nasional meliputi:

- Kawasan Selat Sunda;
- Kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu.

2) Kawasan Strategis Provinsi meliputi:

- Kawasan sekitar KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten) di Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocokjaya dan Kecamatan Serang Kota Serang merupakan kawasan dengan potensi permukiman, perdagangan dan jasa;
- Kawasan Perkotaan Serang – Cilegon (Seragon) merupakan kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah;
- Kawasan Serang Utara Terpadu terdiri dari Wilayah Utara Kota Serang dan Kabupaten Serang dengan potensi perikanan, pariwisata, pertanian dan industri;
- Kawasan Pantai Selatan Terpadu meliputi Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Kecamatan Bayah, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilograng, Kecamatan

Panggarangan, Kecamatan Malingping, Kecamatan Wanasalam, dan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak kawasan dengan potensi perikanan, pertambangan, pariwisata dan industri;

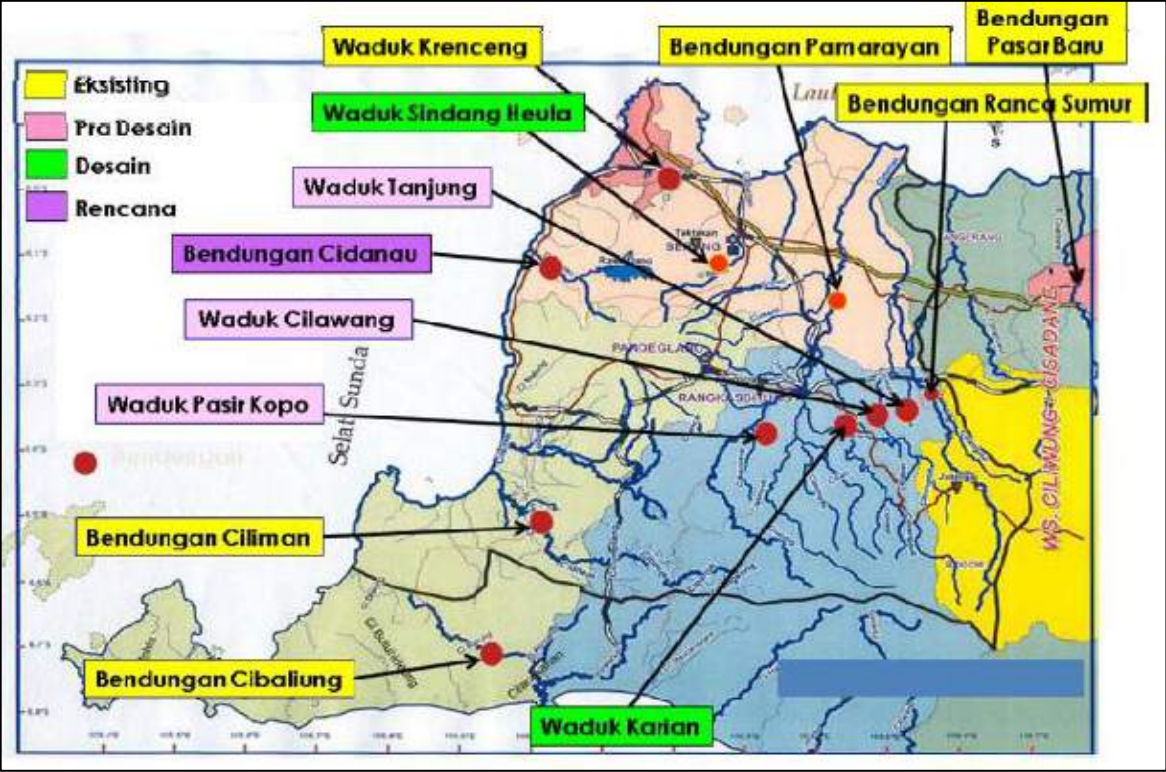
- Kawasan perbatasan antar kabupaten/kota di Provinsi Banten kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah.
- c. Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan sosial dan meliputi Kawasan Strategis Provinsi yang diarahkan di wilayah Kawasan Situs Banten Lama di Kota Serang dan Kabupaten Serang
- d. Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi yaitu Kawasan Strategis Provinsi yang diarahkan pada: Bendungan Karian di Kecamatan Sajira, Kecamatan Cimarga, dan Kecamatan Kalanyar Kabupaten Lebak;
- e. Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup diarahkan di wilayah:
 - 1) Kawasan Strategis Nasional yaitu sekitar Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang;
 - 2) Kawasan Strategis Provinsi yaitu kawasan Penyangga Bandar Udara Soekarno-Hatta.

Tabel 6.6
Hasil Telaahan Kawasan Strategis Provinsi Banten

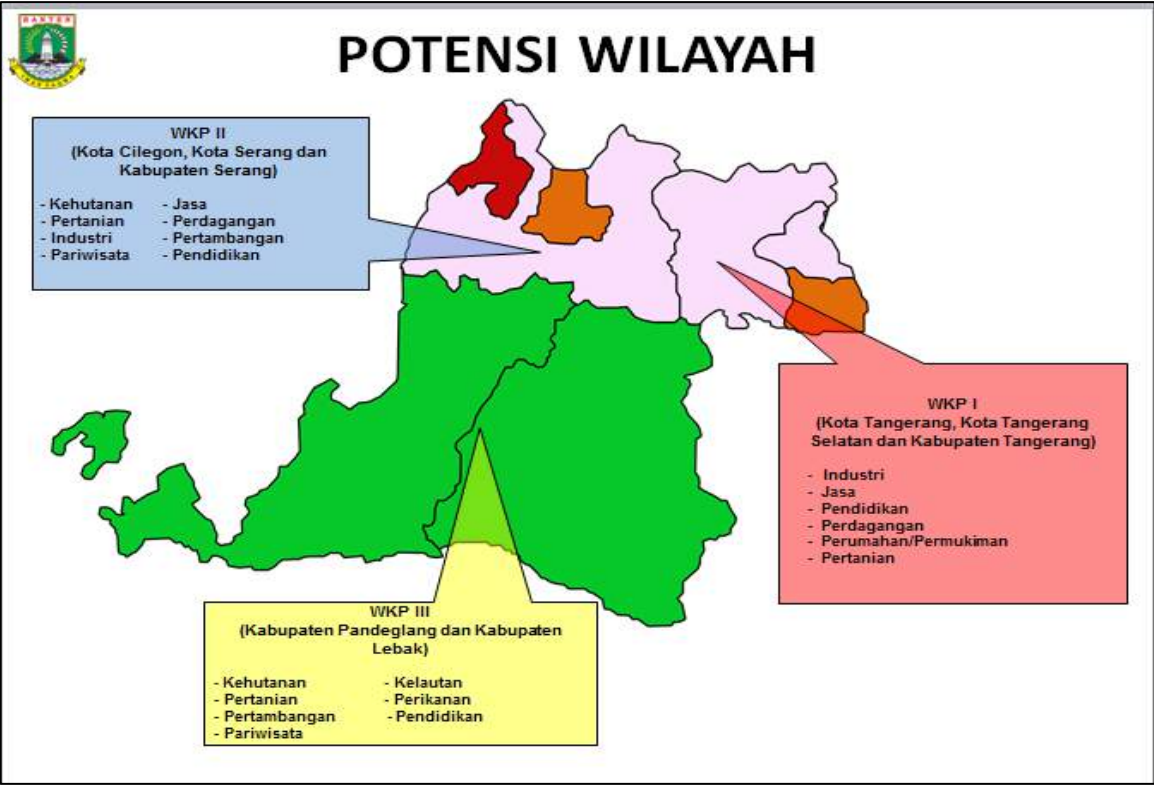
NO	RENCANA KAWASAN STRATEGIS	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN KAWASAN STRATEGIS SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi							
I.1	Pengembangan dan Pengendalian KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten)	a. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman b. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan c. Program Penataan Ruang	Kota Serang (Kecamatan Curug, Cipocokjaya dan Kecamatan Serang)	*	*	*	*	*
I.2	Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Perkotaan Serang – Cilegon (Seragon)	a. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman b. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan c. Program Penataan Ruang d. Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan	Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang	*	*	*	*	*
I.3	Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Serang Utara Terpadu	a. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman b. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan c. Program Penataan Ruang	Kabupaten Serang (Kecamatan Bojonegara, Kramatwatu, Pontang, Tirtayasa, Tanara), Kota Serang (Kecamatan Kasemen)	*	*	*	*	*
I.4	Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Pantai Selatan Terpadu	a. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman b. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan c. Program Penataan Ruang d. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pengelolaan Sumberdaya Laut	Kabupaten Pandeglang (Kecamatan Cikeusik), Kabupaten Lebak (Kecamatan Wanasalam, Malingping, Cihara, Panggarangan, Bayah, Ciligrang, Cibeber)	*	*	*	*	*

NO	RENCANA KAWASAN STRATEGIS	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN KAWASAN STRATEGIS SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I.5	Pengembangan dan Pengendalian Kawasan perbatasan antar kabupaten/kota	a. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman b. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan c. Program Penataan Ruang d. Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan	Provinsi Banten	*	*	*	*	*
II	Pengembangan Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Pertumbuhan Sosial dan Budaya							
II.1	Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Situs Banten Lama	a. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman b. Jalan dan Jembatan c. Program Penataan Ruang d. Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan e. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif f. Program Pelestarian Kebudayaan	Kota Serang Kabupaten Serang	*	*	*	*	*
III	Pengembangan Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi							
III.1	Pembangunan Bendungan Karian	a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan b. Program Keciaptakaryaan	Kabupaten Lebak	*	*	*	*	

NO	RENCANA KAWASAN STRATEGIS	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN KAWASAN STRATEGIS SESUAI RTRW						
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				
				LIMA TAHUN KE-I	LIMA TAHUN KE-II	LIMA TAHUN KE-III	LIMA TAHUN KE-IV	LIMA TAHUN KE-V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IV	Pengembangan Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup							
IV.1	Pengembangan dan Perlindungan Kawasan Strategis Provinsi	a. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman b. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan c. Program Penataan Ruang d. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup f. Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan g. Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan	Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang	*	*	*	*	*



Gambar 6.1 Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air



Gambar 6.2 Wilayah Kerja Pembangunan

6.3 ARAH KEBIJAKAN HOLISTIK TEMATIK INTEGRATIF SPASIAL PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN

A. HOLISTIK – TEMATIK

Pengertian holistik adalah cara pandang yang menyatakan keseluruhan sebagai satu kesatuan lebih penting dari pada bagian-bagiannya. Kata holistik berasal dari bahasa Inggris Holistic yang artinya menekankan pentingnya keseluruhan dan saling terkait dari bagian-bagiannya.

Pengertian tematik dalam kamus besar bahasa Indonesia mengandung pengertian segala sesuatu berhubungan dengan tema (menjadi pokok permasalahan). Dalam pendekatan tematik di artikan sebagai sebuah pola yang menyatukan unsur yang dikaitkan/terpusat pada suatu tema/pokok permasalahan sehingga terjadi keterpaduan antara satu dengan yang lain.

Pendekatan tematik – holistik adalah pendekatan yang menekankan pada pentingnya keseluruhan dengan terdapat keterkaitan antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan utama. Jadi pendekatan ini mengutamakan pada kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas nasional, prioritas pembangunan di Provinsi dengan indikasi kegiatan sampai koordinasi antar kementerian dan lembaga, serta antar perangkat daerah bertujuan mencapai sasaran prioritas nasional dan prioritas tingkat provinsi yang didukung oleh kementerian dan lembaga, perangkat daerah pada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten /kota.

B. PENDEKATAN INTEGRATIF

Pengertian integratif sebagai penyatuan berbagai aspek kedalam satu keutuhan yang padu yang dapat diartikan sebagai pendekatan yang menyatukan beberapa aspek kedalam satu proses. Jika dihubungkan dengan perencanaan pembangunan, pendekatan integratif melakukan proses mengidentifikasi dan mengarahkan agar output dari kegiatan yang terdapat pada perangkat daerah agar dapat saling terintegrasi dengan kegiatan pada perangkat daerah lainnya dalam mendukung keberhasilan kebijakan prioritas.

C. PENDEKATAN SPASIAL

Pengertian spasial dalam kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan ruang dan tempat.

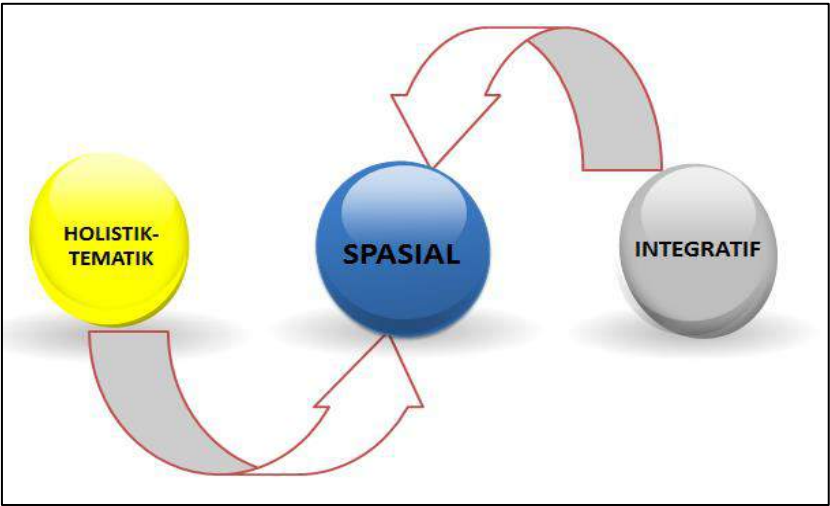
Pendekatan spasial lebih sering digunakan dalam bidang geografi (keuangan) yang merupakan pendekatan yang khas, karena merupakan studi tentang keragaman ruang muka bumi dengan menelaah masing-masing aspek keruangannya. Dalam pembangunan daerah pendekatan spasial instrumen bagi penentuan alokasi sumber daya pembangunan dan lokasi kegiatan pembangunan yang telah direncanakan, pembahasan spasial digunakan saat pembahasan menyepakati fokus dari suatu kegiatan prioritas yang terdapat pada beberapa acuan perangkat daerah untuk diintegrasikan yang selanjutnya diselaraskan dengan usulan kabupaten/kota.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten tahun 2017-2022 melakukan pendekatan holistik – tematik, integratif spasial pada 6 tema pembangunan dengan mempertimbangkan:

1. Tematik tersebut merupakan agenda pembangunan nasional yang selaras dengan solusi yang ingin di selesaikan terhadap persoalan yang ada di Provinsi Banten;
2. Tematik tersebut merupakan isu strategis pembangunan daerah yang selaras dengan solusi yang ingin diselesaikan terhadap persoalan yang ada di Provinsi Banten;
3. Tematik tersebut merupakan bagian dari prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan solusi yang ingin di selesaikan terhadap persoalan yang ada di Provinsi Banten;
4. Tematik tersebut merupakan pilihan tema pembangunan daerah yang selaras dengan sasaran strategis dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah yang ingin dikembangkan diprovnsi Banten.

Arah kebijakan tematik tersebut yaitu:

1. Penanggulangan Kemiskinan dan pengangguran;
2. Ketahanan Pangan;
3. Pariwisata;
4. Kota Metropolitan Serang;
5. Daya saing daerah;
6. Daya saing perekonomian daerah.

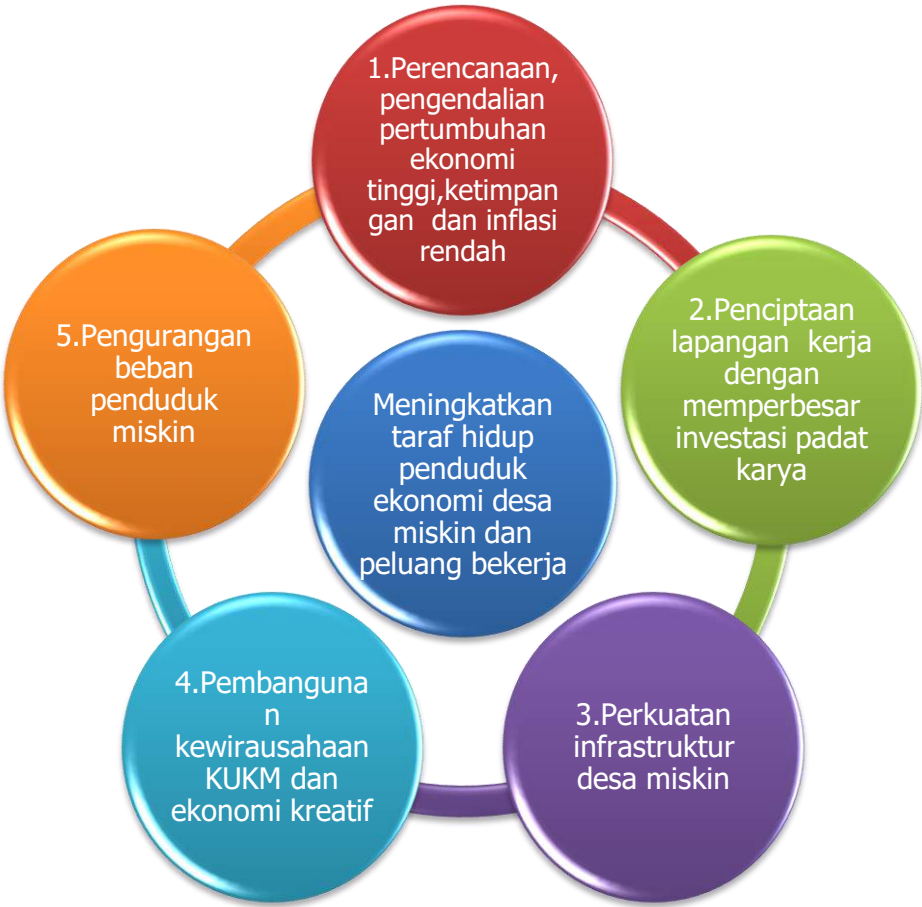


Gambar 6.3 Tematik-Holistik Integratif Spasial

Penataan dari masing masing tematik- holistik integrasi spasial sebagai berikut:

6.3.1 ARAH KEBIJAKAN TEMATIK KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN

LEVEL 1 : Meningkatkan taraf hidup penduduk ekonomi desa miskin dan peluang bekerja



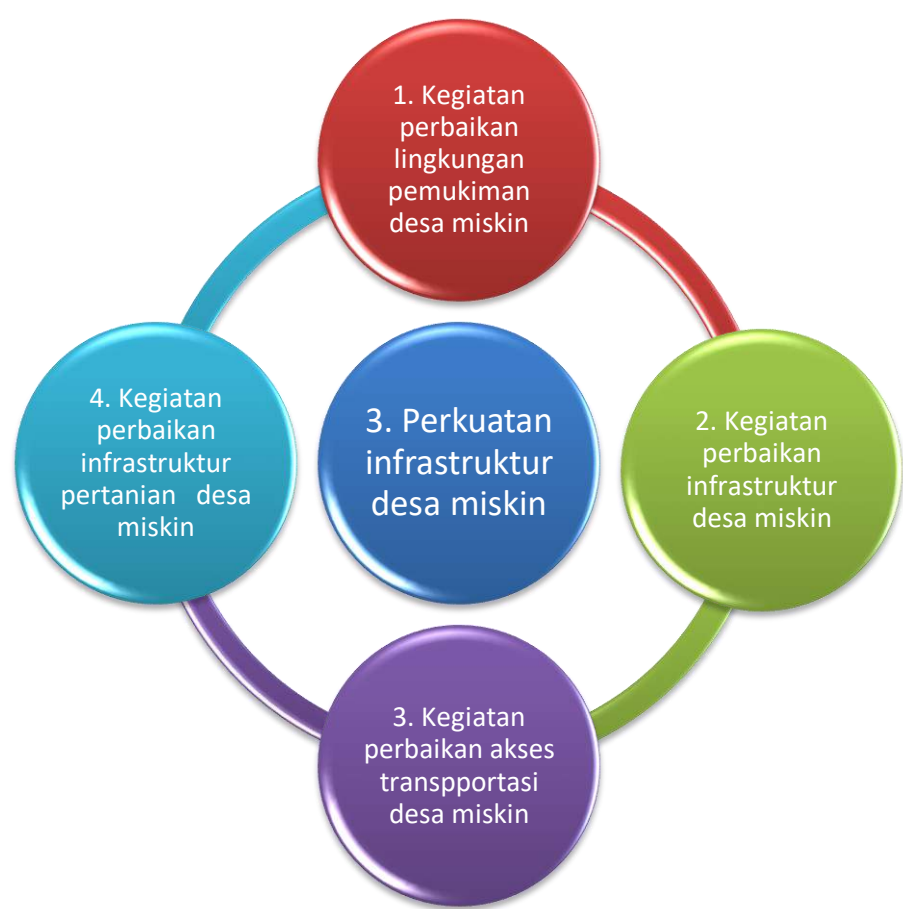
LEVEL 2 : 1. Perencanaan, pengendalian pertumbuhan ekonomi tinggi, ketimpangan dan inflasi rendah



LEVEL 2 : 2. Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya



LEVEL 2 : 3. Perkuatan infrastruktur desa miskin



LEVEL 2 : 4 . Pembangunan kewirausahaan KUKM dan ekonomi kreatif



LEVEL 2 : 5 . Pengurangan beban penduduk miskin



MATRIK TEMATIK PENANGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
	(Meningkatkan taraf hidup penduduk ekonomi desa miskin dan peluang bekerja	1	Angka kemiskinan
		2	Tingkat pengangguran terbuka

	INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
1	Perencanaan, pengendalian pertumbuhan ekonomi tinggi, ketimpangan dan inflasi rendah	Bappeda	1	Penyusunan program dan kegiatan kemiskinan dan pengangguran terealisasi baik
			2	Kaji terap penelitian intervensi kemiskinan dan pengangguran
		BPS banten	3	Arahan kegiatan intervensi kemiskinan dan pengangguran versi BPS
		Bank Indonesia	4	Arahan kegiatan intervensi kemiskinan dan pengangguran versi BI
		Biro Perekonomian	5	Kebijakan ekonomi dalam intervensi kegiatan kemiskinan dan pengangguran
		Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	6	kaji terap strategi naker dalam intervensi pengangguran
2	Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Kegiatan padat karya pembangunan jalan jembatan dalam intervensi kemiskinan dan pengangguran
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2	Kegiatan padat karya pembangunan praswil dalam intervensi kemiskinan dan pengangguran
		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3	target penanaman modal dalam solusi kemiskinan dan pengangguran
		Dinas Pariwisata	4	Kegiatan intervensi kemiskinan dan pengangguran pada pariwisata

	INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
		Dinas Pertanian	5	Kegiatan intervensi kemiskinan dan pengangguran pada pertanian
		TNI	6	Kegiatan manunggal pada opd terkait dalam intervensi kemiskinan dan pengangguran
		Dinas Kelautan dan Perikanan	7	Kegiatan intervensi kemiskinan dan pengangguran pada kelautan dan perikanan
		Dinas Ketahanan Pangan	8	Target pertumbuhan pangan intervensi kemiskinan dan pengangguran
		Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	9	Kegiatan bersama mitra strategi naker intervensi kemiskinan dan pengangguran
3	Perkuatan infrastruktur desa miskin	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	Kegiatan perbaikan lingkungan pemukiman desa miskin
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	Kegiatan perbaikan infrastruktur desa miskin
		Dinas Perhubungan	3	Kegiatan perbaikan akses transportasi desa miskin
		Dinas Pertanian	4	Kegiatan perbaikan infrastruktur pertanian desa miskin
4	Pembangunan kewirausahaan KUKM dan ekonomi kreatif	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Pengadaan sarpras pembangunan umkm bagi miskin dan pengangguran
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	Pengadaan sarpras pembangunan indag bagi miskin dan pengangguran
		Dinas Pariwisata	3	Pengadaan sarpras pembangunan pariwisata bagi miskin dan pengangguran
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	4	Sisinfokemiskinan dan ketenagakerjaan
		Dinas Pertanian	5	Pengadaan sarpras pembangunan pertanian bagi miskin dan pengangguran

	INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	6	Pengadaan sarpras pembangunan bidang pora bagi miskin dan pengangguran
		Dinas Kelautan dan Perikanan	7	Pengadaan sarpras pembangunan bidang kelautan dan perikanan bagi miskin dan pengangguran
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	8	Pengadaan sarpras pembangunan bidang energi sdm bagi miskin dan pengangguran
		Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	9	Pengadaan sarpras pembangunan bidang nakertrans bagi miskin dan pengangguran
5	Pengurangan beban penduduk miskin	Dinas Kesehatan	1	Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
		Dinas Sosial	2	Penangan masyarakat miskin
		BPJS	3	Subsidi masyarakat miskin
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4	Bea siswa masyarakat miskin
		Dinas Kelautan dan Perikanan	5	Penanganan masyarakat miskin pesisir
		Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	6	Kegiatan dengan mitra strategis nakertransdalam penanggulangan kemiskinan
		Dinas Pertanian	7	Kegiatan dengan mitra strategis pertanian dalam penanggulangan kemiskinan
		Biro Kemasyarakatan	8	Kebijakan dalam intervensi beban kemiskinan dan pengangguran

6.3.2 ARAH KEBIJAKAN TEMATIK MEMBANGUN KETAHANAN PANGAN

LEVEL 1 : Pembangunan ketahanan pangan



LEVEL 2 : 1. Pembangunan ketahanan pangan



LEVEL 2 : 2. Kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat



LEVEL 2 : 3. Peningkatan mutu kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat



LEVEL 2 : 4. Penanganan gangguan terhadap produksi pangan



LEVEL 2 : 5. Penguatan kelembagaan petani



LEVEL 2 : 6. Pemanfaatan teknologi dalam peningkatan produksi dan nilai tambah produk pangan



Matrik Tematik Ketahanan Pangan

	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	
	Pembangunan ketahanan pangan dalam meningkatkan indeks ketahanan pangan daerah	1	Indeks Ketahanan Pangan

	Integrasi Tema Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Indikasi Kegiatan	
1	Peningkatan produksi padi dan pangan lainnya	Dinas Ketahanan Pangan	1	Sistem pengendalian ketahanan pangan
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	Penataan kawasan produktifitas
		Dinas Pertanian	3	Peningkatan produksi padi
		Dinas Kelautan dan Perikanan	4	Peningkatan produksi perikanan
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5	Luasan lahan hijau produktif
2	Kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	Jumlah titik distribusi strategis
		Dinas Perhubungan	2	Dukungan atribusi distribusi
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3	Jumlah ruas jalan dukungan titik distribusi
		Dinas Pertanian	4	Pengaturan siklus kawasan produksi
		Dinas Kelautan dan Perikanan	5	Pengaturan siklus produksi perikanan
3	Peningkatan mutu kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	Ketersediaan pangan lokal
		Dinas Kesehatan	2	Tingkat kesehatan Produk Makanan
		BPOM	3	Tingkat kesehatan pangan dan halal
		Dinas Pertanian	4	Ketersediaan pangan lokal
		Dinas Kelautan dan Perikanan	5	Gerakan makan produk ikan

	INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
4	Penanganan gangguan terhadap produksi pangan	Dinas Pertanian	1	Wilayah cegah hama tanaman
		Dinas Pertanian	2	Wilayah cegah penyakit ternak
		Dinas Kelautan dan Perikanan	3	Wilayah cegah penyakit ikan
5	Penguatan kelembagaan petani	Dinas Pertanian	1	Kelompok petani katagori baik
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	Kelompok koperasi katagori baik
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3	Kelompok UMKM katagori baik
		Dinas Kelautan dan Perikanan	4	Kelompok nelayan katagori baik
6	Pemanfaatan teknologi dalam peningkatan produksi dan nilai tambah produk pangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	Tersedia teknologi pengolahan ikan
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	Tersedia teknologi dan menjamin UMKM berkelanjutan
		Dinas Kelautan dan Perikanan	3	Tersedia teknologi alat deteksi ikan
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	4	Sismonev pengembangan umkm
		Dinas Ketahanan Pangan	5	Sisdaketpa (sistem pengendalian ketahanan pangan Banten)
		Biro Perekonomian	6	Kebijakan peningkatan ekonomi Banten
			7	Kebijakan infrastruktur ekonomi Banten

6.3.3 ARAH KEBIJAKAN TEMATIK METROPOLITAN SERANG

LEVEL 1 : Pembangunan tematik metropolitan serang



LEVEL 2 : 1. Implementasi Tata kelola pemerintahan yang baik



LEVEL 2 : 2. Implementasi Tata kelola pemerintahan yang baik



LEVEL 2 : 3. Infrastruktur Keterkaitan Antar Kota metropolitann serang Dalam Sistem Perkotaan



LEVEL 2 : 4. Pemenuhan standar pelayanan perkotaan (SPP)



LEVEL 2 : 5. Mengembangkan kota cerdas, dan hijau secara berkelanjutan



LEVEL 2 : 6. Meningkatkan kapasitas pengelolaan kota



MATRIK TEMATIK KOTA METROPOLITAN SERANG

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	
	Meningkatnya aktifitas penataan wilayah serang yang mengukur kinerja pencapaian menuju kota Metropolitan Serang	1	Prosentase kinerja pengembangan kota Metropolitan Serang

INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
1	Implementasi Tata kelola pemerintahan yang baik	Bappeda	1	Perencanaan Pembangunan Metropolitan Serang
		Badan Kepegawaian Daerah	2	Penilaian kompetensi aparatur Kota Serang
		Bidang pemerintahan	3	Kerjasama pemerintahan Kota Serang
2	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	Standar pelayanan pendidikan Kota Serang
		Dinas kesehatan	2	Standar pelayanan kesehatan Kota Serang
3	Infrastruktur Keterkaitan Antar Kota metropolitann serang Dalam Sistem Perkotaan	Kementrian PUPR, Dinas PUPR Banten dan PUPR Kota serang	1	Konektifitas dengan Pusat Kawasan Nasional
		Dinas PUPR Banten dan PUPR Kota Serang	2	Pengembangan kawasan perkotaan Metropolitan Serang
		Dinas PUPR Banten dan PUPR Kota Serang	3	Konektifitas dengan pusat kawasan wilayah
		Dinas PUPR Banten dan PUPR Kota Serang, dinas terkait	4	Konektifitas dengan pusat kawasan strategis kota (Pariwisata, perdagangan, pendidikan, industri, iptek)
		Dinas PUPR ,dishub Banten dan PUPR, dishub Kota serang,	5	konektiftas moda transportasi antar kawasan
4	Pemenuhan standar pelayanan perkotaan (SPP)	Dinas PUPR Banten dan PUPR Kota Serang	1	Ketersediaan sarana dan prasarana dasar perkotaan
		Dinas pendidikan Banten dan Dinas pendidikan Kota Serang	2	Ketersediaan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya yang berkualitas

INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
		Dinas PRKP Banten dan Dinas PRKP Kota Serang	3	Ketersediaan sarana permukiman
		Dinas Perhubungan Banten dan Dinas Perhubungan Kota Serang	4	Ketersediaan sistem transportasi publik
		Dinas sosial Banten dan Dinas sosial Kota Serang	5	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan serang
5	Mengembangkan kota cerdas, dan hijau secara berkelanjutan	Dinas PUPR Banten dan Dinas PUPR kota serang	1	Penataan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan ruang dan kegiatan perkotaan yang efisien dan berkeadilan
		Dinas Kominfo Banten dan Dinas kominfo Kota Serang	2	ketersediaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mengelolan kota metropolitan serang
		Dinas Kominfo,Indag,Kop ukm Banten dan Kominfo,Indag,Kop UMKM Kota Serang	3	Pembangunan kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif dan produktif
		Dinas Kominfo,Dis LH hutan, Banten dan kominfo, Dis LH hutan Kota Serang	4	ketersediaan Sistem informasi kualitas lingkungan perkotaan
		Dinas Kominfo, Dis LH hutan,Dishub Banten dan Dinas kominfo, Dis LH hutan, Dishub Kota Serang	5	Ketersediaan Transportasi cerdas dan ramah lingkungan
		Dinas Kominfo,Dinas pariwisata Banten dan Dinas Dinas kominfo,Dinas pariwisata Kota Serang	6	Ketersediaan city brandig destinasi wisata kota metropolitan serang

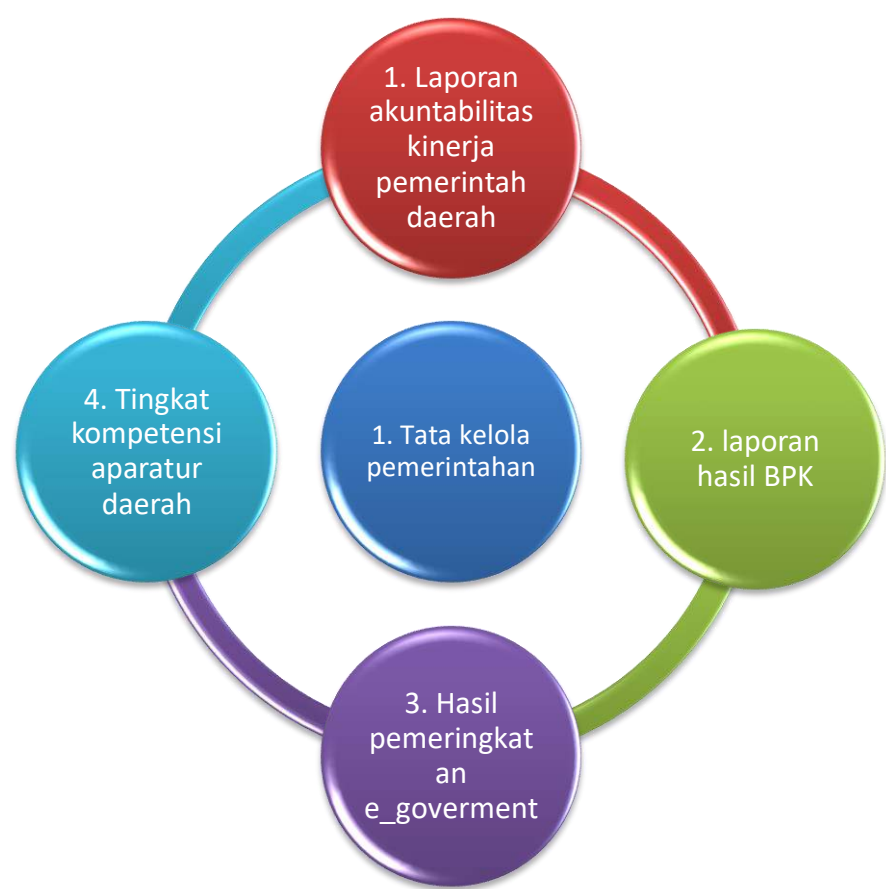
INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
6	Meningkatkan kapasitas pengelolaan kota	Bapeda, Biro hukum , setwan, Banten dan Dinas Dinas Bapeda, Biro hukum , setwan Kota Serang	1	ketersedian perencanaan, peraturan ,prosedur Kota metropolitan serang Berkelanjutan
		Bapeda, Biro pemerintahan Bapeda dan Bapeda, Biro pemerintahan Kota Serang		ketersediaan kelembagaan Badan Koordinasi dan kerjasama Pembangunan Kawasan antar Perkotaan metropolitan
		Bapeda, Diskominfo, Banten dan Bapeda, Diskominfo Kota Serang	3	ketersediaan Basis data informasi dan peta perkotaan yang terpadu kota metropolitan serang

6.3.4 TEMATIK DAYA SAING DAERAH

LEVEL 1 Pembangunan pariwisata Banten



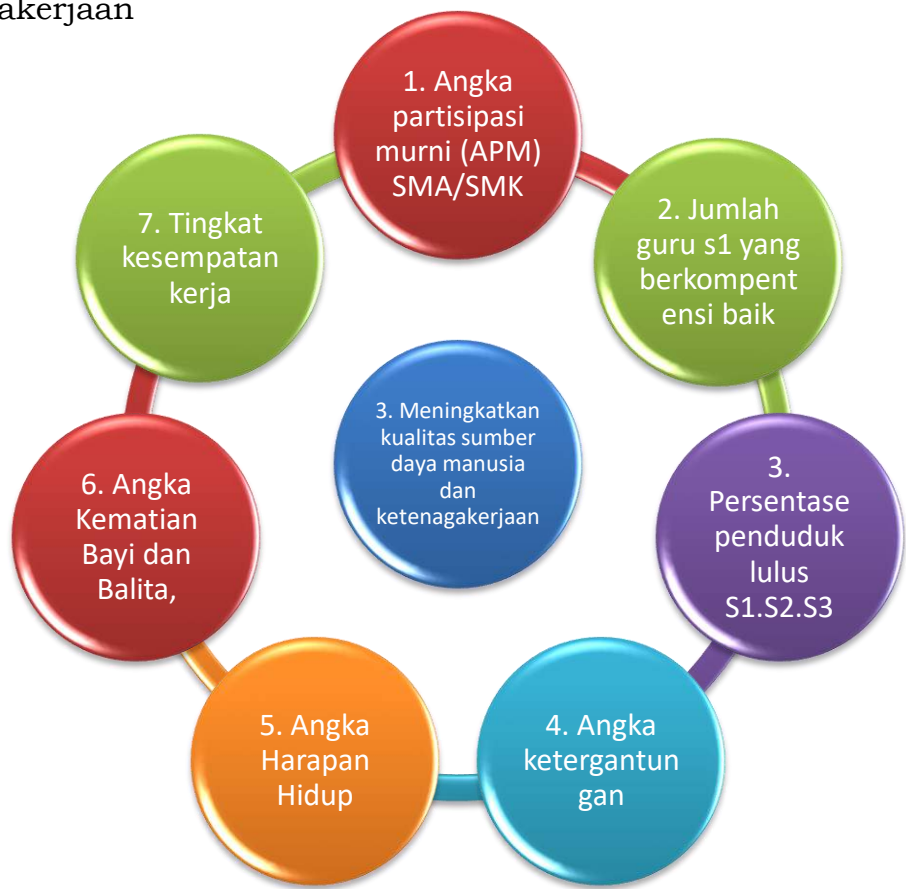
LEVEL 2 : 1. Tata kelola pemerintahan



LEVEL 2 : 2. Mendorong aktivitas perekonomian daerah



LEVEL 2 : 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan



LEVEL 2 : 4. Menciptakan lingkungan usaha produktif yang dapat menarik minat dunia usaha untuk melakukan kegiatan usaha



LEVEL 2 : 5. Membangun konektivitas yang terintegrasi antara sistem transportasi, logistik serta komunikasi dan informasi dalam rangka membuka akses daerah seluas-luasnya



LEVEL 2 : 6. Meningkatkan aktivitas Perbankan dan Lembaga Keuangan



Matrik Tematik Daya Saing Daerah

	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	
	Pembangunan daya saing daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesempatan bekerja	1	Meningkatkan PDRB HK terhadap angkut kerja
		2	Meningkatkan PDRB ADHB Terhadap jumlah penduduk
		3	Tingkat kesempatan kerja

	Intergrasi Tema Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Indikasi Kegiatan	
1	Tata kelola pemerintahan	Biro Organisasi	1	Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
		Inspektorat	2	laporan hasil BPK
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	3	Hasil pemeringkatan e_government
		Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	4	Tingkat kompetensi aparatur daerah
2	Mendorong aktivitas perekonomian daerah	Badan Pendapatan Daerah	1	Jumlah PAD
		Badan Pendapatan Daerah	2	Jumlah APBD
		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3	Jumlah investasi daerah
3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	Jumlah guru S1 yang berkompentensi baik
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3	Persentase penduduk lulus S1.S2.S3
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	Perencanaan ketenagakerjaan
		Dinas Kesehatan	5	Angka Harapan Hidup

	INTERGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
		Dinas Kesehatan	6	Angka Kematian Bayi dan balita,
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7	Tingkat kesempatan kerja
4	Menciptakan lingkungan usaha produktif yang dapat menarik minat dunia usaha untuk melakukan kegiatan usaha	Biro Perekonomian	1	Perda kemudahan investasi
		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2	Pengurangan waktu perizinan usaha
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	3	Teknologi online Pelayanan terpadu satu pintu
		Satuan Polisi Pamong Praja	4	Penegakan Peraturan Daerah
5	Membangun konektivitas yang terintegrasi antara sistem transportasi, logistik serta komunikasi dan informasi dalam rangka membuka akses daerah seluas-luasnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Panjang jalan pada akses distribusi dalam kondisi baik
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	Jumlah jembatan pada akses distribusi dalam kondisi baik
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3	Jumlah ketersediaan listrik untuk usaha/industri
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	4	Jumlah akses ketersediaan jaringan komunikasi
6		Biro Perekonomian	1	Ketersediaan jumlah kantor cabang bank untuk melayani masyarakat

	INTERGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
	Meningkatkan aktivitas Perbankan dan Lembaga Keuangan	Biro Perekonomian	2	Ketersediaan jumlah lembaga keuangan untuk melayani masyarakat
		Biro Perekonomian	3	Ketersediaan produk perbankan untuk melayani masyarakat
		Biro Perekonomian	4	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan perbankan
		Biro Perekonomian	5	Jumlah UKM yang memanfaatkan perbankan

6.3.5 ARAH KEBIJAKAN TEMATIK PARIWISATA

LEVEL 1 Pembangunan pariwisata Banten



LEVEL 2 : 1 Promosi Wisata Banten



LEVEL 2 : 2. Pengembangan destinasi wisata



LEVEL 2 : 3. Peningkatan SDM , kelembagaan dan pemanfaatan teknologi



LEVEL 2 : 4. Penciptaan ekonomi lokal dan sikap masyarakat



LEVEL 2 : 5. Jaminan keselamatan, kebersihan, keamanan dan ketertiban destinasi



Matrik Tematik Pariwisata Banten

	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	
	Pembangunan kepariwisataan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan	1	Kunjungan wisatawan
		2	Destinasi wisata

Integrasi Tema Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	Indikasi Kegiatan	
1	Promosi Wisata Banten	Dinas Pariwisata	1	Strategi pengembangan pariwisata banten
		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2	Minimalisir perizinan pariwisata
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	3	Sistem informasi pariwisata banten
2	Pengembangan destinasi wisata	Dinas Pariwisata	1	Destnasi wisata Banten (7 woderful)
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2	Penataan wilayah pariwisata
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3	pembangunan ruas pusat pariwisata
		Dinas Perhubungan	4	pembangunan atribut pusat pariwisata
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5	Peningkatan Sekolah pariwisata
3	Peningkatan SDM , kelembagaan dan pemanfaatan teknologi	Dinas Pariwisata	1	Organisasi pariwisata penumbuh SDM
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	Pelatihan sdm pariwisata kerjasama
			3	Penumbuhan jurusan pariwisata
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	Kesertaan organisasi masyarkat dalam pariwisata dalam SDM dan lembaga
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5	Kesertaan UMKM penunjang pariwisata

INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	6	Sistem Informasi pariwisata, kelembagaan UMKM, lembaga pendidikan pariwisata
4	Penciptaan ekonomi lokal dan sikap masyarakat	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	penciptaan produk umkm penunjang pariwisata
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	penciptaan pola dukungan produk UMKM penunjang pariwisata
		Dinas Pariwisata	3	pengembangan budaya lokal dukungan penunjang pariwisata
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4	Penciptaan kurikulum khusus budaya pariwisata lokal pada sekolah pariwisata di Banten
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	Kemitraan strategis untuk membangun jenis kearifan lokal yang akan kembangkan
5	Jaminan keselamatan, kebersihan, keamanan dan ketertiban destinasi	Polisi	1	SOP pengamanan pariwisata kemitraan dengan polisi
		Dinas Pariwisata	2	Kebijakan pengamanan di lokasi wisata
		Satuan Polisi Pamong Praja	3	SOP pengamanan pariwisata kemitraan dengan pol-PP
		Biro Perekonomian	4	Kebijakan peningkatan ekonomi melalui pariwisata
		Biro Perekonomian	5	Kebijakan peningkatan infrastruktur mendukung pariwisata

6.3.6 TEMATIK DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH

LEVEL 1 Daya saing perekonomian daerah yang dapat menguatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan investasi daerah



LEVEL 2 : 1 Kebijakan Tata kelola pemerintahan



LEVEL 2 : 2 Penguatan terhadap sektor perekonomian daerah



LEVEL 2 : 3 Kerjasama perekonomian antar daerah



LEVEL 2 : 4. Peningkatan peran Perbankan dan keuangan



LEVEL 2 : 5. Peningkatan Infrastruktur daerah



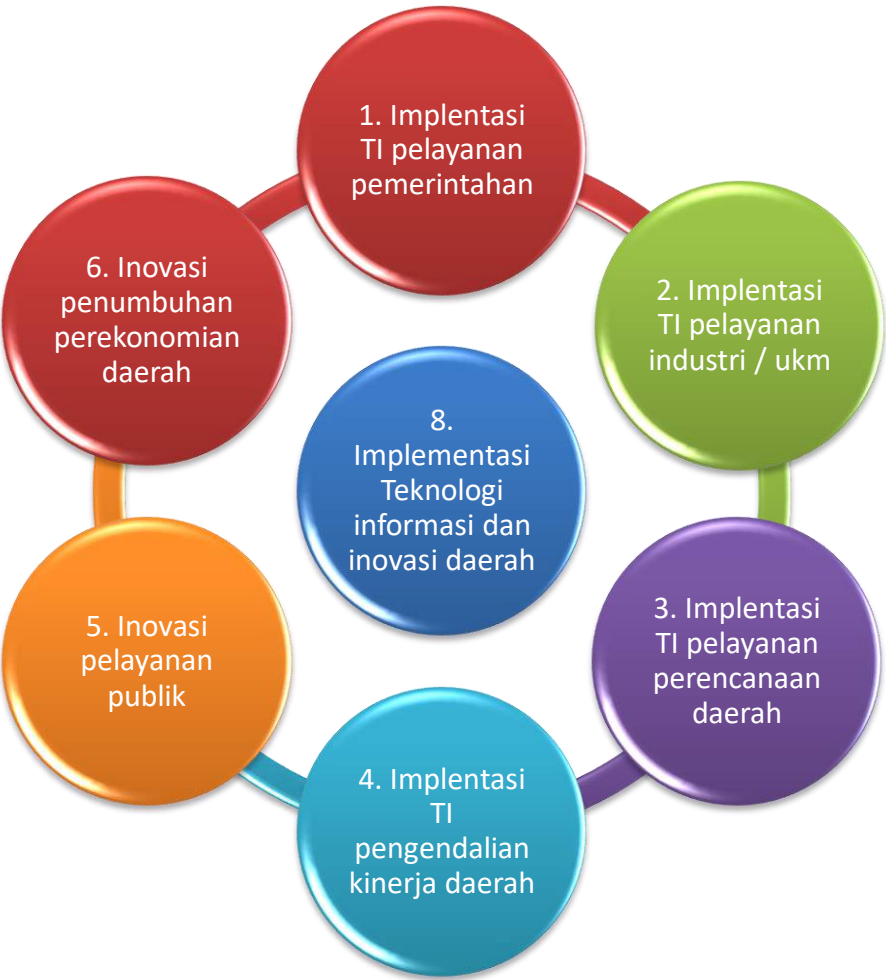
LEVEL 2 : 6. Pengelolaan Sumber daya alam yang berdaya saing



LEVEL 2 : 7. Pengelolaan Sumber daya manusia yang berdaya saing



LEVEL 2 : 8. Implementasi Teknologi informasi dan inovasi daerah



MATRIK TEMATIK DAYA SAING PEREKONOMIAN

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
	Daya saing perekonomian daerah yang dapat menguatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan investasi daerah	1	Laju Pertumbuhan ekonomi
		2	Investasi Daerah

INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
1	Kebijakan Tata kelola pemerintahan	Sekretariat Dewan	1	Pengelolaan regulasi Politik
		Biro Hukum	2	Regulasi Perda kemudahan usaha daerah
		Satpol PP	3	Pengelolaan aspek Kemanan/kriminalitas
		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	4	Investasi daerah dan pelayanan terpadu satu pintu
		Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5	Capaian kompetensi aparatur daerah
		Biro Perekonomian	6	Kerjasama dan sinergi perusahaan daerah
2	Penguatan terhadap sektor Perekonomia daerah	Biro Perekonomian	1	Kebijakan kinerja Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
		Biro Perekonomian	2	Kebijakan kinerja Sektor Pertambangan dan Penggalian
		Biro Perekonomian	3	Kebijakan kinerja Sektor Industri Pengolahan
		Biro Perekonomian	4	Kebijakan kinerja Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih
		Biro Perekonomian	5	Kebijakan kinerja Sektor Konstruksi
		Biro Perekonomian	6	Kebijakan kinerja Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
		Biro Perekonomian	7	Kebijakan kinerja Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
		Biro Perekonomian	8	Kebijakan kinerja Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
		Biro Perekonomian	9	Kebijakan kinerja Jasa-Jasa
3	Kerjasama perekonomian antar daerah	Biro Perekonomian	1	Kerjasama antar daerah dalam propinsi
		Biro Perekonomian	2	Kerjasama antar daerah luar provinsi
		Biro Perekonomian	3	Kerjasama antar provinsi
		Biro Perekonomian	4	Kerjasama internasional
4	Peningkatan peran Perbankan dan keuangan	Biro Perekonomian	1	Ketersediaan jumlah kantor cabang bank untuk melayani masyarakat
		Biro Perekonomian	2	Ketersediaan jumlah lembaga keuangan non untuk melayani masyarakat
		Biro Perekonomian	3	Ketersediaan produk perbankan untuk melayani masyarakat
		Biro Perekonomian	4	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan perbankan
		Biro Perekonomian	5	Jumlah UKM yang memanfaatkan perbankan
5	Peningkatan Infrastruktur daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Panjang jalan dalam kondisi baik

INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	Jumlah jembatan dalam kondisi baik
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3	Jumlah ketersediaan listrik untuk rumah tangga/usaha/industri
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	4	Jumlah akses ketersediaan jaringan komunikasi
6	Pengelolaan Sumber daya alam yang berdaya saing	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Pengelolaan Sumber daya kemaritiman
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	Pengelolaan Sumber daya kehutanan
		Dinas Pertanian	3	Pengelolaan Sumber daya pertanian, peternakan dan perkebunan
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4	Pengelolaan Sumber daya alam tambang
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5	Pengelolaan potensi perdagangan dan industri
		Dinas Pariwisata	6	Pengelolaan potensi pariwisata
		Biro Perekonomian	7	Pengelolaan posisi geografis strategis Banten

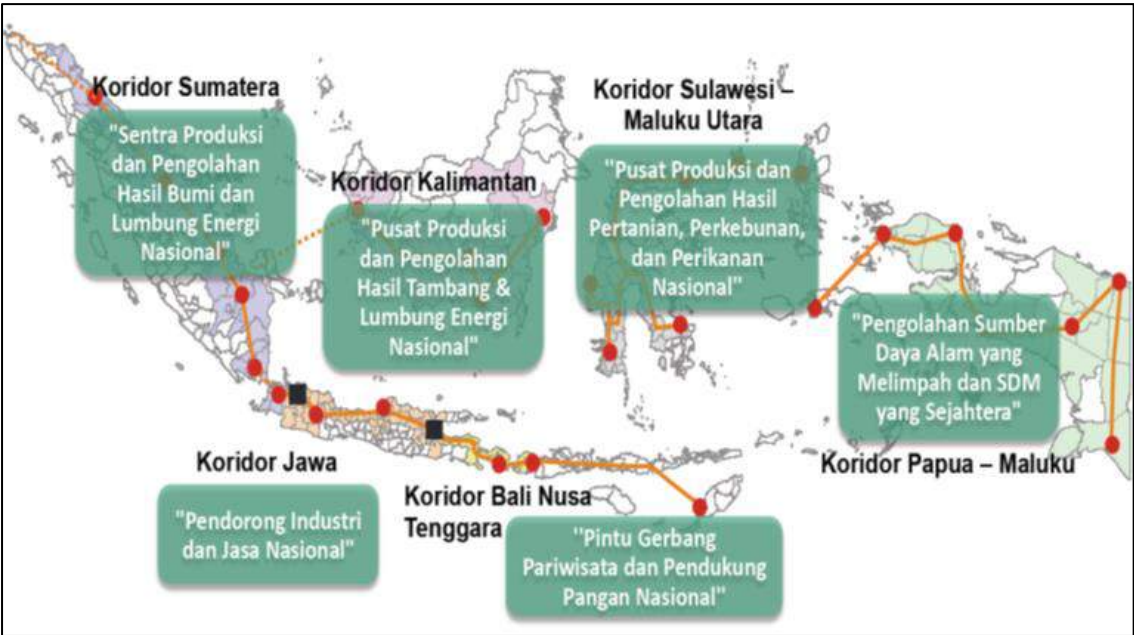
INTEGRASI TEMA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	INDIKASI KEGIATAN	
7	Pengelolaan Sumber daya manusia yang berdaya saing	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Ketersedian dan daya saing sdm umk
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	Ketersediaan dan daya saing sdm industri
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3	Ketersediaan sdm industri kreatif
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4	Keselarasan pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5	Tingkat produktifitas sdm Banten
8	Implementasi Teknologi informasi dan inovasi daerah	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	1	Implentasi TI pelayanan pemerintahan
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	2	Implentasi TI pelayanan industri / ukm
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	3	Implentasi TI pelayanan perencanaan daerah
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	4	Implentasi TI pengendalian kinerja daerah
		Biro Organisasi	5	Inovasi pelayanan publik
		Biro Perekonomian	6	Inovasi penumbuhan perekonomian daerah

6.4 ARAH KEBIJAKAN KORIDOR EKONOMI BANTEN

Koridor ekonomi dalam pengertian *Asian Development Bank* adalah jaringan infrasturktur terintegrasi dalam geografi yang dicanangkan untuk menstimulasi pengembangan ekonomi, koridor tersebut berkembang antar negara, dalam sebuah negara atau antar kawasan-kawasan. Koridor ekonomi membuat infrastruktur terintegrasi seperti jalan tol, jalur kereta api, dan pelabuhan serta menghubungkan antar kota-kota atau negara-negara.

Di indonesia telah dikembangkan 6 koridor ekonomi sebagai berikut :

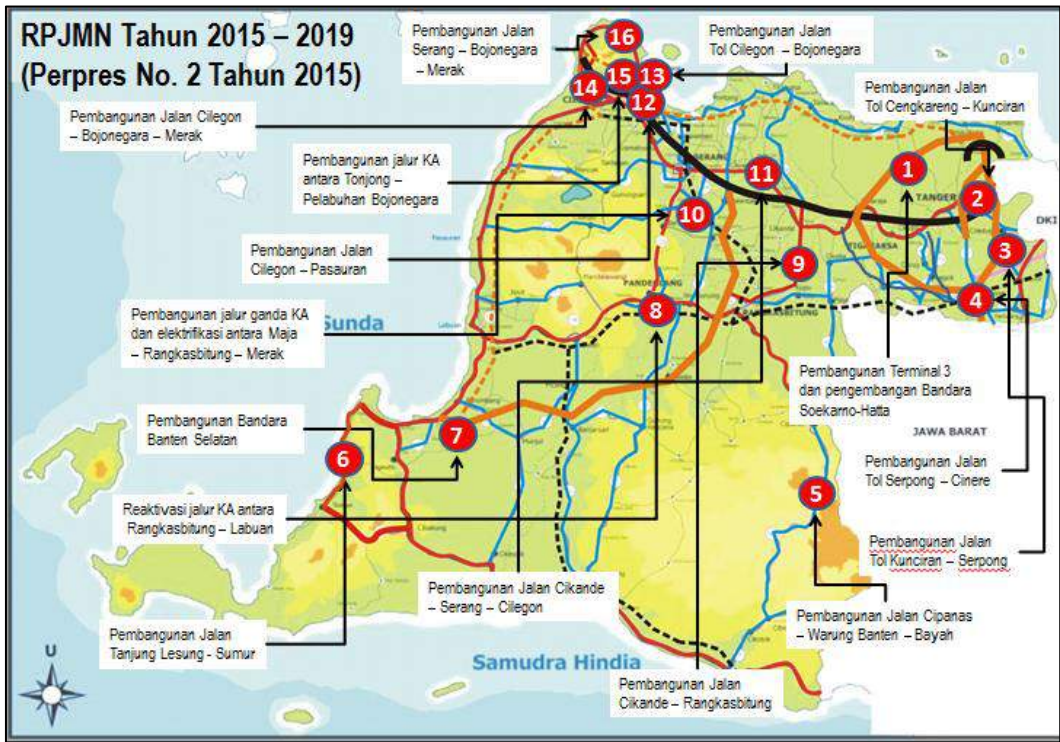
- 1. Koridor Ekonomi Sumatera : Sebagai sentra produksi dan pengelolaan hasil bumi dan lumbung energi nasional;
- 2. Koridor Ekonomi Jawa : Sebagai pendorong industri dan jasa nasional;
- 3. Koridor Ekonomi Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi;
- 4. Koridor Ekonomi Sulawesi – Maluku Utara : sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian perkebunan dan perikanan nasional;
- 5. Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara : Pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional;
- 6. Koridor Ekonomi Papua – Maluku sebagai Pengolahan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang sejahtera;



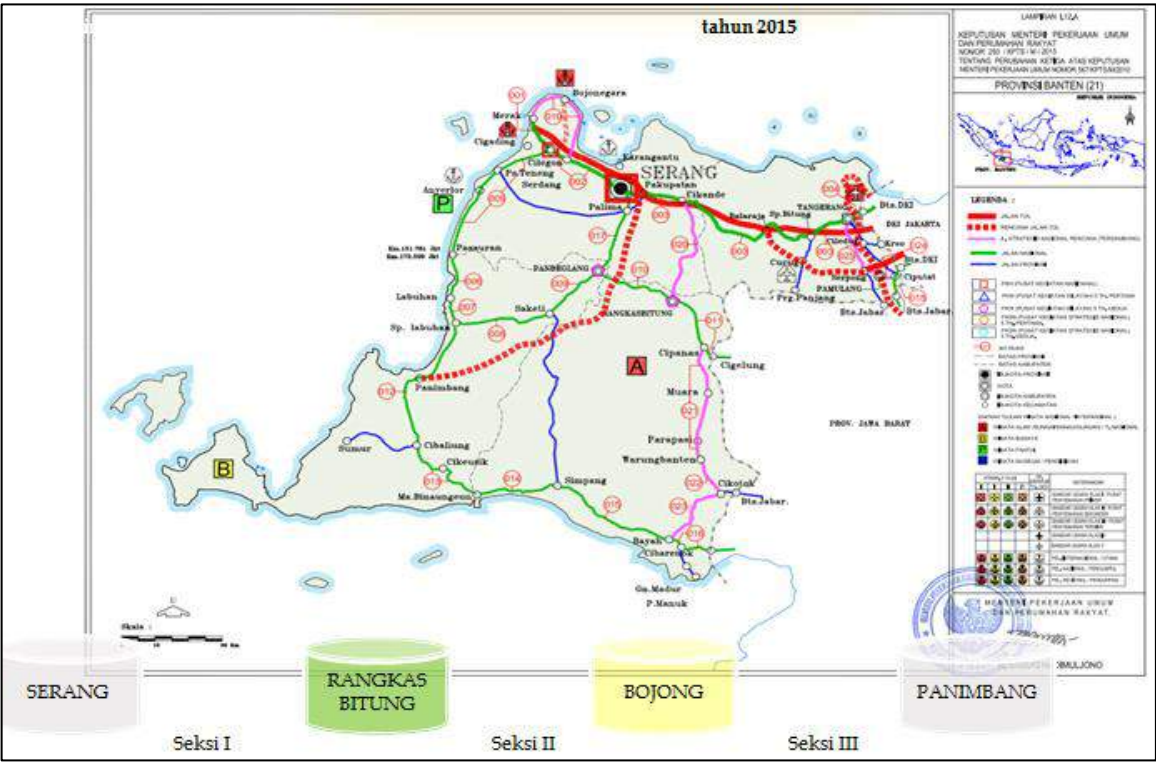
Gambar 6.4 Koridor Ekonomi Nasional

Terdapat pembangunan sarana strategi di Provinsi Banten yang telah ditetapkan dalam beberapa keputusan antara lain;

1. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional tahun 2015 – 2019 mencantumkan 15 proyek strategis nasional
2. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional.
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW Provinsi Banten. Tentang Rencana Jalan Kerata Api Serang-Cikande-Cikupa--Serpong
4. Jalan Kerata Api ini merupakan salah satu angkutan massal baik untuk penumpang maupun barang. Hal ini dilaksanakan untuk mengantisipasi peningkatan lalu lintas barang dan jasa dengan selesainya pembangunan Tol Trans Sumatera diharapkan mampu mengurangi beban jalan Tol Jakarta Merak,
5. Pembangunan jalan tol Serang – Panimbang yang merupakan jalur transportasi strategis yang menghubungkan transportasi utara menuju ke selatan.



Gambar 6.5 Proyek Starategis Nasional di Provinsi Baanten dalam RPJMN 2015- 2019



Gambar 6.8 Jalur Pembangunan Tol Serang-Panimbang

Berdasarkan rencana pengembangan proyek nasional tersebut dikembangkan Transit Oriented Development (TOD) yaitu model orientasi pengembangan transit yang merupakan salah satu pendekatan pengembangan kota yang mengadopsi tata ruang campuran dan maksimalisasi penggunaan angkutan masal seperti kereta api, bus umum. Dengan demikian perjalanan/Trip akan didominasi menggunakan angkutan umum yang terhubung langsung dengan tujuan perjalanan, tempat pemberhentian angkutan umum yang mempunyai kepadatan relatif tinggi. Untuk itu kebijakan model TOD ini harus di tempatkan 1) pada jaringan utama angkutan masal, 2) pada koridor jaringan bus yang berfrekuensi tinggi, 3) pada jaringan penumpang bus yang waktu tempuhnya kurang dari 10 menit dari jaringan utama angkutan masal.

Ada beberapa tataruang campuran yang yang berorientasi pada pengembangan transit antara lain ;

1. Penggunaan ruang campuran yang terdiri dari pemukiman, perkantoran serta fasilitas pendukung.
2. Kepadatan penduduk yang tinggi ditandai dengan berkembangnya perumahan.
3. Tersedianya fasilitas perbelanjaan
4. Fasilitas kesehatan

5. Fasilitas pendidikan
6. Fasilitas hiburan
7. Fasilitas olah raga
8. Fasilitas perbankan

KORIDOR EKONOMI BANTEN

Dalam mengembangkan pembangunan yang telah di tetapkan sebagaimana telah dijabarkan, telah kembangkan Koridor Ekonomi Banten yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Koridor Utara : Menghubungkan sentra-sentra pertumbuhan primer Tangerang – Balaraja – Cikupa – Serang – Cilegon – Merak yang memfokuskan pada sektor industri manufaktur, perdagangan , logistik, permukiman dan jasa.
2. Koridor Tengah : Dibangun sepanjang jalur tol Serang – Panimbang menghubungkan sentra – sentra Serang – Pandegelang – Rangkasbitung – Panimbang. Yang memfokuskan pada sektor agrobisnis industri, pertanian, pengolahan hasil bumi dan laut, Peternakan, Perikanan dan Parawosata.
3. Koridor Selatan : Dirancang pembangunan Jalan tol Panimbang – Cikeusik –Simpang – Bayah – Sukabumi.



Gambar 6.9 Pengembangan Koridor Ekonomi Banten

6.5 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk mencapai Visi dan Misi selanjutnya dipertegas melalui strategi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Strategi yang dilaksanakan perlu didukung oleh kebijakan yang bersifat umum dan dikaitkan dengan prioritas pembangunan beserta program yang akan dilaksanakan.

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk melaksanakan misi dan prioritas daerah serta menggambarkan keterkaitan antar bidang pada urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Banten, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dengan rumusan indikator kinerja sasaran daerah beserta target pelaksanaan indikasi kegiatan tahunan selama 5 tahun.

Setelah kebijakan umum dan program pembangunan dibuat, langkah selanjutnya adalah meletakkan program pembangunan daerah sesuai bidang pada tiap urusan pemerintahan. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk kegiatan prioritas pembangunan.

Arah kebijakan umum ini merupakan penjabaran lebih detil dari visi misi kepala daerah yang terdiri dari program pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dikelompokkan pada masing-masing urusan dan meliputi program pembangunan dan kerangka pendanaan.

Penganggaran untuk melaksanakan urusan dan kewenangan pemerintah Provinsi Banten diformulasikan melalui belanja langsung dalam bentuk program kegiatan pada Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah provinsi Banten, selanjutnya program unggulan yang menjadi urusan dan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota, pola penganggarannya diformulasikan melalui bantuan keuangan khusus (specifik grand) yang meliputi :

1. Bidang Pendidikan, ditujukan untuk peningkatan akses, mutu dan tata kelola.
2. Bidang Kesehatan, ditujukan untuk peningkatan akses, mutu dan tata kelola.
3. Bidang Infrastruktur, ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antar wilayah

Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan selanjutnya diselaraskan dengan misi pembangunan daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Menciptakan Tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)

Program untuk mendukung misi ini adalah :

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	Tujuan : Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompentensi serta melayani masyarkat	
1.1	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN SELURUH OPD
	Program Tata Kelola Pemerintahan Seluruh OPD	Seluruh OPD
1.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	BPKAD
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	Program Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	
	Program Penatausahaan Aset Daerah	
1.3	Meningkatnya Kualitas SPIP	INSPEKTORAT
	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	INSPEKTORAT
1.4	Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	BAPPEDA
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	
1.5	Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	BAPPEDA
	Program Penelitian dan Pengembangan	
1.6	Meningkatnya Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan secara elektronik	Bappeda
	Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah	
1.7	Terwujudnya Kompetensi Aparatur	BPSDM
	Program Pengembangan SDM Aparatur Kompetensi Teknis dan Fungsional	
	Program Pengembangan SDM Aparatur Kompetensi Manajerial dan Pemerintahan	
1.8	Terwujudnya Profesionalisme aparatur	BKD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
1.9	Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Optimal	Bapenda
	Proram Peningkatan Pajak Daerah	
	Proram Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	
1.10	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	Satpol PP
	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	
1.11	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI	Badan Kesbangpol
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional	
1.12	Meningkatnya Penanggulangan Kebencanaan yang efektif	BPBD
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	
1.13	Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi dan keterbukan Informasi	Diskominfo

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	

2. Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Program untuk mendukung misi ini adalah :

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
2	Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah	SEKRETARIS DAERAH
2.1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah	Asisten Ekonomi dan Pembangunan
2.2	Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan yang handal	DPUPR
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	
2.3	Meningkatnya sarana dan prasarana jaringan sumberdaya air	DPUPR
	Program Pembangunan Sumberdaya Air	
2.4	Meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	DPUPR
	Program Penataan Ruang	
2.5	Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	DPRKP
	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	
	Program Keciptakaryaan	
2.6	Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	DPRKP
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	
2.7	Meningkatnya Kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik	DINAS PERHUBUNGAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	
2.8	Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas	DINAS PERHUBUNGAN
	Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan	
2.9	Meningkatnya Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal	DINAS ESDM
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	
2.10	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai	DINAS KOMINFO
	Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	DINAS KOMINFO

3. Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Berkualitas

Program untuk mendukung misi ini adalah :

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
3	Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan dan Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing	SERETARIS DAERAH
3.1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	Asisten Kesejahteraan Rakyat
3.2	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	
3.3	Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja bagi Masyarakat	
3.4	Meningkatnya Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender)	
3.5	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus	DINDIKBUD
	Program Pendidikan Menengah Atas	
	Program Pendidikan Menengah Kejuruan	
	Program Pendidikan Khusus	
3.6	Terwujudnya pemuda wirausahawan baru dan Olah Raga yang berprestasi	DISPORA
	Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan	
3.7	Meningkatnya Pengarustamaan Gender	DP3AKB
	Program Pemberdayaan Perempuan	
3.8	Meningkatnya Budaya Literasi	DPAD
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	
3.9	Menurunnya PMKS	DINSOS
	Program Penangan Fakir Miskin	
3.10	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas	DISNAKERTRANS
	Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	

4. Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas

Program untuk mendukung misi ini adalah :

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
4	Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan	SEKRETARIS DAERAH
4.1	Meningkatnya Pelayanan kesehatan	Asisten Kesejahteraan Rakyat
4.2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses	DINKES
	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	
4.3	Meningkatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Tenaga Kesehatan	DINKES
	Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	
4.4	Meningkatnya Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	DINKES/ RSUD
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Banten	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Malingping	

5. Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Program untuk mendukung misi ini adalah :

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
5	Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasis Potensi Ekonomi Lokal	SEKRETARIS DAERAH
5.1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Asisten Ekonomi dan Pembangunan
5.2	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	
5.3	Meningkatnya Daya Saing Daerah	
5.4	Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon	
5.5	Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha	DINAS PMPTSP
	Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi	
5.6	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrian yang optimal	DINAS PERINDAG
	Program Peningkatan Daya Saing Industri	
5.7	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali	DINAS PERINDAG
	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	
	Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	
5.8	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian yang optimal	DINAS PERTANIAN
	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	
	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan	
	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	
5.9	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan yang optimal	DINA KELAUTAN DAN PEIKANAN
	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	
5.10	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah yang terjaga	DINAS KETAPANG
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	
5.11	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata yang optimal	DINAS PARIWISATA
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	
5.12	Meningkatnya Kualitas Koperasi	DISKOP UKM
	Program Pengembangan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	
5.13	Meningkatnya Usaha Kecil menjadi usaha menengah	DISKOP UKM
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	
5.14	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	DINAS LHK
	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	
5.15	Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	DINAS LHK
	Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan	
5.16	Meningkatnya Pengendalian, Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara yang efektif	DINAS ESDM
	Program pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi dan Air Tanah	

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara	
5.17	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	DISNAKERTRAN
	Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	

Arah kebijakan umum merupakan penjabaran lebih detil dari visi misi kepala daerah yang terdiri dari program pada setiap Perangkat Daerah dikelompokkan pada masing-masing urusan yang meliputi program dalam kerangka regulasi.

Program pembangunan daerah Provinsi Banten dituangkan dalam Tabel 6.7 berikut :

Tabel 6.7
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Banten 2017 – 2022
(Sebelum Perubahan)

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1			Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)														
1	1		Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	2,8	3.1		3.2			-		-		-		
1	1	1	Mewujudkan Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel	Capian LAKIP Provinsi Banten (Satuan: nilai)	CC	B		BB			-		-		-		Badan Penghubung, Setda, Set DPRD
30	1	1	Program Tata Kelola Pemerintahan				123,936,883,181			124,256,575,404		-		-		-	Badan Penghubung, Setda, Set DPRD
				Nilai IKM (Satuan: skala)	2.5	2.8		3			-		-		-		
30	1	1	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan				1,864,417,500			1,864,417,500		-		-		-	Biro Organisasi
				Persentase OPD yang memiliki nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah B (Satuan: %)	10	30		50			-		-		-		
1	1	2	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP		WTP			-		-		-		BPKAD
30	4	16	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				5,457,470,000			5,786,470,000		-		-		-	BPKAD Bidang Perbendaharaan dan Anggaran

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)			Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1			2			3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
									75	80			85		-		-		-		-		
1	1	3	Penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas dari korupsi	Capaian Maturitas SPIP (Satuan: Nilai)	2	2	3					-		-		-		-		-		Inspektorat	
30	2	15	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				12,472,800,000			12,722,200,000		-		-		-		-		-		Inspektorat	
				Capaian Nilai SAKIP (Satuan: %)	55	75		75				-		-		-		-		-			
				Indek Integritas (Satuan: poin)	72.48	73.48		74.48				-		-		-		-		-			
				Capaian Leveling Maturitas SPIP (Satuan: nilai)	2	2		3				-		-		-		-		-			
				Capaian OPINI Laporan Keuangan (Satuan: opini)	100	100		100				-		-		-		-		-			
1	1	4	Pelayanan Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi dan keterbukan Informasi	Persentase Pelayanan e-Government Pemerintah Provinsi Banten (Satuan: %)	20	42.1		61.83				-		-		-		-		-		Diskominfo	
				Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Satuan: Nilai)	88,08	88,08		89				-		-		-		-		-			
12	10	15	Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi				7,689,600,000			7,843,400,000		-		-		-		-		-		Diskominfo	
				Persentase ketersediaan perangkat TI (Satuan: %)	12.14	30.26		48.38				-		-		-		-		-			
12	15	15	Program Tata Kelola Persandian				1,157,600,000			1,180,700,000		-		-		-		-		-		Diskominfo	
				Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Persandian dan Keamanan Informasi (Satuan: %)	10	20		40				-		-		-		-		-			

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	5	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah (Satuan: %)	60	65		70		-		-		-		-		Bappeda
30	3	15	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan				8,802,029,600		8,993,329,600		-		-		-		-	Bidang P4
				Persentase dokumen perencanaan RPJPD, RTRW dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Satuan: %)	100	100		0		-		-		-		-		
				Persentase Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Satuan: %)	100	100		100		-		-		-		-		
				Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (Satuan: %)	70	80		85		-		-		-		-		
				Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (Satuan: %)	50	70		75		-		-		-		-		
12	14	1	Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah				2,464,000,000		2,513,300,000		-		-		-		-	Bappeda, Diskominfo
				Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi (Satuan: %)	30	50		60		-		-		-		-		
1	1	5	Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Cakupan Penelitian dan pengembangan (Satuan: %)	50	100		100		-		-		-		-		
30	7	15	Program Penelitian dan Pengembangan				4,977,900,000		5,077,500,000		-		-		-		-	Bappeda
				Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan (Satuan: %)	30	50		60		-		-		-		-		
				Persentase inovasi yang diadopsi (Satuan: %)	30	50		60		-		-		-		-		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	6	Terwujudnya Profesionalisme aparatur	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN (Satuan: %)	5	10		15		-		-		-		-			BKD
30	5	15	Program Penatausahaan Kepegawaian Daerah				4,359,073,000		4,459,073,000		-		-		-		-		BKD
				Prosentase pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan (Satuan: %)	0	85		90		-		-		-		-			
				Prosentase pegawai yang tidak melanggar kode etik dan disiplin pegawai (Satuan: %)	0	85		90		-		-		-		-			
				Prosentase akurasi data kepegawaian (Satuan: %)	0	85		90		-		-		-		-			
1	1	7	Terwujudnya Kompetensi Aparatur	Persentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN (Satuan: %)	5	10		15		-		-		-		-			BPSDM
30	6	15	Program Pengembangan SDM Aparatur				18,706,934,000		18,906,934,000		-		-		-		-		BPSDM
				Rasio peserta Diklat kepemimpinan dan prajabatan, manajemen dan pemerintahan yang lulus berkategori baik (Satuan: %)	70	80		85		-		-		-		-			
				Rasio peserta Diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional yang lulus berkategori baik (Satuan: %)	70	80		85		-		-		-		-			
1	1	8	Pendapatan Daerah yang Optimal	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah (Satuan: %)	62.89	59.3		60.62		-		-		-		-			Bapenda
30	4	15	Program Peningkatan Pendapatan Daerah				9,808,953,400		10,108,953,400		-		-		-		-		Bapenda
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah (Satuan: %)	55.6	57.58		58.94		-		-		-		-			

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)			Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD						
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1			2			3			4	5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		
						Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain terhadap Pendapatan Daerah (Satuan: %)	44.4	42.42		41.06		-		-		-		-		-		-				
1	1	9	Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif			Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah (Satuan: %)	70,00	75		75		-		-		-		-		-		-			Satpolpp	
11	5	15	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah						850,000,000		900,000,000	-		-		-		-		-		-		-	Satpolpp	
						Presentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah (Satuan: %)	70	75		75		-		-		-		-		-		-				
1	1	10	Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI			Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten (Satuan: %)	68.46	70		74		-		-		-		-		-		-			Badan Kesbangpol	
						Angka Kriminalitas (Satuan: Jumlah)	5,002.00	4,800.00		4,500.00				-		-		-		-		-			Badan Kesbangpol	
11	5	17	Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan						2,909,968,000		3,000,000,000		-		-		-		-		-		-		Badan Kesbangpol	
						Angka Partisipasi Pilleg (Satuan: %)	70.83	0		73		-		-		-		-		-		-				
						Angka Partisipasi Pilgub (Satuan: %)	63	0		0		-		-		-		-		-		-				
1	1	11	Sistem Penanggulangan Kebencanaan yang efektif			Indeks Resiko Bencana (Satuan: Nilai)	133	133		125		-		-		-		-		-		-			BPBD	
11	5	16	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana						3,570,445,500		4,141,528,000		-		-		-		-		-		-		BPBD	
						Cakupan mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana (Satuan: %)	100	100		100		-		-		-		-		-		-				

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	1	12	Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel	Capaian Tertib Administrasi Kependudukan (Satuan: %)	50	80	80		-		-		-		-		DP3AKKB
12	6	15	Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil			880,000,000		897,600,000		-		-		-		-	DP3AKKB
				Rasio bayi berakte kelahiran (Satuan: %)	60	64.86	67.38		-		-		-		-		
				Rasio Pasangan berakte nikah (Satuan: %)	20	23.33	30.81		-		-		-		-		
				Rasio kepemilikan KTP-el dan NIK (Satuan: %)	80	85.76	86.47		-		-		-		-		
				Rasio kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (Satuan: %)	77	79.19	80.99		-		-		-		-		
				Cakupan data dan informasi kependudukan (Satuan: %)	80	85	100		-		-		-		-		
1	1	13	Terwujudnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Capaian Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD	100	100	100		-		-		-		-		Set DPRD
30	1	15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			135,757,270,500		136,075,787,950		-		-		-		-	Set DPRD
				Capaian % Kinerja Fungsi DPRD (Satuan: %)	0	100	100		-		-		-		-		
				Rasio Ketersediaan Prasarana dan Sarana Perkantoran dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur (Satuan: %)	0	100	100		-		-		-		-		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Capaian % Pelayanan Keprotokolan, kehumasan dan dukungan pelaksanaan kegiatan Reses DPRD (Satuan: %)	0	100		100		-		-		-		-		
1	1	15	Pelayanan Publik Yang berkualitas	Capaian Pelayanan Publik	100	100		100		-		-		-		-			Badan Penghubung
30	1	16	Program Pembangunan Kemitraan				1,832,777,319		1,933,167,646		-		-		-		-		Badan Penghubung
				Cakupan koordinasi Badan Penghubung Terhadap Mitra Strategis (Satuan: %)	0	100		100		-		-		-		-			
2			Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur																
2	1		Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah	Capien kinerja infrastruktur daerah	50	100		100		-		-		-		-			
2	1	1	Infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas	Tingkat Kemantapan Jalan	78,98	87.43		89		-		-		-		-			DPUPR
11	3	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				1,282,251,405,200		1,292,239,705,200		-		-		-		-		DPUPR
				Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan: %)	74.45	79.56		84.67		-		-		-		-			
				Persentase Jalan Provinsi Yang Memenuhi Standar Teknis (Satuan: %)	26.6	27.2		28.99		-		-		-		-			
				Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan: %)	83	86.3		89.7		-		-		-		-			
2	1	5	Penanggulangan Banjir dan Abrasi, serta Ketersediaan Air Baku	Persentase pemulihan dan pencegahan banjir	15,51	20.89		26.27		-		-		-		-			DPUPR

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Pemenuhan tingkat layanan irigasi	15.118,50	15,333		16,722		-		-		-		-		
11	3	17	Program Pembangunan Sumberdaya Air				148,491,294,800		148,491,294,800		-		-		-		-	DPUPR
				Cakupan pemulihan dan pencegahan banjir(Satuan:)	15.51	20.89		26.27		-		-		-		-		
				Luas Layanan Jaringan Irigasi Teknis Provinsi (Satuan: ha)	15,118.50	15,332.98		16,721.78		-		-		-		-		
				Cakupan Pemulihan Pencegahan Abrasi (Satuan:%)	46.21	51.59		56.97		-		-		-		-		
2	1	2	Perencanaan dan Penataan ruang yang berkualitas	Persentase Kesesuaian Penggunaan Ruang sesuai dengan Tata Ruang	80	82.5		85		-		-		-		-		DPUPR
11	3	18	Program Penataan Ruang				4,920,000,000		4,920,000,000		-		-		-		-	DPUPR
				Persentase Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 8 Kawasan Strategis Provinsi(Satua%)	0	25		37.5		-		-		-		-		
2	1	3	Tersedianya Perumahan dan Pemukiman yang layak. Ketersediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, Pengelolaan Sampah regional	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	375.29	114.6		203.2		-		-		-		-		DPRKP
				Persentase Rumah Layak Huni (Satuan: Hektar)	82.86	84.02		85.18		-		-		-		-		DPRKP
				Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional (Satuan: %)	0	0		20		-		-		-		-		DPRKP
11	4	15	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan				87,434,896,540		89,954,896,540		-		-		-		-	DPRKP
				Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)	375.29	114.6		203.2		274.6		333.3		333.3		375.29		
				Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Satuan: %)	82.86	84.02		85.18		-		-		-		-		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	1	6	Sarana dan prasarana gedung Strategis Provinsi yang berkualitas	Persentase Gedung strategis Provinsi dalam kondisi baik	30	40		50		-		-		-		-			DPRKP
11	4	16	Program Pengembangan dan Penataan Pusat Pemerintahan				26,875,000,000		27,875,000,000		-		-		-		-		DPRKP
				persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)	0	25		50		-		-		-		-			
				persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: %)	0	28		69		-		-		-		-			
2	1	4	Terwujudnya keselamatan dan kenyamanan lalu lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	10	10		20		-		-		-		-			Dishub
12	9	15	Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan				4,642,000,000		4,742,000,000		-		-		-		-		Dishub
				Persentase regulasi dan pedoman standar pelayanan transportasi yang diterapkan (Satuan: %)	0	20		20		-		-		-		-			
				Persentase wilayah yang terlayani angkutan umum (Satuan: %)	0	0		0		-		-		-		-			
2	1	7	kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	0	10		20		-		-		-		-			Dishub
12	9	16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan				3,200,000,000		3,300,000,000		-		-		-		-		Dishub
				Persentase kebutuhan terminal type B yang sudah terpenuhi (Satuan: %)	0	0		0		-		-		-		-			
				Persentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas terhadap kebutuhan (Satuan: %)	10	10		20		-		-		-		-			

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase Pembangunan dan pemeliharaan dan prasarana perkeretaapian (Satuan: %)	0	10		20		-		-		-		-		
3			Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas															
3	1		Terwujudnya Akses dan kualitas pendidikan menuju kualitas sumber daya manusia yang berakhlakul karimah dan berdaya saing	Rata rata lama sekolah (Satuan: Tahun)	8.37	8.47		8.7		-		-		-		-		
3	1	1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	Rata rata lama sekolah	8.37	8.47		8.7		-		-		-		-		Dindikbud
				Harapan lama sekolah	12.7	13		13.5		-		-		-		-		Dindikbud
11	1	15	Program Pendidikan Menengah				724,856,659,000		746,599,800,000		-		-		-		-	Dindikbud
				Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah (Satuan: %)	71.13	72.9		74.67		-		-		-		-		
				Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah (Satuan: %)	57.21	58.77		60.33		-		-		-		-		
				Angka Putus Sekolah SMA (Satuan: Nilai)	0.25	0.22		0.19		-		-		-		-		
				Angka Putus Sekolah SMK (Satuan: Nilai)	0.5	0.44		0.38		-		-		-		-		
				Angka Kelulusan SMA (Satuan: %)	98.83	98.64		98.85		-		-		-		-		
				Angka Kelulusan SMK (Satuan: %)	99.87	99.89		99.9		-		-		-		-		
				Nilai Rata-rata Ujian SMA IPA (Satuan: %)	50.7	51.96		53.22		-		-		-		-		
				Nilai Rata-rata Ujian SMK (Satuan: %)	54.7	55.5		56.3		-		-		-		-		
				Nilai Rata-rata Ujian SMA IPS (Satuan: %)	47.6	48.68		49.76		-		-		-		-		
				Persentase SMK yang menerapkan link and match (Satuan: %)	10	17		34		-		-		-		-		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	1	16	Program Pendidikan Khusus				9,795,900,000		9,991,900,000		-		-		-		-	Dindikbud
				Cakupan Layanan Sekolah Khusus dan Layanan Khusus (Satuan: %)	15	17		34		-		-		-		-		
3	1	2	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan	Persentase pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah	30	100		100		-		-		-		-		Dindikbud
12	16	15	Program Pelestarian Kebudayaan				3,203,289,000		3,268,289,000		-		-		-		-	Dindikbud
				Persentase event yang mengangkat nilai budaya masyarakat Banten (Satuan: %)	70	85		90		-		-		-		-		
				Cakupan organisasi kesenian (pembinaan sanggar/ kelompok seni dan budaya) (Satuan: %)	70	85		90		-		-		-		-		
				Cakupan Apresiasi Seni dan Kreatifitas Karya Budaya (Satuan: %)	70	85		90		-		-		-		-		
				Cakupan Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah dan Warisan Budaya (Satuan: %)	70	85		90		-		-		-		-		
3	1	3	Terwujudnya pemuda wirausahawan baru dan Olah Raga yang berprestasi	Indeks Pembangunan Kepemudaan	10	10		20		-		-		-		-		Dispora
				Indeks Pembangunan Olahraga	10	10		20		-		-		-		-		Dispora
12	13	15	Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan				3,950,000,000		4,050,000,000		-		-		-		-	Dispora
				Cakupan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda Mandiri (Satuan: %)	70	75		80		-		-		-		-		
				Persentase Pemuda Wirausahawan Baru yang difasilitasi (Satuan: %)	0	75		80		-		-		-		-		

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	1	3	16	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Olah Raga				5,574,835,000		5,665,135,000		-		-		-		-	Dispora
					Cakupan Ketercukupan Fasilitas Olahraga (Satuan: %)	50	70		75		-		-		-		-		
3	1	4		Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender) dan PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak) yang berkualitas	Indeks pembangunan gender (IPD)	91.39	91.67		91.95		-		-		-		-		DP3AKKB
					Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68.74	69.54		70.34		-		-		-		-		
12	2	15		Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera				3,806,605,000		3,856,605,000		-		-		-		-	DP3AKKB
					Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak (Satuan: %)	50	60		63.33		-		-		-		-		
					Cakupan Perencanaan Responsif Gender (Satuan: %)	50	50		55		-		-		-		-		
					asio Partisipasi perempuan di lembaga legislatif, swasta dan pemerintah (Satuan: %)	58.72	58.72		62.27		-		-		-		-		
					Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki Lembaga Sadar Gender (Satuan: %)	70	75		75		-		-		-		-		
					Indek Ketahan Keluarga (Satuan: %)	65.19	66.66		67.62		-		-		-		-		
3	1	5		Minat Baca Masyarakat yang meningkat	Persentase peningkatan minat baca masyarakat	25.1	30		35		-		-		-		-		DPAD
12	1	7	15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				3,479,100,000		3,549,100,000		-		-		-		-	DPAD
					Cakupan pembinaan perpustakaan Umum dan perpustakaan khusus (Satuan:%)	75	85		90		-		-		-		-		
3	1	6		Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas	Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Katentuan Kearsipan	70	80		85		-		-		-		-		DPAD

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	1	8	15	Program Pengelolaan Sistem Kearsipan				3,250,800,000		3,315,800,000		-		-		-		-	DPAD
					Persentase Digitalisasi Arsip Statis Daerah (Satuan: %)	70	80		85		-		-		-		-		
					Persentase Digitalisasi Arsip Dinamis Daerah (Satuan: %)	70	80		85		-		-		-		-		
					Persentase Pengelolaan Arsip OPD sesuai Standar (Satuan: %)	70	85		90		-		-		-		-		
4				Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas															
4	1			Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	69.46	69.76		70.06		-		-		-		-		
4	1	1		Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses	Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran hidup)	32	31		30		-		-		-		-		DINKES
					Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)	308	304		300		-		-		-		-		DINKES
11	2	15		Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat				1.711.000.000		2.075.000.000		-		-		-		-	DINKES
					Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (Satuan: %)	45	65		81		-		-		-		-		
					Persentase balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani (Satuan: %)	100	100		100		-		-		-		-		
					Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program kesehatan masyarakat (Satuan: %)	50	55		60		-		-		-		-		
4	1	2		Keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	75	100		100		-		-		-		-		DINKES
11	2	16		Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan				128.581.505.000		132.300.000.000		-		-		-		-	DINKES

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				75	90		100		-		-		-		-		
				45	65		81		-		-		-		-		
				10	20		35		-		-		-		-		
				0	20		30		-		-		-		-		
4	1	3	Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	Angka Harapan Hidup	69.46	69.76	70.06		-		-		-		-		DINKES
11	2	17	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan			118.901.451.886		146.306.978.140		-		-		-		-	DINKES/RSUD
				70	70		70		-		-		-		-		
				88	88		88		-		-		-		-		
				70	70		75		-		-		-		-		
				50	60		70		-		-		-		-		
				30	40		50		-		-		-		-		
				50	60		70		-		-		-		-		
4	1	4	Laju Pertumbuhan Penduduk yang terkendali	Laju pertumbuhan penduduk	2.01	1.96	1.91		-		-		-		-		DP3AKKB

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	8	15	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana			2,467,400,000		2,516,700,000		-		-		-		-	DP3AKKB
			Angka kelahiran total (total fertility rate/ TFR) per WUS (15-49 tahun) (Satuan: Jumlah)	2.4	2.33		2.29		-		-		-		-		
			Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/ CPR) (Satuan: %)	59	60.9		61		-		-		-		-		
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (Satuan: %)	10.3	10.26		10.18		-		-		-		-		
			Tingkat putus pakai kontrasepsi (Satuan: %)	2.6	2.53		25.18		-		-		-		-		
5			Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi														
5	1		Meningkatnya perekonomian banten melalui kualitas pengelolaan keuangan , Kecukupan pangan dan energi, pengembangan sumber daya alam yang memberikan solusi terhadap pengangguran dan kemiskinan	LPE	5.7	6	6.2		-		-		-		-		
			TPT	8.69	8.45		8.2		-		-		-		-		
			Kemiskinan	5.25	5.13		5		-		-		-		-		
			Inflasi	4	3.7		4.2		-		-		-		-		
5	1	1	Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Nilai Investasi	52.3	56.4	60.8		-		-		-		-		DPMP TSP
			Indeks Kepuasan Pelayanan Investor	82.16	83.62		85.22		-		-		-		-		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	1	15	Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi				4,700,515,000		4,700,515,000		-		-		-		-		DPMPTSP
					Nilai Realisasi Investasi PMDN (Satuan: triliyun)	12.4	15		17.5		-		-		-		-		
					Nilai Realisasi Investasi PMA (Satuan: triliyun)	39.9	43		47		-		-		-		-		
5	1	2	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrian yang optimal		LPE Sektor Perindustrian	3.05	3.7		3.95		-		-		-		-		Disperindag
20	7	15	Program Peningkatan Daya Saing Industri				2,593,200,000		2,593,200,000		-		-		-		-		Disperindag
					Persentase Struktur Industri pada Industri Unggulan Daerah Yang Mendapatkan Fasilitas Penguatan (Satuan: %)	0	20		20		-		-		-		-		
					Persentase Kerjasama SDM Berkompetensi Industri yang Aktif (Satuan: %)	0	20		20		-		-		-		-		
					Rasio Pertumbuhan industri kreatif (Satuan: %)	0	20		20		-		-		-		-		
5	1	3	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali		Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Penting	4.19	4		4		-		-		-		-		Disperindag
					LPE Sektor Perdagangan	3.82	4.9		5.4		-		-		-		-		Disperindag
20	6	15	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri				106,217,259,850		56,375,459,850		-		-		-		-		Disperindag
					Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu dan Wilayah (Satuan: %)	0	5		5		-		-		-		-		
					Pertumbuhan Omset Pedagang (Satuan: %)	5	10		12		-		-		-		-		
					capaian stabilitas harga barang pokok (Satuan: %)	6.93	5		5		-		-		-		-		
					Neraca ketersediaan barang pokok (Satuan: %)	100	100		100		-		-		-		-		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri			1,292,573,000		1,292,573,000		-		-		-		-	Disperindag
				Surplus Neraca Perdagangan (Satuan: Juta USD)	2828.83	2,970.27		3,118.79		-		-		-		-	
5	1	4	Pertumbuhan Sektor Perikanan yang optimal	Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan Terhadap PDRB	4,48	4,55		4.67		-		-		-		-	DKP
20	1	15	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap			12,248,733,825		12,248,733,825		-		-		-		-	DKP
				Persentase Produksi Perikanan (Satuan: %)	7.49	8.01		8.08		-		-		-		-	
5	1	5	Ketahanan Pangan Daerah yang terjaga	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	82.4	89.2		90.6		-		-		-		-	Dinas Ketapang
12	3	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan			3,298,272,500		3,491,172,500		-		-		-		-	Dinas Ketapang
				Ketersediaan pangan (Satuan: %)	93.9	95.1		96.3		-		-		-		-	
5	1	6	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata yang optimal	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	2.84	2.89		2.94		-		-		-		-	DISPAR
20	2	15	Program Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			2,650,000,000		2,750,000,000		-		-		-		-	DISPAR
				Jumlah Pusat Sentra Ekonomi Kreatif (Satuan: Lokasi)	2	1		1		1		1		1		5	
20	2	16	Program Pemasaran Produk Pariwisata			6,475,000,000		6,587,900,000		-		-		-		-	DISPAR
				Jumlah Kunjungan Wisatawan (Satuan: Orang)	14,705,763	15,146,936		15,601,344		-		-		-		-	
				Rata-Rata Lama Kunjungan (Satuan: Hari)	1.33	1.36		1.39		-		-		-		-	
				Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan (Satuan: Rp)	3,634,490	3,743,525		3,852,216		-		-		-		-	
5	1	7	Kelembagaan Koperasi yang aktif dan sehat	Persentase Peningkatan Kualitas kelembagaan Omset Koperasi	0	6		6		-		-		-		-	Dinas KUKM

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	1	1	16	Program Peningkatan Kualitas Usaha dan pemberdayaan Koperasi				4,244,190,500		4,244,190,500		-		-		-		-	Dinas KUKM
				Persentase Koperasi yang Bankable (Satuan: %)		0	6		6		-		-		-		-		
5	1	8		koperasi dan Usaha Kecil yang berdaya	Persentase Peningkatan Aset dan Omset Usaha Kecil	0	1		1		-		-		-		-		Dinas KUKM
12	1	1	15	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil				4,635,352,000		4,735,352,000		-		-		-		-	Dinas KUKM
				Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan Dunia Usaha lain (Satuan: %)		0	1		1		-		-		-		-		
5	1	9		Menurunnya PMKS	Persentase Penanganan Jumlah PMKS	8.24	4.49		3.89		-		-		-		-		DINSOS
					Index Gini	0.39	0.39		0.39		-		-		-		-		
11	6	15		Program Rehabilitasi Sosial				1,764,850,000		1,764,850,000		-		-		-		-	DINSOS
					Cakupan PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial (Satuan: Orang)	1429	573		608		-		-		-		-		
5	1	10		Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal	Rasio elektrifikasi	95.64	97		98		-		-		-		-		Dinas ESDM
20	5	16		Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan				15,427,130,000		15,427,130,000		-		-		-		-	Dinas ESDM
					Cakupan Pelayanan Listrik Perdesaan (Satuan: Rumah Tangga)	10,000.00	10,000		10,000		-		-		-		-		
5	1	11		Pengendalian, pengawasan dan perijinan Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara yang efektif	Pertumbuhan Sektor Sumber Daya Mineral	12	12.5		13		-		-		-		-		Dinas ESDM
20	5	15		Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara				4,129,442,000		4,293,642,000		-		-		-		-	Dinas ESDM

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Prosentase pelaksanaan pengawasan dan Rekomendasi perijinan (Satuan: %)	60	65	70		-		-		-		-		
				Presentase Badan Usaha Pertambangan yang memenuhi Standar (Satuan: %)	37.67	41.1	44.52		-		-		-		-		
5	1	12	Desa Tertinggal yang berkembang dan mandiri	Persentase Desa Mandiri	14	16.4	18.8		-		-		-		-		Dinas PMD
12	7	15	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa				4,031,500,000		4,131,500,000		-		-		-		Dinas PMD
				Cakupan Desa Tertinggal menjadi Berkembang (Satuan: Desa)	158	2	2		-		-		-		-		
				Cakupan Desa Berkembang menjadi Mandiri (Satuan: Desa)	1022	2	2		-		-		-		-		
5	1	13	Tersedianya Lapangan Kerja bagi Masyarakat	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	58.06	59.06	60.06		-		-		-		-		Disnakertrans
12	1	15	Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja				5,831,730,000		5,831,730,000		-		-		-		Disnakertrans
				Capaian Produktivitas Tenaga Kerja (Satuan: %)	4.31	4.35	4.4		-		-		-		-		
5	1	14	Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	43.67	44.17	44.67		-		-		-		-		DLHK
12	5	15	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup				13,142,300,000		13,405,100,000		-		-		-		DLHK
				Indeks Kualitas Air (Satuan: Nilai)	51	51.5	52		-		-		-		-		
				Indeks Kualitas Udara (Satuan: Nilai)	58.8	59	59.2		-		-		-		-		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)			Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1			2			3			4	5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	
								Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Satuan: Kelompok/Lembaga)	203	52			60			-		-		-		-			
5	1	15	Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal			Rasio Cakupan Tutupan Hutan			30.6	31.21			31.71			-		-		-		-			DLHK
20	4	15	Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan								7,744,000,000			7,898,900,000			-		-		-		-	DLHK	
						Luas Lahan kritis yang terehabilitasi (Satuan: Hektar)			69,466.00	5,000.00			5,000			-		-		-		-			
						Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat (Satuan: %)			38	10			10			-		-		-		-			
5	1	16	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian yang optimal			Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRD			7.05	5.3			5.6			-		-		-		-			DISTAN
20	3	15	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan								6,104,225,000			6,104,225,000			-		-		-		-	DISTAN	
						Capaian Produktivitas Tanaman Padi (Satuan: Ton/Ha)			55.68	57.35			59.07			-		-		-		-			
						Capaian Produksi Tanaman Padi (Satuan: Ton)			2,396,688	2,408,671			2,420,714			-		-		-		-			
						Capaian Produksi Tanaman Jagung (Satuan: Ton)			20,551.00	21,579.00			22,657			-		-		-		-			
						Capaian Produksi Tanaman Kedelai (Satuan: Ton)			6,801.00	7,141.05			7,498.10			-		-		-		-			

Tabel 6.8
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Banten 2017 – 2022
(Setelah Perubahan)

Kode			TUJUAN/SASARAN/PROGRA M	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggun g Jawab		
						2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp	
1			2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1			Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)																	
1	1		Tujuan : Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompentensi serta melayani masyarkat	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	2.8	3.1		3.2		3.3		3.4		3.5		3.5			
1	1	1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	Nilai	CC	B		BB		BB		A		A		A		ASISTEN PEMERINTA HAN	
				Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	CC	B		BB		BB		A		A		A			
				Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	CC	B		BB		BB		A		A		A		Seluruh OPD	
300	011		Program Tata Kelola Pemerintahan Seluruh OPD					971,947,431,712		834,409,220,624		972,711,110,503		963,299,156,300		890,479,306,700		4,632,846,225,839	Seluruh OPD	
				Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	%	0.00	0.00		0.00		100		100		100		100			

Kode				TUJUAN/SASARAN/PROGRA M	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggun g Jawab																																															
							2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD																																																	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp																																																
1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17			
					Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	%	0.00	0.00			0.00			100			100			100			100			100			100			100																																			
					Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	0.00	0.00			0.00			100			100			100			100			100			100																																						
					Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	0.00	0.00			0.00			100			100			100			100			100			100																																						
1	1	4		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP	WTP			WTP			WTP			WTP			WTP			WTP			WTP			WTP							BPKAD																															
3 0	0 4	1 6		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					1,150,276,600.00		2,263,079,200.00		1,732,702,000.00		2,353,610,000.00		2,353,610,000.00		2,353,610,000.00												9,853,277,800.00																																				
					Persentase Kepatuhan OPD terhadap Peraturan Perundang- undangan di Bidang Keuangan	%	75	80			85			90			95			100			100			100			100																																						
3 0	0 4	1 8		Program Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah					1,204,452,000.00		1,787,890,500.00		918,359,000.00		1,859,410,000.00		1,859,410,000.00		1,859,410,000.00												7,629,521,500.00																																				

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
				2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
30	04	19																
1	1	5																
30	02	15																

Kode				TUJUAN/SASARAN/PROGRA M	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggun g Jawab			
								2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp	target	Rp
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Pemberantasan Korupsi																
					Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI	%	0,00	0,00		0,00		100,0 0		100,0 0		100,00		100,00			
					Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	%	0,00	0,00		0,00		100,0 0		100,0 0		100,00		100,00			
					Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	%	0,00	0,00		0,00		100,0 0		100,0 0		100,00		100,00			
1	1	6	Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	%	60,00	65		70		75		80		80		80			BAPPEDA	
				Penilaian Perencanaan, Pengukuran, pelaporan dan capaian kinerja	Nilai	CC	B		BB		BB		A		A		A				
3 0	0 3	1 5	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan					4,716,741,600.00		8,457,524,000.00		6,816,010,000.00		8,795,830,000.00		8,795,830,000.00		37,581,935,600.00			
				Persentase dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Satuan: %)	%	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00				
				Persentase Dokumen Perencanaan : RKP yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Satuan: %)	%	100,00	100,00		100,0 0		100,0 0		100,0 0		100,00		100,00				

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	
				2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					70,00	80,00		85,00		0,00		0,00		0,00		85,00		
					50,00	70,00		75,00		0,00		0,00		0,00		75,00		
					0,00	0,00		0,00		75,00		80,00		85,00		85,00		
					0,00	0,00		0,00		4.000 .000. 000,0 0		5.000 .000. 000,0 0		6.000. 000.00 0,00		15.000. 000.00 0,00		
1	1	7	Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Cakupan Penelitian dan Pengembangan	%	50	100		100		100		100		100		100	BAPPEDA
30	07	15	Program Penelitian dan Pengembangan				6,020,531,200.00		7,306,303,000.00		4,142,810,000.00		7,598,560,000.00		7,598,560,000.00		32,666,764,200.00	
				Meningkatnya hasil penelitian yang dimanfaatkan	%	30,00	50,00		60,00		75,00		80,00		80,00		80,00	
				Meningkatnya inovasi yang diadopsi	%	30,00	50,00		60,00		75,00		80,00		100,00		100,00	
1	1	8	Meningkatnya Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan secara elektronik	Maturitas SIPD	%				70		75		80		80			Bappeda
12	14	02	Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah				457,450,000.00		900,000,000.00		263,840,000.00		936,000,000.00		936,000,000.00		3,493,290,000.00	
				Terpenuhinya Kebutuhan Data untuk Perencanaan	%	0,00	0,00		0,00		70,00		80,00		90,00		90,00	

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M			Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggun g Jawab													
							2017	2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD												
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp											
1				2			3				4	5	6		7	8		9	10		11	12		13	14		15	16		17	
				Pembangunan Sesuai SIPD																											
1	1	9	Terwujudnya Kompetensi Aparatur	Persentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN	%	10.00	10.00		15.00		20.00		25.00		30.00		30.00														BPSDM
3 0	0 6	1 7	Program Pengembangan SDM Aparatur Kompetensi Teknis dan Fungsional					0.00		0.00		2,486,874,000.00		3,523,245,000.00		3,523,245,000.00		9,533,364,000.00													
				Rasio peserta Diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional yang lulus berkategori baik	%	0.00	0.00		0.00		90,00		95,00		100,00		100,00														
3 0	0 6	1 8	Program Pengembangan SDM Aparatur Kompetensi Manajerial dan Pemerintahan					0.00		0.00		14,035,374,000.00		19,884,425,000.00		19,884,425,000.00		53,804,224,000.00													
				Rasio peserta Diklat kepemimpinan dan prajabatan, manajemen dan pemerintahan yang lulus berkategori baik	%	0.00	0.00		0.00		90,00		95,00		100,00		100,00														
1	1	1 0	Terwujudnya Profesionalisme aparatur	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	%	70	75		80		85		90		95		95														BKD
3 0	0 5	1 6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					3,827,180,000.00		3,688,260,000.00		3,019,138,000.00		3,835,800,000.00		3,835,800,000.00		18,206,178,000.00													
				Persentase penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya	%	70,00	85,00		90,00		0,00		0,00		0,00		90,00														
				Persentase tingkat pencapaian kualifikasi pendidikan	%	0,00	0,00		0,00		85,00		90,00		95,00		95,00														

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M			Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggun g Jawab											
						2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD												
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp										
1				2			3			4	5	6		7	8		9	10		11	12		13	14		15	16		17
					Persentase Peningkatan Kompentensi Pegawai melalui Pegembangan Kompetensi	%	0,00	0,00		0,00		85,00		90,00		95,00		95,00											
1	1	1	1	Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Optimal	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah (%)	%	62.89	59.30		60.62		61.91		63.19		64.44		64.44											Bapenda
3 0	0 4	2 0		Proram Peningkatan Pajak Daerah					0.00		0.00		24,390,798,200		22,204,720,000		22,204,720,000									68,800,238,200.00			
					Persentase Peningkatan Pajak Daerah	%	0,00	0,00		0,00		8,00		8,00		8,00		8,00											
					Persentase Potensi Tunggakan Pajak Daerah yang dapat diselesaikan	%	2,36	0.00		0.00		17,56		18,10		18,64		18,64											
3 0	0 4	2 1		Proram Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain					0.00		0.00		1,050,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000									3,050,000,000.00			
					Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	%	0,00	0,00		0,00		2.95		2.95		2.96		2.96											
1	1	1	2	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah	%	70,00	75		75		80		80		85		85										Satpol PP	
1 1	0 5	1 5		Program Ketentraman dan Ketertiban Umum					3,354,000,000.00		2,100,000,000.00		2,262,363,000.00		2,184,000,000.00		2,184,000,000.00									12,084,363,000.00			
					cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi	%	100	100		100		100		100		100		100											

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M			Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	
						2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	2			3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	1	3	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten	Nilai	68,46	70		74		76		78		80		80	Badan Kesbangpol
					Penanganan konflik masyarakat	%	100	0.00		0.00		100		100		100		100	
1	1	0	1	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional					1,197,156,000.00		1,060,000,000.00		1,150,000,000.00		1,102,400,000.00		1,102,400,000.00	5,611,956,000.00	
					Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dalam Mendukung Stabilitas Daerah	%	0,00	0,00		0,00		100,0 0		100,0 0		100,00		100,00	
1	1	1	4	Meningkatnya Penanggulangan Kebencanaan yang efektif	Indeks Resiko Bencana	Nilai	133,00	133		125		120		115		110		110	BPBD
1	1	0	1	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana					1,458,883,000.00		1,175,160,000.00		2,048,760,000.00		1,222,170,000.00		1,222,170,000.00	7,127,143,000.00	
					Indek Ketahanan Daerah	%	0,00	0,00		0,00		0,42		0,53		0,65		0,65	
1	1	2	3	Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi dan keterbukan Informasi	Persentase Sarana dan Prasarana Persandian	%	0.00	0.00		0.00		100		100		100		100	Diskominfo
					Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	88,08	88.08		89		89.55		90		90		90	
1	2	1	1	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik					18,879,736,400.0 0		13,144,748,000.00		11,662,000,000.00		13,670,540,000.0 0		13,670,540,000.00	71,027,564,400.00	
					Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	%	10,00	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00	

Kode			TUJUAN/SASARAN/PROGRA M	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggun g Jawab				
							2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp	target	Rp	
1			2		3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2					Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur																
2	1		Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah	Capaian kinerja infrastruktur daerah	%	50	100		100		100		100		100		100		100	SEKRETARIS DAERAH	
2	1	1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah	Persentase Pembangunan dan Penanganan Infrastruktur	%	50	60		70		80		85		90		90			Asisten Ekonomi dan Pembangunan	
2	1	2	Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan yang handal	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	74.45	0.00		0.00		100		100		100		100			DPUPR	
				Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	83	0.00		0.00		93.5		95.9		100		100				
11	03	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan					803,919,019,223		947,142,635,132		511,896,479,600		691,693,630,000		724,141,190,000		3,678,792,953,955			
				Persentase Jalan dan Jembatan Provinsi Yang Memenuhi Standar Teknis (min perkerasan 7 m)	%	46,75	0,00		0,00		64,94		67,53		71,43		71,43				
				Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	74,45	79,56		84,67		100,00		100,00		100,00		100,00				
				Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	83,00	86,30		89,70		93,50		95,90		100,00		100,00				

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M			Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggun g Jawab		
							2017	2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2			3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Persentase Penyelesaian Jalan Baru (15 Km)	%	0,00	0,00		0,00		10,00		35,00		55,00		100,00			
2	1	3	Meningkatnya sarana dan prasarana jaringan sumberdaya air	Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi	%	15,51	0.00		0.00		32.65		37.09		42.42		42.42		DPUPR	
				Persentase layanan irigasi	Ha	15.118,5	0.00		0.00		18.11 0.58		19.38 7.46		20.888 .19		20.888. 19			
				Persentase penyediaan prasarana air baku	%	0.00	0.00		0.00		100		100		100		100			
1 1	0 3	1 7	Program Pembangunan Sumberdaya Air					179,949,467,170. 00		173,618,060,200.0 0		117,492,300,000.0 0		118,976,000,000. 00		123,735,040,000.0 0		713,770,867,370		
				Luas Layanan Jaringan Irigasi Teknis Provinsi	Ha	15.118,5 0	15.332 ,98		16.72 1,78		18.11 0,58		19.38 7,46		20.888 ,19		20.888, 19			
				Cakupan Pemulihan Pencegahan Abrasi	%	46,21	51,59		56,97		62,56		68,06		73,56		73,56			
				Cakupan Pemulihan Pencegahan banjir	%	15,51	20,89		26,27		31,89		37,39		42,89		42,89			
2	1	4	Meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	80.00	0.00		0.00		87.50		90.00		92.50		92.50		DPUPR	
1 1	0 3	1 8	Program Penataan Ruang					5,240,233,500.00		5,411,717,600.00		4,892,240,000.00		6,032,000,000.00		6,240,000,000.00		27,816,191,100		
				Persentase Tersusunnya Perda Rencana Tata Ruang (RTR) pada 8 Kawasan Strategis Provinsi	%	0,00	0,00		0,00		62,50		75,00		100,00		100,00			
				Presentase Kesesuaian Pembinaan Pemanfaatan Ruang	%	0,00	0,00		0,00		100,0 0		100,0 0		100,00		100,00			

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M			Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	
						2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	2			3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	1	5	Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	Ha	375.29	114.60		203.20		274.60		333.30		375.29		375.29		DPRKP
				Persentase Rumah Layak Huni	%	82.86	84.02		85.18		86.34		87.50		88.66		88.66		
				cakupan penyediaan pengelolaan sampah	%	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		80.00		
11	04	15	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan					192,116,720,475.00		112,362,260,000.00		116,771,150,000.00		104,000,000,000.00		108,160,000,000.00		633,410,130,475	
				Luas Kawasan Kumuh yang ditata	Ha	375,29	114,60		203,20		274,60		333,30		333,30		333,30		
				cakupan penyediaan perumahan dan PSU permukiman	%	0,00	0,00		0,00		33,33		33,33		33,33		100,00		
				Cakupan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Relokasi Korban Provinsi	%	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
11	04	17	Program Keciptakaryaan					46,440,619,695.00		119,434,000,000.00		54,535,380,000.00		62,400,000,000.00		62,400,000,000.00		345,209,999,695	
				Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum	%	0,00	0,00		0,00		81,24		88,04		96,53		96,53		
				cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional	%	0,00	0,00		0,00		20,00		20,00		20,00		20,00		
				Cakupan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kab/Kota	%	0,00	0,00		0,00		5,00		15,00		100,00		100,00		

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM			Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2017	2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2			3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	1	6	Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	%	0.00	0.00		0.00		75.00		88.00		100.00		100.00		DPRKP	
1	0	1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan					175,609,091,130.00		263,596,440,000.00		752,040,600,000.00		422,719,750,000.00		124,592,410,000.00		1,738,558,291,130		
				Persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi	%	0.00	28.00		69.00		83.00		89.00		100.00		100.00			
				Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)	%	0,00	25,00		50,00		75,00		88,00		100,00		100,00			
				Persentase penyelenggaraan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)	%	0,00	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
2	1	8	Meningkatnya Kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	%	0	10		20		20		20		20		90		Dinas Perhubungan	
1	0	1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan					5,249,682,527.00		11,690,000,000.00		5,936,900,000.00		11,157,600,000		11,157,600,000.00		45,191,782,527		
				Persentase Pemenuhan kebutuhan angkutan massal	%	0,00	0,00		0,00		10,00		10,00		10,00		30,00			
				Persentase ketersediaan dan	%	0,00	0,00		0,00		30,77		30,77		38,46		100,00			

Kode				TUJUAN/SASARAN/PROGRA M	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggun g Jawab			
								2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp	target	Rp
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					pemeliharaan Prasarana Transportasi																
					Persentase Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian	%	0,00	0,00		0,00		15,00		15,00		20,00		50,00			
2	1	8		Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas	Persentase peningkatan pelayanan perhubungan darat, laut dan udara	%	0.00	0.00		0.00		100.0 0		100.0 0		100.00		100.00		Dinas Perhubunga n	
1 2	0 9	1 6		Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan				4,051,686,000.00		3,150,000,000.00		20,598,365,000.00		18,755,310,000.0 0		18,755,310,000.00		65,310,671,000			
					Persentase Perencanaan Transportasi yang diterapkan	%	0,00	0,00		0,00		50,00		50,00		50,00		50,00			
2	1	9		Meningkatnya Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal	Rasio elektrifikasi	%	95.2	97		98		99		100		100		100		DINAS ESDM	
2 0	0 5	1 6		Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan				20,815,338,500.0 0		21,886,450,000.00		21,641,390,000.00		22,761,910,000.0 0		22,761,910,000.00		109,866,998,500			
					Cakupan Pelayanan Listrik Perdesaan	ss	10.000,0 0	10.000 ,00		10.00 0,00		10.00 0,00		10.00 0,00		10.000 ,00		50.000, 00			
2	1	9		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Nilai	0	2.6		3		3.6		3.9		4		4		DINAS KOMINFO	
1 2	1 0	1 5		Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi				12,736,064,600.0 0		15,078,782,000.00		15,968,430,000.00		15,681,940,000.0 0		15,681,940,000.00		75,147,156,600			

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	
				2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Persentase penyediaan perangkat teknologi informsi dan komunikasi (TIK)	%	12,41	30,26		48,38		67,31		85,08		100,00		100,00	
				Persentase pengelolaan sarana dan prasarana Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	%	12,41	30,26		48,38		67,31		85,08		100,00		100,00	
3				Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas														
3	1			Terwujudnya Akses, Kualitas Pendidikan dan Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing	%	70.96	71.77		72.2		72.75		73.21		73.68		73.68	SERETARIS DAERAH
				Index Gini / Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	%	0,39	0.39		0.39		0,370		0,365		0,360		0,360	
				Kemiskinan	%	5.42	5.13		5		5,12		5,06		5,00		5,00	
				Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8.92	8.45		8.2		8,19		8,03		7,84		7,84	
3	1	1		Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	Thn	12.7	13		13.5		14		14.5		15		15	Asisten Kesejahtera an Rakyat
				Rata rata lama sekolah	Thn	8.37	8.47		8.7		8.9		9.1		9.3		9.3	
3	1	2		Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	%	0	0		0		100		100		100		100	
3	1	3		Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja bagi Masyarakat	%	100	100		100		100		100		100		100	
3	1	4		Meningkatnya Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender)	Nilai	91.39	91.67		91.95		92.23		92.51		92.79		92.79	

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M			Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggun g Jawab												
						2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD														
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp													
1			2			3				4			5	6		7	8		9	10		11	12		13	14		15	16		17
3	1	5	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah	%	71.13	72.9		74.67		76.45		78.22		80		80														Kadis Dindikbud
				Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah	%	57.21	58.77		60.33		61.88		63.44		65		65														
				Cakupan Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan	%	0.00	0.00		0.00		100		100		100		100														
1 1	0 1	2 0	Program Pendidikan Menengah Atas					0.00		0.00		39,522,720,000.00		111,492,258,056. 29		111,492,258,056.2 9											262,507,236,113				
				Angka Putus Sekolah SMA	%	0,25	0.00		0.00		0,16		0,13		0,10		0,10														
				Angka Kelulusan SMA	%	98,83	0.00		0.00		99,07		99,28		99,49		99,49														
				Nilai Rata-rata Ujian SMA IPA	%	50,70	0.00		0.00		54,48		55,74		57,00		57,00														
				Nilai Rata-rata Ujian SMA IPS	%	47,60	0.00		0.00		50,84		51,92		53,00		53,00														
				Persentase Lulusan SMA yang Melanjutkan ke Perguruan Tinggi	%	0.00	0.00		0.00		50.00		55.00		60.00		60.00														
				Persentase SMA di Provinsi Banten terakreditasi minimal B	%	0.00	0.00		0.00		70,00		75,00		80.00		80.00														
1 1	0 1	2 1	Program Pendidikan Menengah Kejuruan					0.00		0.00		31,734,587,000.00		89,522,197,943.7 1		89,522,197,943.71											210,778,982,887				
				Angka Putus Sekolah SMK	%	0,50	0.00		0.00		0,32		0,26		0,20		0,20														
				Angka Kelulusan SMK	%	99,87	0.00		0.00		99,92		99,93		99,95		99,95														
				Nilai Rata-rata Ujian SMK	%	54,70	0.00		0.00		57,10		57,90		58,70		58,70														

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM			Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
						2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD															
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp														
1				2			3				4		5	6		7	8		9	10		11	12		13	14		15	16		17	
					Persentase SMK yang menerapkan link and match	%	10,00	0.00		0.00			51,00		68,00		85,00		85,00													
					Persentase Lulusan SMK yang terserap di pasar kerja	%	0.00	0.00		0.00			80.00		85.00		90.00		90.00													
11	01	16	Program Pendidikan Khusus						13,388,500,000.00		11,238,432,000.00		17,150,000,000.00		9,016,270,000.00		9,784,770,000.00		60,577,972,000													
					Cakupan Layanan Sekolah Khusus dan Layanan Khusus	%	15.00	17.00		34.00		51.00		68.00		85.00		85.00														
3	1	7	Terwujudnya pemuda wirausahawan baru dan Olah Raga yang berprestasi	Indeks Pembangunan Kepemudaan	Nilai	0	10		20		30		40		45		45															DISPORA
				Indeks Pembangunan Olahraga	Nilai	0	10		20		30		40		45		45															
12	13	15	Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan					8,479,512,000.00		8,141,070,000.00		4,963,685,000.00		8,466,720,000.00		8,466,720,000.00		38,517,707,000														
					Cakupan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda Mandiri	%	70,00	75,00		80,00		85,00		90,00		100,00		100,00														
3	1	7	Meningkatnya Pengarustamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	68.74	69.54		70.34		71.14		71.94		72.74		72.74															DP3AKB
12	02	17	Program Pemberdayaan Perempuan					0.00		0.00		1,800,000,000.00		3,443,860,000.00		3,443,860,000.00		8,687,720,000														
					Persentase Keterlibatan Perempuan di Parleman	%	0,00	0,00		0,00		15,29		16,47		17,64		17,64														
					Persentase Peningkatan Kontribusi Perempuan Di Bidang Ekonomi	%	0,00	0,00		0,00		32,13		33,13		34,13		34,13														

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	
				2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	1	9	Meningkatnya Budaya Literasi	Indek Minat Baca Masyarakat	Nilai	25.1	0.00		0.00	40.00		45.00		50.00		50.00	DPAD	
1 2	1 7	1 5	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				2,784,654,500.00		1,427,000,000.00		1,215,000,000.00		1,484,080,000.00		1,484,080,000.00		8,394,814,500	
				Cakupan pembinaan perpustakaan Umum, perpustakaan khusus dan Perpustakaan Sekolah	%	75,00	85,00		90,00		95,00		100,00		100,00			
3	1	1 0	Menurunnya PMKS	Persentase Penanganan Jumlah PMKS	%	8.24	4.49		3.89		3.3		2.68		2.08		2.08	DINSOS
1 1	0 6	1 8	Program Penangan Fakir Miskin				1,545,318,000.00		650,000,000.00		560,000,000.00		676,000,000.00		676,000,000.00		4,107,318,000	
				Cakupan penanganan fakir miskin lintas kabupaten/kota	Kab/ kota	0,00	0,00		0,00		8,00		8,00		8,00		8,00	
3	1	1 1	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	%	58.06	59.01		60.01		5.69		5.72		5.74		5.74	DISNAKERT RANS
1 2	0 1	1 5	Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja				3,796,056,000.00		2,848,484,000.00		4,523,494,000.00		2,962,430,000.00		2,962,430,000.00		17,092,894,000	

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M			Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	
						2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	2			3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	%	4,31	4,35		4,40		4,42		4,44		4,46		4,46		
4				Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas															
4	1			Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan		69.46	69.76		70.06		70.36		70.66		70.96		70.96		SEKRETARIS DAERAH
4	1	1		Meningkatnya Pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)	Jml	308	304		300		290		290		285		285	Asisten Kesejahtera an Rakyat
					Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran hidup)	Jml	32	31		30		29		28		26		26	
4	1	2		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses	Penurunan Jumlah Kematian Ibu	Jml	247	247		242		237		232		227		227	DINKES
					Penurunan Jumlah Kematian Bayi	Jml	1149	1149		1144		1139		1134		1129		1129	
1 1	0 2	1 5		Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat					6,628,400,000.00		6,015,060,000.00		2,206,500,000.00		6,255,670,000.00		6,255,670,000.00		27,361,300,000
					Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	45,00	65,00		81,00		86,00		90,00		94,00		94,00	
					Prevalensi Stunting	%	0,00	0,00		0,00		24,60		23,60		23,60		23,60	
					Cakupan Kabupaten/Kota Sehat	Kab/ kota	0,00	0,00		0,00		7,00		8,00		8,00		8,00	
4	1	3		Meningkatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Tenaga Kesehatan	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	%	75	90		100		100		100		100		100	DINKES
1 1	0 2	1 6		Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan					65,562,430,841.0 0		155,379,175,000.0 0		253,936,000,000.0 0		245,594,350,000. 00		245,594,350,000.0 0		966,066,305,841

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M			Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	
						2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	2			3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Presentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan	%	75,00	90,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP, FKRTL, Laboratorium)	%	45,00	65,00		81,00		86,00		90,00		94,00		94,00		
				Persentase Terbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat	%	10,00	20,00		35,00		50,00		75,00		90,00		90,00		
				Persentase Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan	%	0,00	20,00		30,00		40,00		50,00		50,00		50,00		
4	1	4		Meningkatnya Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	%	0.00	60		65		70		75		80		80		DINKES/ RSUD
				BOR (Bed Occupancy Ratio).RSUD Malingping	%	0.00	60		65		65		70		70		75		
11	02	17		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (RSUD Banten)			88,864,205,844.00		77,018,902,727.00		90,613,209,413.00		61,127,922,000.00		61,127,922,000.00		378,752,161,984		
				Capaian SPM Pelayanan Medis dan SPM pelayanan keperawatan RSUD Banten	%	0,00	0,00		0,00		90,00		93,00		93,00		93,00		
				Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Banten	%	88,00	88,00		88,00		90,00		93,00		93,00		93,00		
				Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Banten	%	70,00	70,00		70,00		90,00		93,00		93,00		93,00		

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
				2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Capaian Pemenuhan standar sarana dan prasarana RSUD Banten dan presentase kelengkapan pengisian rekam Medik 24 jam setelah selesai pelayanan (Satuan: %)	%	0,00	0,00		0,00		85,00		90,00		90,00		90,00		
		Capaian Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (Satuan: %)	%	0,00	0,00		0,00		85,00		90,00		90,00		90,00		
		Capaian kelengkapan pengisian Rekam Medik 24 Jam setelah selesai pelayanan (Satuan: %)	%	0,00	0,00		0,00		85,00		90,00		90,00		90,00		
11	023	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (RSDU Malingping)				21,467,386,429.00		20,942,504,054.00		30,796,234,000.00		40,751,948,000.00		40,751,948,000.00		154,710,020,483	
		Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Malingping	%	0,00	0,00		0,00		100.00		100.00		100.00		100.00		
		Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Malingping	%	0,00	0,00		0,00		100.00		100.00		100.00		100.00		
		Capaian SPM penunjang RSUD Malingping	%	0,00	0,00		0,00		100.00		100.00		100.00		100.00		
5		Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi															
5	1	Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasis Potensi Ekonomi Lokal	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.26	6		6.2		6.4		6.7		7		7	SEKRETARIS DAERAH

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M			Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggun g Jawab		
							2017	2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2			3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Tingkat Inflasi	%	2.94	3.7		4.2		4		4		4		4			
5	1	1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	%	0.00	0.00		0.00		6		6.2		6.4		6.4		Asisten Ekonomi dan Pembangun an	
5	1	2	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Indeks Keuangan Inklusif	Nilai	0.00	0.00		0.00		2.8		2.9		3		3			
5	1	3	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Peringkat Daya Saing Provinsi dibandingkan Provinsi Lain di Indonesia	Nilai	0.00	0.00		0.00		100		100		100		100			
5	1	4	Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon	Emisi Rumah Kaca	%	0.00	0.00		0.00		100		100		100					
5	1	5	Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Realisasi Investasi (PMA + PMDN)	Triliyun	52.3	0.00		0.00		49.00		51.30		53.90		53.90		DINAS PMPTSP	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Investor	%	82.16	85.09		85.22		85.47		85.72		85.97		85.97			
1 2	1 2	1 5	Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi					3,867,933,240.00		2,891,390,000.00		2,250,000,000.00		3,007,050,000.00		3,007,050,000.00		15,023,423,240		
				Jumlah calon investor yang mendaftar	Investor	0,00	0,00		0,00		1000, 00		1000, 00		1000,0 0		1000,0 0			
				Jumlah Kerjasama BUMD	BUMD	0,00	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		2,00			
5	1	6	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrian yang optimal	LPE Sektor Perindustrian	%	3.05	3.7		3.95		4.2		4.45		4.7		4.7		DINAS PERINDAG	
2 0	0 7	1 5	Program Peningkatan Daya Saing Industri					2,320,140,000.00		4,548,563,000.00		2,300,000,000.00		4,730,510,000.00		4,730,510,000.00		18,629,723,000		

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
				2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah Industri yang menyelenggarakan penyiapan SDM secara Link and Match	Jml	0,00	0,00	0,00		18,00		18,00		18,00		54,00	
				Persentase Pertumbuhan Produk Ekspor industri yang berbasis sumber daya alam dan atau Lokal	%	0,00	0,00	0,00		3,00		3,00		4,00		10,00	
5	1	7	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali	LPE Sektor Perdagangan	%	3.82	4.9	5.4		5.9		6.4		6.9		6.9	DINAS PERINDAG
				Tingkat Inflasi Bahan Pokok	%	0.00	0.00	0.00		4		4		4		4	
20	06	15	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri					1,807,687,500.00		3,917,439,800.00		2,650,000,000.00		4,074,140,000.00		4,074,140,000.00	16,523,407,300
				Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu dan Wilayah	%	5,00	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00	
				Neraca ketersediaan barang pokok	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
				Peningkatan Persentase Produk Lokal yang beredar pada Retail Modern	%	0,00	0,00	0,00		10,00		10,00		10,00		30,00	
				Jumlah Komoditas yang berpartisipasi pada Pasar Lelang Komoditi Berjangka	Komoditi	0,00	0,00	0,00		2,00		2,00		2,00		6,00	
20	06	16	Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri					1,071,557,000.00		1,586,966,000.00		1,550,000,000.00		1,650,450,000.00		1,650,450,000.00	7,509,423,000
				Surplus Neraca Perdagangan	Triliyun	2828,83	2970,27	3118,79		3274,72		3438,46		3610,38		3610,38	
				Calon eksportir baru	Eksp	0,00	0,00	0,00		5,00		5,00		5,00		15,00	

Kode				TUJUAN/SASARAN/PROGRA M	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggun g Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							2017	2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					Akses informasi dan perluasan jaringan pasar ekspor	Jml	0,00	0,00		0,00		6,00		6,00		6,00		18,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

Kode	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
				2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Capaian Produksi Tanaman Kelapa	Ton	43116,0 0	43978, 00		44858 ,00		4575 5,00		4667 0,00		47604, 00		47604, 00		
		Penyediaan Benih Sumber tanaman perkebunan (Kakao, Kelapa)	Batang	0,00	0,00		0,00		100,0 0		100,0 0		100,00		300,00		
		Pengamanan Produksi Tanaman Perkebunan dari gangguan serangan OPT dan DPI	%	0,00	0,00		0,00		10,00		10,00		10,00		10,00		
		Pengawasan Benih Perkebunan	Komoditi	0,00	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		3,00		
2 0	0 3	1 8	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan			1,931,445,925.00		3,937,665,925.00		4,963,800,000.00		4,095,180,000.00		4,095,180,000.00		19,023,271,850	
		Peningkatan Produksi Daging	Ton	33,52	33,52		34,18		1451 35,00		1479 78,00		15088 1,00		443998 ,00		
		Peningkatan Capaian Retribusi UPTD BP3T	%	0,00	0,00		0,00		10,00		10,00		10,00		30,00		
5	1	9	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan yang optimal	Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan	%	4,48	0.00		0.00	4,72		4,80		4,93		4,93	DINA KELAUTAN DAN PEIKANAN
2 0	0 1	1 5	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap			2,188,586,493.00		3,824,455,000.00		2,912,700,000.00		3,977,440,000.00		3,977,440,000.00		16,880,621,493	
		Persentase Produksi Perikanan	%	7,49	8,01		8,08		8,16		8,23		8,61		8,62		
		Persentase capaian kinerja pelayanan usaha kepelabuhanan	%	0,00	0,00		100,0 0		100,0 0		100,0 0		100,00		100,00		
		Persentase usaha kelautan yang direkomendasikan dari jumlah pelaku usaha yang ada di wilayah utara Provinsi Banten	%	0,00	0,00		100,0 0		100,0 0		100,0 0		100,00		100,00		

Kode			TUJUAN/SASARAN/PROGRA M	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggun g Jawab		
						2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp	
1			2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Persentase usaha kelautan yang direkomendasikan dari jumlah pelaku usaha yang ada di wilayah selatan Provinsi Banten	%	0,00	0,00		100,0 0		100,0 0		100,0 0		100,00		100,00		
5	1	10	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah yang terjaga	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	%	82.40	89.20		90.60		83.50		84.50		85.00		85.00			DINAS KETAPANG
12	03	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan					989,783,400.00		2,300,670,225.00		1,937,810,000.00		2,392,700,000.00		2,392,700,000.00		10,013,663,625		
				Ketersediaan pangan	%	93,90	95,10		96,30		93,50		94,50		95,00		95,00			
5	1	11	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata yang optimal	Persentase peningkatan nilai PDRB sektor Pariwisata	%	2.84	0		0		2.99		3.04		3.09		3.09			DINAS PARIWISAT A
20	02	18	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata					2,696,897,400.00		2,404,926,350.00		2,350,000,000.00		2,501,130,000.00		2,501,130,000.00		12,454,083,750		
				Persentase Pengembangan Destinasi Wisata berbasis Sapta Pesona	%	0,00	0,00		0,00		20,00		20,00		20,00		60,00			
5	1	12	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Peningkatan Kualitas Koperasi	%	NA	0.00		0.00		6		6		6		18			DISKOP UKM
12	11	16	Program Pengembangan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi					763,425,000.00		1,075,493,000.00		1,050,000,000.00		2,368,520,000.00		2,368,520,000.00		7,625,958,000		
				Capaian Koperasi Aktif	%	6,00	6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		30,00			
5	1	13	Meningkatnya Usaha Kecil menjadi usaha menengah	Persentase Peningkatan Omset Usaha Kecil	%	NA	0.00		0.00		1		1		1		3			DISKOP UKM
12	11	15	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil					2,234,167,200.00		2,125,116,000.00		1,575,000,000.00		3,509,510,000.00		3,509,510,000.00		12,953,303,200		

Kode				TUJUAN/SASARAN/PROGRA M	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
							2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan dunia usaha lain	%	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		5,00		
5	1	1	4	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	43.67	44.17		44.67		50.87		51.83		52.79		52.79		DINAS LHK
1	0	1		Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup					5,415,175,900.00		4,199,900,000.00		3,073,746,000.00		4,367,900,000.00		4,367,900,000.00		21,424,621,900	
				Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Klp		203,00	52,00		60,00		68,00		76,00		78,00		334,00		
				Indeks Kualitas Air	Nilai	51,00	51,50		52,00		52,50		53,00		53,50		53,50			
				Indeks Kualitas Udara	Nilai	58,80	59,00		59,20		66,80		68,80		70,80		70,80			
				Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan	%	0,00	0,00		0,00		16,90		17,60		19,00		19,00			
5	1	1	5	Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	%	30.6	31.21		31.71		32.21		32.71		33.21		33.21		DINAS LHK
2	0	1		Program Perencanaan dan Pemanfaatn Hutan				0.00		0.00		1,300,000,000.00		1,801,152,000.00		1,801,152,000.00		4,902,304,000		
				Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat		0,00	0,00		0,00		10,00		10,00		10,00		10,00			
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang (Satuan: Kelompok)	Klp	0,00	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		9,00			

Kode				TUJUAN/SASARAN/PROGRA M	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggun g Jawab																																																			
							2017	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD																																																					
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp																																																				
1				2				3								4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17			
					Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Klp	0,00	0,00							3,00				3,00							3,00								9,00																																					
5		1	1	7	Meningkatnya Pengendalian, Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara yang efektif	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	%	0.79	0				0		0.65			0.63				0.60										0.60					DINAS ESDM																																		
2	0	5	1	8	Program pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi dan Air Tanah					0.00			0.00				2,302,797,500				2,588,420,172									2,588,420,172					7,479,637,844																																				
					Persentase pelayanan dan pengendalian geologi dan air tanah	%	0,00	0,00				0,00			55,44			76,94				100,00									100,00																																								
2	0	5	1	9	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara					0.00			0.00				2,550,672,500				2,867,039,828									2,867,039,828					8,284,752,156																																				
					Persentase pelayanan dan pengendalian mineral dan batubara	%	0,00	0,00				0,00			70,32			86,30				100,00									100,00																																								
5		1	1	7	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase pekerja Penuh Waktu	%	0.00	0.00				0.00		43.75			45			46.29										46.29					DISNAKERT RAN																																			
1	0	1	1	6	Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan					3,270,800,000.00			3,702,597,000.00				5,257,676,000.00				3,850,710,000.00									3,850,710,000.00				19,932,493,000																																					
					Capaian Hubungan Industrial	%	2,93	3,66				4,40			5,25			6,17				7,10									7,10																																								
					Capaian Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	%	10,00	10,00				10,00			10,00			10,00				10,00									10,00																																								
					Capaian Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	9,49	9,51				9,53			9,54			9,55				9,56									9,56																																								

6.6 PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS PROVINSI BANTEN

Tingginya potensi ekonomi daerah disertai adanya pengembangan kawasan strategis di Provinsi Banten tentunya dapat meningkatkan target kinerja perekonomian terutama di sektor infrastruktur dengan banyaknya proyek pembangunan berskala besar dengan besarnya anggaran yang dibelanjakan. Dampak positif dari pembangunan tersebut haruslah bersifat *effect multiplier* (efek pengganda).

Tabel 6.9
Proyek Strategis

No	Rencana Proyek
1	Kerjasama pendirian Banten <i>Mangrove Center</i>
2	Kerjasama pengelolaan Situ
3	SPAM Regional
4	Pengelolaan Sampah Terpadu
5	Sport Center Provinsi Banten
6	<i>Public facilities</i> terkait pembangunan Tol Serang – Panimbang
7	<i>Public facilities</i> terkait pembangunan Waduk Karian dan Sindang Heula
8	Revitalisasi Banten Lama

Proyek strategis daerah pada tabel 6.9 diperlukan anggaran yang sangat besar, dengan terbatasnya kapasitas fiskal, pemerintah Provinsi Banten harus mencari alternatif sumber pembiayaan lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan proyek strategis tersebut. Ada beberapa skema pembiayaan yang bisa dimanfaatkan dan dimungkinkan oleh aturan yang berlaku. Alternatif pembiayaan pembangunan diantaranya yaitu melalui Skema Pembiayaan Investasi Non Pemerintah (PINA), KPBU dan Obligasi (pinjaman) Daerah merupakan pendekatan/skema yang relatif baru dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik di Provinsi Banten, sehingga perlu melakukan berbagai langkah strategis dalam penyiapan pengimplementasian dari sisi regulasi, kelembagaan, kapasitas SDM, dan lain-lain serta.

Selain skema pembiayaan yang relatif baru tersebut di atas, adapula bentuk pelibatan lain dari pihak swasta yang telah dimanfaatkan, yaitu skema Program Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan dan Bina Lingkungan (TJSKBL / *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sejauh ini, sudah cukup

banyak layanan publik dan fasilitas kepada masyarakat yang diperoleh dari skema tersebut hanya belum dapat diklaim mengingat belum tertuang didalam RPJMD. Namun demikian, sinergi antara kegiatan TJSKBL dengan program pembangunan dan kesesuaian dengan kebutuhan riil di masyarakat perlu dioptimalisasi baik dari sisi koorporate maupun Pemerintah Provinsi Banten didalam pengelolaannya.